



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 3 TAHUN 2002

**TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang demokratis, desentralistik, transparan serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat perlu disusun perencanaan Pembangunan Daerah yang bersifat komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau 2001-2005 yang merupakan konsepsi penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor: 36 tahun 2001 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor :40 Tahun 2001);
 - c. bahwa sesuai dengan proses dan mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah serta pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau 2001-2005, untuk menjaga konsistensi perencanaan dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun perlu disusun program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau 2001-2005 yang merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2001-2005;
 - d. bahwa dengan berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :050/1240/II/ Bangda tanggal 21 Juni 2001, perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota maka untuk Propinsi Riau disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau tahun 2001-2005;
 - e. bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau 2001-2005 Perlu Menetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau Tahun 2001-2005 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor : IV/MPR 1999, tentang GBHN Tahun 1999-2004;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1646);
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3260);
4. Undang-Undang Nomor :24 Tahun 1992, tentang Petaan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999, tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor; 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4849);
7. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor :72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
8. Undang-Undang Nomor :25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor:3952);
10. Keputusan Presiden Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor :36 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Nomor :40 Tahun 2001);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2005.**

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Riau, merupakan dokumen manajerial komprehensif sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2001-2005 yang memuat indikasi program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah di berbagai bidang.

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Visi, Misi dan Strategi
- BAB III Arah Kebijakan
- BAB IV Kebijakan dan Program Pembangunan
- BAB V Kaidah Pelaksanaan
- BAB VI Penutup

Pasal 3

Isi beserta uraian terinci sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan daerah ini terdapat dalam Naskah Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Riau melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Propinsi Riau setiap tahunnya.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 yang dijabarkan melalui Repetada untuk setiap tahunnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana dari partisipasi masyarakat, investasi swasta dan sumber dana lainnya.

Pasal 6

Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 ini ditinjau kembali sekali lima tahun ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Program Pembangunan Nasional (Propenas), dan Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Provinsi Riau atau sesuai dengan ketentuan lain yang ditetapkan.

Pasal 7

- 1) Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005, ditetapkan oleh Gubernur Riau bersama dengan DPRD Propinsi Riau.
- 2) Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan pelaksanaan APBD Propinsi Riau.
- 3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak ditetapkannya Tahun Anggaran 2001, tanggal 31 Maret 2001.
- 4) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 maret 2002

GUBERNUR RIAU

H.SALEH DJASIT,SH

Diundangkan : Di Pekanbaru
Pada tanggal : 8 maret 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP.010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR: 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 2002

N A S K A H

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
PROPINSI RIAU TAHUN 2001 - 2005**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU
2002**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan beragama untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan perjuangan sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Krisis ekonomi telah menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan dipusat dan daerah tak terkecuali Propinsi Riau. Krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis politik dan krisis kepercayaan, telah memberikan implikasi secara menyeluruh terhadap tatanan kehidupan politik dan hukum, dimana tanpa dapat di hindarkan telah mendorong terjadinya pergeseran-pergeseran paradigma kehidupan pada tatanan nasional dan daerah.

Sala satu hal yang cukup signifikan adalah pengaruh perubahan politik terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembanguana di Propinsi Riau, dengan dimekarkannya daerah menjadi 16 kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan peningkatan status pada daerah yang baru dimekarkan memiliki otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab seperti halnya daerah otonom lainnya, sehingga berbagai bentuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diwilayah tersebut yang selama ini selalu tertinggal, secara perlahan akan di akomodir dan ditempatkan pada porsi yang sesungguhnya secara proporsional, akuntabilitas dan transparan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang aspiratif, akomodatif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis, diperlukan masukan yang dapat dijadikan acuan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bersifat strategis untuk mengantisipasi berbagai permasalahan daerah. Dengan demikian, maka perlu rumusan perencanaan pembangunan Propinsi Riau selama lima tahun kedepan (2001-2005) untuk menciptakan peran ganda, tidak saja untuk kepentingan Riau sendiri tetapi juga untuk kepentingan nasional dan wilayah sekitarnya, terutama dalam upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa negara dan pendapatan daerah, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil-hasil pembangunan pada dasarnya harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Riau secara adil dan merata sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, dan meningkatkan ketahanan daerah. Pada akhirnya pembangunan daerah sebagai pembangunan masyarakat akan memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat yang tercermin dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang.

Pertumbuhan kebijaksanaan pembangunan kemungkinan diambilnya tindakan tertentu baik yang bersifat eksternal maupun internal, dan dapat menimbulkan perubahan-perubahan tertentu pada pembuat kebijaksanaan pembangunan maupun masyarakat. Karena itu, kebijaksanaan pembangunan merupakan variabel yang sangat strategis untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik dari berbagai alternatif. Strategi tersebut merupakan bentuk pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang sangat penting. Pemecahan masalah yang terbaik sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus lebih berorientasi kepada pembangunan wilayah yang selaras, serasi dan seimbang antara Propinsi Riau dengan daerah sekitarnya. Berkenaan hal tersebut, maka Propinsi Riau harus memiliki kesamaan visi dalam meletakkan dasar-dasar pembangunannya. Keadaan ini akan

memberikan peluang pada Riau untuk berkembang atas kemauannya sendiri, dengan konsekuensi berupa peningkatan perencanaan pembangunan yang memerlukan peralatan secara profesional dan proporsional.

1.2 Pengertian

PROPEDA atau Program Pembangunan Daerah, adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah Propinsi Riau yang memuat visi, misi arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2001-2005 sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Nasional (Propenas), dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 yang berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

1.3. Kedudukan dan Fungsi

PROPEDA atau Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 Propinsi Riau adalah kerangka dasar penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Riau, dengan tetap memperhatikan GBHN 1999-2004 dan PROPENAS, berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bagi segenap aparatur pemerintah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Organisasi Pendidikan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh masyarakat di daerah, guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

PROPEDA atau Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 ditetapkan dengan maksud memberikan arahan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokrasi, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin.

1.4.2. Tujuan

1. Menyusun arah, strategi, dan program-program pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi, dan potensi yang ada di daerah tersebut, mencakup aspek-aspek makro, sektoral dan kewilayahan.
2. Memberikan gambaran kondisi umum Propinsi Riau saat ini, serta visi, misi dan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.
3. Sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan yang dapat dijadikan acuan utama bagi dinas/instansi di Propinsi Riau dalam menyusun program-program pembangunan selama 5 (lima) tahun.

1.5. Landasan

PROPEDA atau Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau tahun 2001-2005 disusun berdasarkan.

- a. Landasan Idil ; Pancasila
- b. Landasan Konstitusional ; UUD 1945
- c. Landasan Operasional ; -GBHN 1999-2004
-Propenas 2001-2005
-Poldas 2001-2005

1.6. Kewenangan Propinsi

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah. Karena Program Pembangunan Daerah akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), maka substansi dan muatan Program Pembangunan Daerah dibatasi hanya dengan rencana program pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Propinsi.

Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang bersifat lintas kabupaten/ kota, seperti bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, perkebunan. Disamping kewenangan tersebut, juga Propinsi memiliki kewenangan tertentu lainnya yakni dibidang:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro
- b. Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah propinsi.
- c. Pengelolaan pelabuhan regional.
- d. Pengendalian lingkungan hidup.
- e. Promosi dagang dan budaya/pariwisata.
- f. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman
- g. Perencanaan tata ruang propinsi.

Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak dapat atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, sedangkan wewenang Propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah (*dekonsentrasi*).

1.7. Ruang Lingkup dan Sistematika

1.7.1. Ruang Lingkup

1.7.2. Sistematika

BAB 1	:	PENDAHULUAN
BAB 2	:	VISI, MISI DAN STRATEGI
BAB 3	:	ARAH KEBIJAKAN
BAB 4	:	KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN
BAB 5	:	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB 6	:	PENUTUP

BAB II

VISI, MISI DAN STRATEGI

2.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan potensi dan kondisi yang terdapat dalam masyarakat Propinsi Riau, maka visi pembangunan daerah adalah "Terwujudnya Propinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020".

2.2. Misi Pembangunan Daerah

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi Pembangunan Daerah Propinsi Riau, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Riau yang beriman dan bertaqwa, berkualitas, sehat, cerdas, terampil dan sejahtera serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan peran lembaga pendidikan sekolah maupun luar sekolah guna membentuk karakter, moral dan etika masyarakat yang agamis.
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia serta kehidupan demokratis, guna tercipta masyarakat yang madani.
4. Mewujudkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial, politik dan budaya agar tercipta dan terlaksana pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, pembedayaan ekonomi rakyat, peningkatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pembinaan industri, perdagangan dan jasa yang maju didukung oleh agroindustri dan agrobisnis.
6. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan hubungan kerja sama antar Daerah Propinsi, antar kabupaten dan kota dalam Propinsi Riau serta luar negeri dalam segala bidang
8. Membina dan mengembangkan kebudayaan Melayu yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan jati diri, sehingga tercipta masyarakat Melayu yang maju, mandiri dan mampu bersaing
9. Mewujudkan dan meningkatkan fungsi manajemen pemerintah daerah, pembantuan sikap kemandirian masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, baik dan berwibawa (*Clean government and good governance*)

2.3. Strategi Kebijakan

2.3.1. Strategi Jangka Panjang

Dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Propinsi Riau tahun 2020, melalui upaya :

1. Menumbuhkan semangat pemantapan keimanan dan ketakwaan serta memperkokoh toleransi antar umat beragama
2. Mengembangkan mutu pendidikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan mutu dan etos kerja sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam persaingan global
4. Melakukan penggalan, pengkajian dan pemutakhiran nilai-nilai kebudayaan Melayu secara terpadu dan berkesinambungan yang mendukung kemajuan pemerdayaan rakyat.

5. Meningkatkan kesadaran berbudaya Melayu, dalam upaya menangkal budaya luar (Asing) yang negatif dalam rangka mewujudkan jati diri daerah dan bangsa
6. Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan penekanan sektor unggulan secara terpadu dan sinergi antar sektor maupun antar wilayah.
7. Memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintah yang andal, profesional, transparan dan akuntabel
8. Membangun infrastruktur untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan
9. Menegakan hukum dan HAM untuk menciptakan demokratisasi dan keadilan
10. Mewujudkan dan meningkatkan penyelesaian tata batas wilayah Propinsi, kabupaten/kota sehingga tidak menimbulkan kerawanan social.

2.3.2. Strategi Jangkah Pendek.

Pada tahap awal turun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdapat 5 (lima) hal penting sebagai pemacu pembangunan Propinsi Riau dalam bentuk strategi jangkah pendek yang selanjutnya disebut 5 (lima) pilar pembangunan Riau yang substansinya sebagai berikut:

1. Pembanguna dalam rangkah meningkatkan iman dan taqwa
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
3. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
4. Pembangunan klesehatan dan olah raga
5. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan

Selain kebijaksanaan tersebut diatas, untuk dapat memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian kebijaksanaan tersebut, maka diprioritaskan pula beberapa kegiatan penunjang yang akan ds tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

1. Pembinaan dan pengendalian penataan ruang, pertanahan, kependudukan dan lingkungan hidup
2. Pembinaaan dan pengembangan supermasi hukum, aparatur, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Pembinaan dan pengembangan komunikasi, informasi dan media masa.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

3.1. Umum

Pembangunan daerah diselenggarakan daerah secara bertahap dalam jangka panjang dan jangka menengah lima tahunan, dalam pelaksanaannya mendayagunakan seluruh sumber daya daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah terutama diperhatikan adalah azas kemandirian, yaitu bahwa pembangunan daerah berdasarkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan lepribadian bangsa. Azas manfaat menghendaki bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan daerah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pribadi warga Negara, mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan daerah ini bersifat indikatif yang hanya memberikan arahan secara umum terhadap apa yang akan dituju, sasaran yang akan dicapai dan skala prioritas yang akan ditempuh. Oleh karena itu sesuai dengan sifatnya yang indikatif, maka sasaran yang diperkirakan untuk dicapai tidaklah laku, tetapi akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan.

3.2. Arah Kebijakan

Sejalan dengan proses reformasi dan demokrasi, termasuk tuntutan otonomi daerah yang lebih luas, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kesenjangan antar daerah, antar kota dan desa, antar golongan masyarakat dalam hal pendapatan.
- 2) Kesenjangan antara pusat dan daerah dalam hal pembagian pendapatan.
- 3) Isu-isu internasional seperti globalisasi, kerja sama ekonomi sub regional, perdagangan bebas, lingkungan dan sebagainya
- 4) Kesenjangan pembangunan antar sektor
- 5) permasalahan pemerintah daerah yang semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan harus dapat ditangani secara sefesifik oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2001-2005 meliputi upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) mewujudkan manajemen pemerintah daerah yang baik, yang diarahkan untuk meingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang proporsional, produktif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik lokal maupun internasional. Hal ini sesuai dengan tuntutan publik lokal maupun internasional terhadap pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip *clean government and good governance*.
- 2) Membangun landasan ketahanan budaya Melayu, dimana disamping merupakan tujuan sekaligus juga merupakan sarana untuk membangun kesejahteraan rakyat yang dilandasi iman dan taqwa.
- 3) Membangun kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, upaya ini dimaksudkan untuk membangun ketahana ekonomi kerakyatan yang dapat menunjang komoditas unggulan daerah pada sub sektor perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, holtikultura, dan pengembangan

industri rumah tangga maupun program *one village one product*, disamping pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

- 4) Memberdayakan masyarakat, melalui peningkatan kemampuan masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif, guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam memasuki era globalisasi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang keuangan daerah, diarahkan pada peningkatan kemampuan dan profesionalisme keseluruhan dari tatanan perangkat, kelembagaan dan kebijakan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dalam peningkatan kemandirian daerah melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin andal dan efisien, serta mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong timbulnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat, serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui upaya kerja untuk terus meningkatkan tabungan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kebijakan dalam bidang keuangan daerah didasarkan pada sasaran *money follow function* dimana uang harus mengikuti program.

3.3. Asumsi Dasar

Perkembangan kondisi masyarakat Propinsi Riau dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, sosial, politik dan keamanan. Kondisi tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses pemulihan pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang.

Dilandasi kondisi diatas maka penyusunan kerangka makro ekonomi agar terarah dan terukur dalam memperkirakan pertumbuhan ekonomi, digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Perkembangan perekonomian Propinsi Riau lebih banyak didukung oleh sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan dan galian serta industri pengolahan. Dimana hasil produksinya merupakan komoditi andalan ekspor bagi Propinsi Riau keluar negeri sehingga adanya kontribusi dari ekspor diharapkan akan menyebabkan pertumbuhan perekonomian Propinsi Riau.

b. Aspek Politik dan Keamanan

Situasi politik di Propinsi Riau dapat dikatakan relatif stabil dan terkendali, sehingga tidak akan mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Kondisi demikian diharapkan tidak mengganggu/mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah Riau.

3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

3.4.1. Tujuan Pembangunan.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersih dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana kehidupan yang agamis, aman, tenteram, tertip dan dinamis sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di daerah, melalui upaya:

- a. Mengembangkan sikap dan tekad kemandirian masyarakat dan pemerintah Daerah Riau dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menyerap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta imteq, sebagai asset dan potensi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin.
- b. Mengembangkan dan merealisasikan laju pertumbuhan pembangunan antar kabupaten/kota dan wilayah pedesaan, antar sector dan wilayah.

- c. Meningkatkan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam yang diperbaharui, yang selama ini memberikan kontribusi sector ekonomi yang cukup besar dalam PDRB (Produk Domestic Regional Bruto).
- d. Meningkatkan investasi dan peran swasta yang mampu mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, dengan membangun system informasi pemerintah daerah.
- e. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya dengan strategi dasar Riau menuju ekonomi baru.

3.4.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah:

- a. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berencana, menyeluruh, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan daerah, terutama pada wilayah kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau.
- b. Terwujudnya satuan pandangan dan derap langkah antara masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan.

3.4.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Berdasarkan pada kondisi ekonomi nasional pada saat ini, perlu dipertimbangkan beberapa kendala untuk melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 serta proyeksi PDRB Propinsi Riau, yang akan mempengaruhi ketepatan angka-angka proyeksi tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi untuk melakukan proyeksi ditingkat nasional yaitu:

- 1) Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah sampai saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan, sehingga rupiah masih belum dapat dijadikan patokan dalam penentu harga pokok dan nilai produksi.
- 2) Defisit neraca pembayaran luar negeri yang pada mulanya terlalu tinggi memaksa pemerintah untuk membatasi impor, sehingga sangat mempengaruhi permintaan bahan baku, barang modal dan bahan penolong lainnya, yang pada gilirannya akan menurunkan produksi dalam negeri.
- 3) Terjadinya gejolak dan fluktuasi yang sangat mempengaruhi nilai saham didalam negeri yang tercermin dari tidak stabilnya indeks harga saham gabungan, menyebabkan investasi yang akan dilakukan tidak dapat diperkirakan dengan tepat.
- 4) Restruktuisasi perbankan nasional yang tidak kunjung selesai walaupun sudah berjalan empat tahun, menyebabkan pengucuran dana perbankan sebagai modal atau investasi dunia usaha kurang berjalan lancar, sehingga menghambat bergeraknya *sector riil*.

Kendala diatas walaupun secara bertahap kelihatannya dapat diatasi oleh pemerintah, namun dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan PDRB, kendala tersebut masih mempengaruhi hasil proyeksi yang dilakukn, walaupun pengaruhnya diusahakan sekecil mungkin.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku Propinsi Riau tahun 1993-1998 meningkat dengan tajam yaitu dari Rp 6.031,68 miliar menjadi Rp. 16.148,59 miliar atau naik rata-rata 21,62 %. Pendapatan perkapita juga meningkat dari Rp. 1.755. 803, 63 menjadi Rp. 3.590.758, 24 atau nilai rata-rata 15,38%. Tetapi jika dikaitkan dengan jumlah infansi pada kurun waktu yang bersangkutan yaitu rata-rata 21,62%, maka kebaikan pendapatan per kapita tersebut belum apa-apa.

Table 3.1: Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Propinsi Riau Tahun 1993-1998 (Per Miliar Rupiah)

No	Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998
1	pertanian	1.252,15	1.377,96	1.564,74	1.707,85	1.903,75	3.673,99
2	pertambangan	144,67	199,06	263,29	321,15	363,89	467,93
3	Industri	1.569,26	1.935,58	2.496,95	2.982,95	3.363,24	4.193,34
4	Listrik	58,31	68,53	81,33	96,19	113,41	149,90
5	Bangunan	386,58	479,36	591,28	719,31	831,78	972,09
6	Perdagangan	1.127,85	294,23	470,53	1.671,77	1.909,35	2.855,79
7	Pengangkutan	397,59	462,56	536,42	612,52	707,24	981,11
8	Keuangan	601,95	695,25	809,30	930,44	1.173,71	1.565,73
9	Jasa	493,32	539,36	593,81	659,31	895,63	1.188,71
	Jumlah	6.031,68	7.051,89	8.407,65	9.701,49	11.262,00	16.048,59

Sumber : BPS propinsi riau

Catatan : Tingkat Inflansi Rata-rata 21,62%

PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 dari tahun 1993- 1998, juga mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Walaupun sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan awal tahun 1999 perekonomian nasional dilanda krisis moneter, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Adanya krisis ekonomi telah menyebabkan turunnya investasi pada tahun 1997 dan tahun 1998.

Selanjutnya PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993, untuk tahun 1993 berjumlah Rp. 6.031,68 miliar dan pada tahun 1998 meningkat menjadi Rp. 8.394, 128 miliar. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 1993 sampai tahun 1998 rata-rata 6,83%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu yang sama sebesar 3,79%. Sektor yang menunjang tercapainya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9,30% antara lain sektor industri, dimana tahun 1993 sebesar Rp.1.569,26 miliar dan tahun 1998 menjadi Rp. 2.448,36 atau dengan laju pertumbuhan sebesar 9,30%, sehingga sumbangan sektor industri terhadap PDRB naik dari 26,02% menjadi 29,17% dengan jumlah investasi sebanyak Rp. 5.078,28 miliar.

Table 3.2 : Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Propinsi Riau Tahun 1993-1998 (Per Miliar Rupiah)

No	Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998
1	pertanian	1.252,15	1.263,95	1.324,46	1.347,20	1.374,52	1.252,69
2	pertambangan	144,67	172,90	203,77	231,52	249,72	219,70
3	Industri	1.569,26	1.801,93	2.068,70	2.352,57	2.555,92	2.448,63
4	Listrik	58,31	615,87	66,19	70,62	76,71	89,87
5	Bangunan	386,58	457,28	511,52	583,26	644,91	464,45
6	Perdagangan	1.127,85	1.230,15	1.333,43	1.433,31	1.549,77	1.556,00
7	Pengangkutan	397,59	439,90	486,38	537,41	582,73	603,89
8	Keuangan	601,95	654,28	690,76	745,29	917,51	862,87
9	Jasa	493,32	506,74	526,39	551,25	607,24	623,75
	Jumlah	6.031,68	6.589,00	7.211,60	7.852,43	8.559,03	8.394,18

Sumber : BPS propinsi riau

Sektor perdagangan hotel dan restoran laju pertumbuhannya rata-rata 6,63% sehingga PDRB sektor perdagangan hotel dan restoran naik dari Rp. 1.127, 85 miliar menjadi 1.556,00

miliar dan sumbangannya terhadap Produk Domestic Regional Bruto sedikit menurun, yaitu dari 18,70% menjadi 18,54%. Sedangkan jumlah investasi yang dilaksanakan dari tahun 1993-1998 sebesar Rp. 2.329,15 miliar. Peranan sector pertanian selama tahun 1998 terdapat penurunan dari 20,76% menjadi 18,18%, karena jumlah PDRB sektor pertanian hanya meningkat dari Rp. 1.252,15 miliar menjadi sebesar Rp. 1.252,69 miliar, sehingga laju pertumbuhannya rata-rata kurang dari 1,00%, walaupun jumlah invesasi pada sektor ini mencapai Rp. 1.104,9 miliar.

Sektor perdagangan yang merupakan sekor kunci pada perekonomian Propinsi Riau tumbuh rata-rata 8,72% setahun. Jumlah PDRB sektor pengangkutan naik dari Rp 397,59 miliar menjadi Rp. 603,89 miliar, peranannya terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 meningkat dari 6,59% menjadi 7,19% antara tahun 1993 dengan tahun 1998. jumlah investasi yng dilaksanakan pada priode tersebut Rp. 1.224,85 miliar.

Sektor- sektor lain tumbuh rata-rata 6,05% setahun karena PDRB sektor-sektor ini naik dari Rp. 1.689,83 miliar menjadi Rp. 2.260,64 miliar. Karena pertumbuhan yang dicapai oleh sektor-sektor ini sebesar 6,05%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau sebesar 6,83% maka peranan sektor-sektor ini terhadap PDRB menurun dari 27,93% menjadi 26,92%.

Table 3.3 : Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Propinsi Riau Tahun 1993-1998 dan Laju Pertumbuhan (Persen)

No	Sector	1993	Pertumbuhan			1998
			1993-1996	1996-1998	1993-1998	
1	Pertanian	20,76	2,47	6,42	4,03	18,18
2	Pertambangan	2,40	16,97	-2,59	8,72	2,62
3	Industri	26,02	14,45	2,02	9,30	29,17
4	Listrik	0,97	6,59	12,81	9,04	1,07
5	Bangunan	6,41	14,69	-10,76	3,74	5,53
6	Perdagangan	18,70	8,32	4,19	6,65	18,54
7	Pengangkutan	6,59	10,57	6,00	8,72	7,19
8	Keuangan	9,98	7,38	7,60	7,47	10,28
9	Jasa	8,17	3,77	6,43	4,79	7,42
	Jumlah	100,00	9,19	3,39	6,83	100,00

Sumber: BPS propinsi riau

Pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun sebelum terjadinya krisis moneter (1993-1996) relatif sangat tinggi, yakni mencapai 9,19% rata-rata pertahunnya, pada masa krisis pada tahun 1996-1998 mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi rata-rata 3,39% pertahunnya, namun apabila dihitung secara keseluruhan selama lima tahun dari tahun 1993-1998 laju pertumbuhan ekonomi masih relatif tinggi, yakni sekitar 6,83%.

Besarnya PDRB jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 1993 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 58.503,30 miliar. Berarti secara nimal melebihi dari target. Tetapi pada waktu tersebut terjadi inflansi yang sangat tinggi sehingga nilai riil PDRB tersebut menjadi rendah. Sedangkan jumlah investasi yang direncanakan sebesar Rp 20.868,88 miliar atau sebesar 39% dari jumlah PDRB atas dasar harga berlaku, tercapai sebanyak Rp 15.090,54 miliar atau sebesar 25,79% dari jumlah PDRB tahun 1993-1998. jumlah realisasi investasi tersebut sector yang paling besar investasinya disusul oleh sector industri Rp 5.078, 28 miliar (33,65%) kemudian disusul sektor perdagangan sebesar Rp 2.329,15 miliar (15,43%), sektor

bangunan sebesar Rp 1.104, 19 miliar (7,32%) dan sektor-sektor lainnya berjumlah Rp 4.426,60 miliar (29,34 %).

Table 3.4: jumlah investasi dipropinsi riau tahun 1993-1998 (miliar rupiah)

No	Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	Jumlah
1	pertanian	108,24	119,12	135,27	147,64	268,52	325,40	1.104,19
2	pertambangan	98,20	135,12	178,72	218,00	180,30	131,82	942,16
3	Industri	793,65	978,92	1.262,83	1.508,63	237,78	296,47	5,078,28
4	Listrik	17,29	20,32	24,11	28,53	46,13	62,73	119,11
5	Bangunan	255,55	316,88	390,86	472,50	323,16	390,37	2.152,32
6	Perdagangan	328,43	379,88	428,21	496,82	280,01	418,80	2.329,15
7	Pengangkutan	168,10	195,57	226,80	258,97	169,74	235,47	1.224,65
8	Keuangan	133,27	153,93	179,18	205,99	267,61	235,47	1.296,96
9	Jasa	65,09	70,77	78,35	87,00	198,74	356,98	763,72
	Jumlah	1.967,82	2.367,51	2.904,33	3.417,08	1.971,99	2.481,81	15.090,54

Sumber : 1. APBD Propinsi Riau
 2. Anggaran Sektoral
 3. Bank Indonesia
 4. BKPMR Propinsi Riau

Catatan: 1. Inflansi 21,60%
 2. Pertumbuhan 6,83%
 3. Investasi terhadap PDRB 25,79%
 4. ICOR 3,78%

Perkiraan PDRB Propinsi Riau tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, didasarkan kepada beberapa landasan, antara lain perkiraan tingkat inflansi selama kurun waktu tersebut sebesar 7,50 % rata-rata setiap tahun, jumlah investasi diperkirakan akan mencapai 21,58% dari jumlah PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun, dan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diperkirakan akan mencapai 3,75% yang berarti untuk meningkatkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 1,00 miliar diperlukan investasi sebanyak Rp 3,75 miliar. Angka ICOR ini diperkirakan lebih rendah dari tahun yang lalu sebesar 3,78%.

Selain itu diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2001-2005 rata-rata 5,76 % setahun. Berdasarkan asumsi diatas maka diperkirakan jumlah PDRB atas dasar harga berlaku untuk tahun 2005 sebesar RP 26.564, 24 miliar, artinya terdapat peningkatan rata-rata 8,23 %. Dengan demikian pendapatan perkapita untuk propinsi riau pada tahu 2001 sebesar RP 4.255.106,82 miliar akan meningkat menjadi Rp 5.222.636,36.

Table 3.5 : Perkiraan Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Propinsi Riau Tahun 2001-2005 (Miliar Rupiah).

No	Sector	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian					5.666,881
2	Pertambangan					881,95
3	Industri					7. 612,53
4	Listrik					1.779,65
5	Bangunan					1.779,65

6	Perdagangan					4.622,12
7	Pengangkutan					1.627,99
8	Keuangan					2.131,56
9	jasa					1.980,08
	Jumlah	19.357,60	21.223,61	23.010,92	24.786,56	26.564,24

Sumber: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Universitas Riau

Asumsi: tingkat inflasi rata-rata 7,50 %

PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 jika tahun 2001 diperkirakan sebanyak Rp 10324, 63 Miliar, maka pada tahun 2005 diperkirakan akan mencapai RP 12.423, 35 Miliar. Dengan demikian selama tahun 2001-2005 pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau akan meningkat setiap tahun rata-rata sebesar 5,76 %. Angkah pertumbuhan ekonomi cukup memadai apabila dibandingkan dengan pertambahan penduduk rata-rata 3,79 % setahun.

Tabel 3.6. Perkiraan Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Propinsi Riau Tahun 2001-2005 (Miliaran Rupiah)

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	1.618,59	1.618,79	1.716,99	1.766,19	1.815,39
2	Pertambangan	303,26	321,36	339,46	357,56	375,66
3	Industri	3.223,55	3.421,87	3.620,19	3.818,51	4.016,83
4	Listrik	103,05	108,95	114,85	120,75	126,65
5	Bangunan	668,93	698,19	727,45	756,71	785,97
6	Perdagangan	1.873,81	1.965,23	2.056,65	2.148,07	2.239,49
7	Pengangkutan	745,47	788,65	831,63	875,01	918,19
8	Keuangan	1.083,14	1.144,54	1.205,94	1.267,34	1.328,74
9	Jasa	704,83	732,08	760,63	788,53	816,43
	Jumlah	10.324,63	10.848,66	11.373,79	11.898,67	12.423,35

Sumber : Pusat Penelitian Ekonomi Universitas Riau

Sektor-sektor yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 % antara sektor industri yang tumbuh rata-rata 7,33 % sehingga sumbangnya terhadap PDRB meningkat dari 29,17 % tahun 2001 menjadi 32,22% pada tahun 2005. sektor perdagangan hotel dan restoran tumbuh rata-rata 5,34 % dan sumbangnya terhadap PDRB sedikit menurun yaitu dari 18,54 % menjadi 18,03 %, hal ini disebabkan karena pada sektor perdagangan hotel dan restoran lebih ditekankan kepada pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan.

Sektor pertanian akan tumbuh rata-rata 2,51 % rendah dari tahun-tahun yang lalu karena kebijaksanaan pada sektor pertanian lebih mengutamakan pemerdayaan pertanian rakyat dengan sekalah kecil tetapi jumlah yang besar. Sedangkan sektor pertanian yang dikelola oleh perusahaan besar swasta khususnya pada sub sektor perkebunan lebih ditekankan pada peremajaan, rehabilitasi dan pemeliharaan, sehingga tidak akan terjadi perluasan areal. Oleh karena itu peranan sektor pertanian terhadap PDRB akan menurun dari 18,18 % menjadi 14,62 %.

Sektor pertambangan dan galian (di luar migas) akan tumbuh rata-rata 7,96%, sehingga peranannya terhadap PDRB akan meningkat dari 2,62 % tahun 2001 menjadi 3,02 % pada tahun 2005. meningkatnya peranan sektor pertambangan terhadap PDRB didukung oleh meningkatnya hasil-hasil pertambangan golongan C yang dikelola oleh masyarakat seperti

pertambangan rakyat, penggalian pasir laut, krikil dan lain-lain, dengan menjaga kelestarian lingkungan, tidak mencemari lingkungan dan bebas dari polusi.

Sektor pembangunan diharapkan akan tumbuh rata-rata 7,80 % dan perannya akan meningkat dari 5,53% tahun 2001 menjadi 6,33% tahun 2005. Sektor pengangkutan yang merupakan sektor penggerak investasi dan pembangunan diperkirakan akan tumbuh rata-rata 6,17 % dan perannya terhadap PDRB akan meningkat dari 7,19% menjadi 7,39%. Sedangkan sektor-sektor lainnya akan tumbuh rata-rata antara 5 sampai 6 % sehingga peranannya terhadap PDRB juga akan meningkat pada tahun 2005.

Table 3.7. Perkiraan Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Propinsi Riau Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1998-2005 (Persen)

No	Sektor	1998	Pertumbuhan	2005
1	Pertanian	18,18	2,51	14,61
2	Pertambangan	2,62	7,96	3,02
3	Industri	29,17	7,33	32,33
4	Listrik	1,07	5,02	1,02
5	Bangunan	5,53	7,80	6,33
6	Perdagangan	18,54	5,34	18,03
7	Pengangkutan	7,19	6,17	7,39
8	Keuangan	10,28	6,36	10,70
9	Jasa	7,42	3,93	6,57
Jumlah		100,00	5,76	100,00

Sumber : BPS Propinsi Riau

Pada tahun 2001-2005 jumlah investasi yang diperlukan untuk seluruh kabupaten dan kota adalah Rp 51.590,92 miliar, termasuk Propinsi Riau sebesar Rp 24.854,92 miliar. Besarnya investasi setiap kabupaten dan kota yang paling besar adalah kota Batam Rp 4.458.57 miliar dan yang terkecil adalah kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 842,72 miliar.

Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,76 % diperlukan jumlah investasi sebesar Rp 24854, 92 miliar, jumlah ini ditetapkan dengan mempertimbangkan angka ICOR 3,75 persen, pertumbuhan ekonomi 5,76 % tingkat inflasi. Rata-rata 7,50 persen dan jumlah investasi mencapai 21,58 persen dari jumlah PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, jumlah inflasi yang diperkirakan sebesar Rp. 24.854,92 miliar jika dirincikan menurut sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8: Perkiraan Investasi Menurut Sektor Propinsi Riau

No	Sektor	Investasi (Miliar Rupiah)	Persentase
1	Pertanian	2.448,02	11,20
2	Pertambangan	1.321,58	5,32
3	Industri	9.661,05	38,87
4	Bangunan	2.409,75	9,70
5	Perdagangan	3.748,73	15,08
6	Pengangkutan	1.746,10	7,03
7	Jasa	1.180,56	4,75
8	Sektor lainnya	2.339,13	8,05

Sumber : PPSE UNRI

Adapun sumber investasi sebesar Rp 24.854,92 miliar diharapkan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta sebagian lagi dari masyarakat. Perbandingan jumlah investasi pemerintah dan jumlah investasi masyarakat adalah berbanding antara 28,70 persen dengan 71,30 persen, sehingga investasi pemerintah sebesar Rp 7.133,49 miliar atau rata-rata Rp 1.426,65 miliar pertahun. Sedangkan jumlah investasi masyarakat sebesar Rp 17.721,42 miliar.

Jumlah investasi pemerintah sebesar Rp 7.133,49 miliar diperkirakan dapat dicapai karena berdasarkan Undang-Undang pertimbangan keuangan antar pusat dengan daerah, yang diberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh persentase bagi hasil yang semakin besar, serta bertambahnya sumber-sumber pendapatan asli daerah dan adanya kewajiban perusahaan besar swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah, yang semuanya akan dikuatkan dengan peraturan Daerah.

3.4.4. Pemuliana Ekonomi

Dimasa mendatang pembanguna ekonomi menghadapi tantangan utama yang terkait dengan proses globalisasi, desentralisasi, dan otonomisasi. Secara nyata proses globalisasi terus berlangsung dengan cepat, tidak dapat dihentikan dan tidak pula dapat dihindarkan. Dunia tanpa batas (*border Less*) ini akan meningkatkan arus perdagangan dan investasi dunia dan setiap bangsa mempunyai peluang untuk memanfaatkannya. globalisasi telah melahirkan harapan-harapan baru dalam kehidupan antar bangsa.

Disisi lain globalisasi juga merupakan ancaman, jika daerah mampu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Setiap daerah akan menghadapi dengan persiapan-persiapan yang selaras dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sumber daya manusia, manajemen dan system kelembagaan yang diarahkan pada peningkatan daya saing perekonomian masing-masing. Perekonomian yang tidak memiliki daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis global dan akan tersisih dari medan pesaingan dan serta akan mengalami kemunduran. Ancaman terdekat yang akan dihadapi adalah pelaksanaan pasar bebas negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2002.

Melaksanakan proses desentralisasi agar berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan serta menyeluruh.

Desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2001. Tuntutan desentralisasi ini tidak terhindarkan karena kebijakan pembangunan yang sangat terpusat tidak akan mampu lagi mengikuti dinamika masyarakat Propinsi Riau yang berkembang semakin cepat. Inti dari desentralisasi ini adalah memberdayakan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreativitas serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian daerah-daerah tersebut mempunyai kewenangan yang cukup besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Di satu sisi desentralisasi memberi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensinya, namun disisi lain desentralisasi jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan in-efisiensi, in-efektivitas, dan kesenjangan antar daerah yang semakin lebar, yang akan dapat memicu timbulnya distorsi kebijakan yang berasal dari pusat ataupun propinsi

dan mengenalannya disintegrasi kewilayaan yang akan mengakibatkan Propinsi Riau menjadi terkotak-kotak.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya, maka agenda yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi untuk jangka pendek adalah mempercepat upaya pemulihan ekonomi yang disertai upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama masa krisis.

Upaya pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas dan dipercepat karena beban ekonomi rakyat sudah semakin berat dan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan yang lebih baik pada masa mendatang. Lambatnya pemulihan ekonomi cenderung akan memicu timbulnya gejolak sosial yang akan membahayakan proses pemulihan ekonomi itu sendiri.

Upaya pemulihan ekonomi harus dilakukan secara sinergis dari seluruh komponen pembangunan baik secara horizontal dari seluruh sektor pembangunan maupun vertical dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah kabupaten/ kota.

Pemulihan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara harmonis dan saling memperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata. Hal ini antara lain harus ditunjukan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dan kesenjangan antar penduduk, meningkatkan daya saing sebagai peningkatan efisiensi dan terjaganya ketersediaan cadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Secara normatif untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berlandaskan aturan main yang jelas, etika dan moral yang baik, serta nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan derajat, hak dan kewajiban warga negara termasuk gender. Untuk itu system nilai yang harus melandasi pembangunan daerah sebagai wujud dari perekonomian Indonesia yang dibangun harus berubah. Wujud perekonomian yang baru harus berbeda dari wujud perekonomian sebelum terjadi krisis, dimana pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang harus lebih adil dan merata, berdaya saing dengan basis efisiensi diberbagai sektor dan memiliki keunggulan kompetitif serta keunggulan komperatif untuk dapat memenangkan persaingan global: berwawasan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat lebih menonjol secara bersih, dan bebas dari praktek-praktek distorsi

Langkah-langkah strategis untuk melaksanakan pemulihan ekonomi harus sesuai dengan arahan GBHN 1999 dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Riau dalam rangka pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mengacu pada 7 prinsip utama:

- 1) Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan, berdasarkan system ekonomi kerakyatan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkeadilan
- 2) Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola baik pemerintah maupun perusahaan
- 3) Pembangunan ekonomi harus berdasarkan daya dukung sumber daya alam, lingkungan hidup dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 4) Pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing
- 5) Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta masyarakat secara aktif dan nyata serta konsisten
- 6) Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan ekonomi global

- 7) Pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara hati-hati, disiplin dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah sebagai bagian integral dari perekonomian nasional, maka disamping berlandaskan prinsip-prinsip tersebut diatas, dan penerapan mekanisme pasar, maka pembangunan ekonomi mutlak memerlukan dukungan stabilitas sosial, politik serta system hukum yang baik.

3.4.5 Penuntasan Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan pertumbuhan penduduk selama tahun 2000 sampai tahun 2005 rata-rata sebesar 3,79 persen, maka pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,76 persen, dipandang cukup memadai mengingat kondisi ekonomi nasional dan daerah masih belum pulih sama sekali. Disamping itu juga dengan mempertimbangkan kemungkinan bertambahnya jumlah investasi masyarakat masih belum menentu, serta tingkat inflasinya yang relative masih tinggi, maka perkiraan investasi selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebesar Rp 24.854, 92 miliar yang terdiri dari kemampuan pemerintah Propinsi Riau sebesar 30 persen dan masyarakat 70 persen. Jika angka ICOR dapat dipertahankan sebesar 3, 75 maka diharapkan akan terjadi perbaikan distribusi pendapatan pada tahun 2005, dimana 40 persen penduduk yang berpenghasilan rendah yang tergabung dalam usaha kecil, menengah dan koperasi, akan menerima bagian yang lebih besar dibanding dengan tahun 2000 sebagai berikut:

table 3.9. Distribusi Pendapatan Menurut Golongan Tahun 2000-2005 (Persen)

Golongan	2000	2005
- 40 % penduduk berpenghasilan rendah menerima	12,22	20,17
- 40 % penduduk berpenghasilan sedang menerima	35,65	46,35
- 20 % penduduk berpenghasilan tinggi menerima	52,13	33,53
- Indek Gini Ratio	0,5400	0,3510

Sumber : PPSE-UNRI

Berdasarkan distribusi pendapatan diatas maka dapat diketahui akan terjadinya perbaikan pola distribusi pendapatan didalam masyarakat pada tahun 2005, yaitu 40 persen penduduk yang berpenghasilan rendah akan menerima 20,12 persen dari total pendapatan dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 2.668.755,51. Bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima pada tahun 2000 sebesar 17,07 persen dengan pendapatan rata-rata Rp 1.163.200,83, maka diharapkan terjadi peningkatannya sebesar rata-rata 18,07 persen.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita 40 persen penduduk yang berpenghasilan rendah rata-rata 18,07 persen setahun, maka akan mendorong terjadinya penurunan angka kemiskinan absolute yaitu 45,5 persen dari jumlah penduduk pada tahun 1998 menjadi 19,83 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2005.

Menyangkut dengan kesempatan kerja erat hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi yang direncanakan. Rencana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 persen rata-rata setahun antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, sedangkan elastisitas tenaga kerja pada kurun waktu yang sama adalah sebesar 0,77 maka kesempatan kerja akan bertambah rata-rata 4,45 persen setahun. Dengan demikian jumlah kesempatan kerja pada tahun 2000 sebanyak 1.649.089 orang maka untuk tahun 2005 akan menjadi 2.050.153 orang atau selama 5 tahun

terjadi penambahan kesempatan kerja sebanyak 401.064 kesempatan kerja. Bertambahnya kesempatan kerja sebanyak 401.064 harus didukung oleh hal-hal berikut :

- 1) Tingkat inflansi rata-rata 7,50 persen setahun
- 2) Jumlah investasi sebesar Rp 24.854,92 miliar
- 3) Berkurangnya tingkat in-efesiasi dan pemborosan yang ditandai dengan angka ICOR tidak melebihi 3,75.
- 4) Pertumbuhan ekonomi rata-rata sama dengan 5,76 persen atau lebih

Pada tahun 2000 jumlah kerja 2.921,368 orang dan apabila penambahan tenaga kerja setahun sebesar 3,93 persen, maka pada tahun 2005 jumlah tenaga kerja adalah 3.516.856 orang, dari jumlah tersebut angkatan kerja sebanyak 2.198.035 orang.

Dibandingkan dengan tahun 2000 jumlah angkatan kerja 1.649.089 orang maka terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 548.946 orang. Pertambahan kesempatan kerja antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 adalah 401.064 orang, dengan demikian akan terdapat kelebihan angkatan kerja sebanyak 147.882 orang atau pengangguran sebesar 5,21 persen, angka pengangguran ini lebih kecil jika dibandingkan dengan angka pengangguran tahun 2000 sebesar 6,26 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

4.1. Kebijakan Pembangunan

4.1.1. pemulihan ekonomi daerah

1. kondisi umum

Krisis ekonomi Indonesia yang berlangsung sejak pertengahan agustus 1997 adalah merupakan krisis yang terparah, dengan terjadinya krisis tersebut telah menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami penurunan depresiasi yang sangat tajam terhadap mata uang US \$ lebih dari 80 persen, sedangkan tingkat bunga telah peningkatan yang tajam pula hingga mencapai 60 persen pertahun.

Krisis tersebut telah menimbulkan kebangkrutan pada sektor usaha skala besar yang mengandalkan pasar dalam negeri dengan bahan baku impor, meningkatkan tingkat pengangguran tenaga kerja, menurunkan tingkat upah dan daya beli masyarakat, serta menambah jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Walaupun dapat sedikit mengurangi boom komoditi ekspor non migas karena adanya depresiasi nilai tukar rupiah, khususnya disektor pertanian dan perikanan diberbagai daerah terutama diluar jawa, tidak dapat mengkompensir dampak negatif krisis ekonomi itu.

Krisis ekonomi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang berarti terutama karena terjadinya krisis politik yang berlangsung secara paralel dan independent, sehingga semakin menambah parahnya kondisi perekonomian. Krisis pada kedua sistem ekonomi dan system politik juga telah menimbulkan dampak negative pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya seperti sistem hukum, sistem pertahanan keamanan serta sistem sosial budaya. Ideology Pancasila maupun bentuk Negara kesatuan yang sangat sentralisasi yang dikembangkan dalam masa Orde Baru juga perlu ditinjau kembali. Krisis itu bukan saja telah menimbulkan ketegangan dan kerusuhan sosial, tetapi terhadap gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban serta rusaknya jalinan hubungan sosial, kesatuan maupun keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Upaya pengendalian stabilitas dan pemulihan ekonomi sangat terkait dengan kondisi stabilitas sosial dan politik. Pada gilirannya, pemulihan kembali stabilitas sosial memerlukan pembaharuan sistem sosial berdasarkan konsensus nasional baru, dimana sistem sosial yang baru tersebut harus mampu mengoreksi distorsi serta konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi guna menjamin adanya hak kesamaan politik warga negara, Otonomi Daerah dan pemerataan ekonomi.

2. Kondisi Perekonomian Riau

Pertumbuhan ekonomi Daerah Riau selama pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) menunjukkan trend yang meningkat, kendati lajunya mengalami siklus naik turun. Walau sejak tahun 1974 pertumbuhan ekonomi tanpa minyak dan gas bumi mulai menurun, namun secara rata-rata masih mencapai angka 6,66 persen. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tentu berkaitan dengan jumlah investasi yang dilaksanakan.

Pada pelita I jumlah PDRB mencapai Rp 71.242, 56 juta, nilai investasi sebesar Rp 12.733,68 juta atau 17,87 persen dari jumlah PDRB, maka pada tahun 1996 jumlah PDRB telah mencapai Rp10.258,79 miliar dengan jumlah investasi mencapai Rp 3.430.25 miliar atau 33,77 persen dari jumlah PDRB. Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurang lebih 22 tahun, Daerah Riau telah berhasil meningkatkan jumlah investasi hampir dua kali lipat.

Dilain pihak kemajuan perekonomian yang dicapai selama kurun waktu tersebut juga dapat dilihat pada peningkatan pendapatan perkapita, yaitu dari sebesar US \$ 57,50 pada tahun

1978 naik menjadi sebesar US \$ 852,49 pada tahun 1993 dan meningkat lagi pada tahun 1996 menjadi sebesar US \$ 1.122,26.

Menyangkut dengan perkembangan beberapa sektor penting, terutama sector pertanian, antara lain adalah sub sector tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun sebelumnya luas panen tanaman pangan adalah 145.894 hektar dengan jumlah produksi 541.468 ton. Pada akhir pelita VI luas panen adalah 154.203 hektar dengan jumlah produksi 534.932 ton. Dari perkembangan diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi pengurangan areal tanam pada sub sektor tanaman pangan lebih kurang sebanyak 8.309 hektar yang berarti telah terjadi pengalihan penggunaan lahan.

Pada sub sektor perkebunan juga terjadi perkembangan, antara lain pada perkebunan kelapa rakyat yang semula luas arealnya 446.097 hektar dengan jumlah produksi 331.564 ton pada akhir pelita VI telah berkembang menjadi 486.610 hektar dengan jumlah produksi 398.442 ton. Demikian juga luas tanaman karet rakyat yang telah meningkat dari 401.066 hektar dengan produksi sebesar 184.871 ton menjadi 451.029 hektar dengan produksi 198.464 ton. Perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang luar biasa di daerah riau. kelapa sawit mulai dikembangkan di daerah riau pada tahun 1984, pada tahun 1992 luas arealnya telah mencapai 312.429 hektar, jumlah produksi 367.725 ton. Pada akhir pelita V saja arealnya sudah mencapai 403.429 hektar dengan jumlah produksi 658.264 ton dengan rata-rata pertambahan areal 13,58 persen dengan pertambahan produksi lebih dari 40 persen setahun.

Sektor industri di Daerah Riau menjelang terjadinya krisis ekonomi berkembang dengan sangat pesat, hal ini disebabkan sektor industri memang dipacu dan diarahkan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan ekspor non migas. Laju pertumbuhan selama kurun waktu 1993-1996 telah mencapai 14,45 persen sehingga peranan sektor industri dapat menyumbang pada PDRB propinsi riau sebesar 28,56 persen. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri memang masih belum menggemirakan oleh karena tenaga kerja yang diserap pada tahun 1993 adalah 3,93 persen dari jumlah tenaga kerja dan tahun 1995 sebesar 6,47 persen.

Pada bidang kesejahteraan sosial juga terdapat kemajuan yang cukup baik, yaitu turunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran dari 110 bayi menjadi 60,4 bayi pada tahun 1997. meningkatnya angka harapan hidup di Daerah Riau dari 52 tahun menjadi 66,7 tahun dan tercapainya angka melek huruf sebesar 95,4 persen.

Menyangkut dengan pola distribusi pendapatan terutama tentang kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif dapat digambarkan sebagai berikut: untuk tingkat kemiskinan absolute terdapat penurunan yang cukup baik, yaitu pada tahun 1975, 47 persen penduduk di Daerah Riau masih dibawah garis kemiskinan pada tahun 1992 berjumlah 13,7 persen serta tahun 1994 telah menjadi 12,1 persen bahkan pada tahun 1996 telah mencapai 9,6 persen. Sedangkan menyangkut dengan kemiskinan relative juga telah menunjukkan kemajuan yaitu pada tahun 1997,40 persen penduduk yang berpenghasilan rendah menerima 17,07 persen dari jumlah pendapatan untuk tahun 1999 telah berubah menjadi 12,12 persen. Angka diperkuat dengan menurunnya indek Gini 0,3321 menjadi 0, 5400.

3. Kondisi Perekonomian Riau Pada Masa Krisis Ekonomi

Berdasarkan berbagai kebijaksanaan makro sampai pertengahan tahun 1997, telah memberikan hasil yang nyata, yaitu telah membawa dampak pada kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh tinggihnya laju pertumbuhan ekonomi yang disertai semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Pada tahun 1996 jumlah penduduk pada tingkat nasional yang berada dibawah garis kemiskinan masih mencapai sekitar 27 juta jiwa atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk. Namun belum tuntas menyelesaikan masalah

fundamental tersebut, dipertengahan tahun 1997 badai krisis moneter merambah ke Indonesia, berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik. Akumulasi krisis ini telah mengguncang dasar perekonomian nasional.

Pada tahun 1997 menjelang krisis moneter laju pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 9 %, namun pada tahun 1998 dimana krisis ekonomi telah berlangsung pertumbuhan ekonomi turun secara dratis menjadi -1,81 % dan pada tahun 1999 kembali mengalami pertumbuhan yang positif, yakni dapat mencapai sekitar 4,16 %.

Berbagai masalah telah menyebabkan kegiatan ekonomi Riau pada masa krisis mengalami pasang surut terutama pada sektor perbankan dan sektor industri berskala besar yang tergantung pada impor serta turut tergantungnya kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kondisi yang kurang menguntungkan ini kemudian membawa dampak pada meningkatnya angka pengangguran baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Dilain pihak krisis juga menyebabkan kesulitan keuangan negara maupun swasta yang berdampak ke daerah, bahkan tidak sedikit sektor swasta harus menutup usahanya. Yang lebih memprihatinkan dampak krisis menyebabkan terjadinya ledakan pengangguran baik di perkotaan maupun di pedesaan. Daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan merosot. Dampak selanjutnya adalah jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan meningkat tajam. Berdasarkan data BKKBN jumlah penduduk miskin (prasejahtera dan keluarga sejahtera I) mencapai sekitar 43,85 persen dari jumlah penduduk. Sehingga yang menjadi tantangan adalah bagaimana merumuskan langkah nyata untuk segera terlepas dari kondisi krisis dan kembali ke arah pembangunan yang normal.

4. Permasalahan Pokok Dalam Pemulihan Ekonomi Daerah

a. Efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan

Menyangkut dengan efisiensi dan efektivitas yang kurang memadai dalam pelaksanaan investasi modal, hal ini terbukti dari nisbah tambahan investasi terhadap hasil yang diperoleh dengan investasi yang bersangkutan. Nisbah tersebut dikenal dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Selama waktu 10 tahun terakhir yang mencakup pelita III dan pelita V, angka ICOR berkisar antara 4,5 sampai dengan 5,0.

Dengan jumlah investasi pada tahun 1996 sebesar 33,7 persen dari Produk Domestic Regional Bruto, laju pertumbuhan yang dicapai hanya sebesar 8,00 persen, yang berarti angka ICOR sebesar 4,5. andai kata angka ICOR dapat ditekan sebesar 3, maka laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai pada tahun 1996 adalah 9,36 persen. Angka ICOR lebih dari 4, harus dianggap terlalu tinggi, seharusnya angka tersebut setinggi-tingginya 3,5. dengan tingginya angka ICOR tadi, membuktikan bahwa untuk Daerah Riau masih dalam kondisi ekonomi biaya tinggi.

Tingginya angka ICOR di Daerah Riau, disebabkan oleh berbagai faktor teknis ekonomis dan ekonomis yaitu kurangnya infrastruktur serta kurangnya efisiensi pengeluaran. Memang dalam proses pembangunan untuk beberapa lama harus dilakukan investasi dalam infrastruktur yang bersifat *slow yielding dan low yielding* sebelum investasi yang bersangkutan membuahkan hasil, lagi pula hasil tersebut biasanya terletak ditingkat yang agak rendah. Akan tetapi pemborosan tersebut sebahagian bersumber pada kelemahan teknis dalam perencanaan, penyelenggaraan dan perawatan proyek-proyek investasi. Untuk sebagian lagi in-efisiensi dan pemborosan berkaitan dengan berbagai segi negatif pada iklim institusional, yaitu penyimpangan dan penyelewengan karena kurang dipatuhinya kaidah-kaidah moral secara normative. Sehubungan dengan

itu harus dinilai secara bertahap tetapi konsisten untuk menurunkan angka ICOR menjadi 3 sampai 3,5.

b. Ketidakseimbangan antara jumlah investasi yang dilaksanakan masyarakat dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Investasi masyarakat sebesar 86 persen, sedangkan investasi pemerintah 16 persen. Investasi masyarakat khususnya golongan pengusaha pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu yang diutamakan adalah peningkatan produksi yang akan dipasarkan baik untuk dalam negeri maupun luar negeri, akhirnya meningkatkan PDRB yang mendorong tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi pemerintah mempunyai tujuan ganda yaitu untuk menjaga stabilitas dan mewujudkan pemerataan pembangunan pengalaman menunjukkan selama beberapa pelita yang lalu, dengan tercapainya laju pertumbuhan yang tinggi, tidak diiringi oleh distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata, menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin besar. Oleh karena itu, harus diusahakan agar investasi masyarakat yang besar itu terkait dengan unsur pemerataan, sehingga kesenjangan sosial dan pemerataan distribusi pendapatan didalam masyarakat dapat diatasi.

c. Disparitas laju pertumbuhan sektor pertanian dengan industri

Secara menyeluruh laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1996 sebesar 9,36 persen. Akan tetapi dalam perkembangan tersebut, pertumbuhan sektor pertanian jauh ketinggalan dengan laju pertumbuhan 2,47 persen dibandingkan dengan laju pertumbuhan industri dengan laju pertumbuhan 14,45 persen. Satu sama lain menunjukkan bahwa produktivitas dan pendapatan nyata disektor industri lebih besar lima kali lipat, dibandingkan dengan produktivitas dan pendapatan nyata disektor pertanian. Ketimpangan tersebut ini memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, sebab tanpa intervensi pemerintah secara aktif, ketimpangan ini cenderung berlangsung terus bahkan akan semakin besar.

Sektor pertanian dengan laju pertumbuhan sebesar 2,47 persen memberikan sumbangan terhadap PDRB semakin menurun yaitu dari 26,02 persen menjadi 20,69 persen. lain halnya dengan sektor industri tanpa migas, dengan laju pertumbuhan 14,45 persen menyebabkan peranannya terhadap PDRB meningkat dari 25,92 persen menjadi 28,56 persen. Tetapi meningkatnya peranan sektor industri terhadap PDRB, tidak diiringi dengan peningkatan tenaga kerja disektor industri yang memadai, yaitu tahun 1993 sebesar 3,94 persen menjadi 6,47 persen ditahun 1996.

Pengalaman menunjukkan bahwa orientasi sektor industri di Propinsi Riau adalah peningkatan ekspor dengan sebagian input yang diimpor serta menggunakan teknologi canggih dengan mengurangi tenaga kerja. Akibatnya pertumbuhan sektor industri hampir tidak ada kaitannya dengan sektor lain seperti sektor pertanian dan industri hilir, sehingga tujuan mendorong sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh tidak terwujud.

Oleh karena itu untuk masa yang akan datang sektor industri yang berorientasi pada peningkatan ekspor non migas, harus dikaitkan dengan sektor pertanian sebagai penyediaan bahan baku dan pendorong majunya industri hilir.

d. Kesenjangan pembangunan antar daerah kabupaten/kota

Ketidakseimbangan ini lebih disebabkan oleh perbedaan kondisi dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan investasi dimasing-masing daerah kabupaten/kota seperti: ketersediaan tenaga listrik, air, prasarana dan sarana perhubungan dan

telekomunikasi. Perbedaan tersebut dengan jelas dapat dilihat pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Riau, khususnya dilaut Cina Selatan. Lain halnya pada daerah kota Batam, kota Pekanbaru, sebagian daerah dipulau Bintan, dan Karimun, dimana sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan investasi relatif telah tersedia dengan memadai. Ketidak seimbangan dimaksud dapat dilihat pada jumlah investasi pada masing-masing daerah kabupaten dan kota pada tahun 1996.

Jumlah investasi yang paling besar terdapat di kota Batam sebesar Rp 9.790,06 miliar, disusul oleh Kabupaten Bengkalis Rp 935,43 miliar, Kota Pekanbaru Rp 693, 93 miliar, Kabupaten Kepulauan Riau sebesar Rp 539,90 miliar, Kabupaten Indragiri Hilir Rp 396,20 miliar, Kabupaten Kampar Rp 379,82 miliar dan yang paling kecil adalah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 233,61 miliar.

Aspek lain dari ketidak seimbangan tersebut juga dapat dilihat pada kemampuan masing-masing kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemampuan yang dimaksud dapat diukur dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan penerimaan daerah pada tahun yang bersangkutan yaitu tahun anggaran 1998/1999 sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Indragiri Hulu dengan penerimaan rutin sebesar Rp 60,014 miliar, pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,053 miliar (1,64 persen)
- 2) Kabupaten Kampar dengan penerimaan rutin sebesar Rp 116,158 miliar, pendapatan asli daerah sebesar Rp 3,326 miliar (2,86 persen).
- 3) Kabupaten Bengkalis dengan penerimaan rutin sebesar Rp 140,295 miliar dan pendapatan asli daerah Rp 7,474 miliar (5,33 persen).
- 4) Kabupaten Kepulauan Riau dengan penerimaan rutin sebesar Rp 102,823 miliar dan pendapatan asli daerah 25,701 miliar (6,14 persen).
- 5) Kota Pekanbaru dengan penerimaan rutin sebesar Rp 66,765 miliar, dan pendapatan asli daerah Rp 9,411 miliar (14,10 persen).
- 6) Jika dibandingkan dengan Propinsi Riau, penerimaan rutinnya adalah sebesar Rp 358,551 miliar, sedangkan pendapatan asli daerahnya sebesar Rp 95,380 miliar (43,63 persen).

Dari keteangan diatas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh kabupaten pendapatan daerahnya sangat kecil kecuali Kota Pekanbaru yang agak memadai. Untuk mengatasi hal ini perlu diambil langkah-langkah untuk menyeimbangkan kembali perimbangan keuangan antara daerah kabupaten/kota dengan propinsi, serta meningkatkan prasarana dan sarana yang amat diperlukan untuk dapat menarik penanaman modal baik penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri khususnya penanaman modal non fasilitas.

5. Penanggulangan Krisis dan Prospek Kedepan

Krisis moneter yang berkepanjangan menjadi krisis ekonomi pada tingkat nasional, sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian Daerah Riau. laju pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 1996 sebesar 9,19 persen merosot menjadi 3,39 persen pada akhir tahun 1998. jumlah investasi yang semula direncanakan Rp 20. 868, miliar dengan tingkat inflasi 8,00 persen, hanya dapat direalisasi sebesar Rp15.090,90 miliar, sedangkan tingkat inflasi telah mencapai 21,62 persen. Peranan sektor industri terhadap PDRB pada tahun 1993 sebesar 26, 02 persen naik menjadi 29,17 persen pada akhir tahun 1998. sebaliknya peranan sektor pertanian sebesar 20,76 persen tahun 1993 menjadi 18,218 persen pada akhir tahun 1998.

dengan demikian terjadi perubahan yang mendasar pada struktur perekonomian Daerah Riau dari pertanian menjadi daerah semi industri.

Walaupun demikian sebagai dampak krisis ekonomi tadi telah menyebabkan turunnya jumlah produksi secara dratis, serta terganggunya distribusi dan kekurangan pangan. Pada sektor kesehatan terlihat semakin meningkatnya jumlah balita yang kekurangan gizi serta menjadi terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan karena tingginya harga obat-obatan yang diperlukan. Selain dari itu pada sektor pendidikan khususnya pada tingkat sekolah dasar, jumlah murid yang putus sekolah hampir tidak terpantau lagi karena turunnya daya beli masyarakat, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan minimal sampai kedaerah-daerah pedesaan. Dibiidang ketenagakerjaan yang menjadi masalah adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan karena terjadinya pemutusan hubungan kerja, sehingga meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Dilain pihak untuk Daerah Riau juga merupakan daerah transit tenaga kerja kewilayah negara tetangga, semakin rumitnya masalah ketenagakerjaan.

Oleh karena itu untuk Daerah Riau terutama pada masa pembangunan lima tahun kedepan, perlu diambil langkah-langkah untuk menata kembali struktur perekonomian daerah serta kembali kepada landasan perekonomiannya yaitu dengan lebih menitikberatkan kepada sektor pertanian yang akan dijadikan basis sektor industri serta memperkuat pertahanan pangan.

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang telah meluas dan membangun kembali diperlukan empat langkah strategis sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu:

a. **Tahap Penyelamatan (*Rescue*)**

Tahap penyelamat dilakukan karena kondisi perekonomian antara lain adalah:

- 1) Tingkat inflasi masih diatas 70 persen
- 2) Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing belum stabil dan masih berada ditingkat yang tinggi.
- 3) Pertumbuhan ekonomi masih rendah
- 4) Tingkat bunga bank masih diatas 40 persen sehingga tidak memungkinkan terjadinya investasi
- 5) Proses produksi barang dan jasa terhenti atau berjalan lambat sekali.
- 6) Masih terbatasnya persediaan pangan sehingga distribusinya memerlukan campur tangan pemerintah

Tahap penyelamatan ini untuk Daerah Riau berlangsung selama tahun 1998 dan 1999 dimana pertumbuhan ekonomi 3,39 persen (1997-1998) dan untuk tahun 1999 baru akan mencapai minus 2,50 persen. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang demikian itu diperlukan jumlah investasi sebesar Rp 2.684,82 miliar, dengan peranan pemerintah sebesar 35 persen. Angka tersebut diperoleh dari asumsi tingkat ICOR 4,5, tingkat inflasi sebesar 45 persen setahun.

b. **Tahap Pemulihan (*recovery*)**

Tahap ini baru akan terlaksana pada kondisi dibawah ini:

- 1) Tingkat inflasi dibawah 10 persen
- 2) Nilai tukar rupiah berkisar antara Rp 8000 sampai dengan Rp 7500 dan berada dalam keadaan relative stabil.
- 3) Pertumbuhan ekonomi masih negative, bahkan kalau mungkin pada tingkat 5,30 persen.
- 4) Tingkat bunga lebih rendah dibandingkan pada tahap penyelamatan distribusi kebutuhan pokok relative lancar karena ditunjang dengan program jaringan pengamanan sosial dan pemerintah.

Tahap ini berlangsung antara satu sampai dua tahun. Laju pertumbuhan diharapkan akan mencapai 5,30 persen. Untuk ini diperkirakan jumlah investasi sebesar Rp4.176,98 miliar.

c. Tahap Stabilitas dan Pembangunan

Hanya dapat dicapai apabila kedua tahap diatas telah dilalui dengan baik. Jika tahap-tahap tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka untuk Daerah Riau dalam lima tahun yang akan datang diharapkan dapat mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5, 76 persen. Laju pertumbuhan demikian itu, dikaitkan dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi karena Daerah Riau merupakan daerah terbuka dalam mobilitas tenaga kerja ditingkat nasional, Daerah Riau diasamping menjadi daerah transit tenaga kerja kedaerah negara tetangga, juga merupakan pusat pengembangan industri yang banyak menyerap tenaga kerja serta daerah penerima transmigrasi khususnya pada program Perkebunan Inti Rakyat. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 persen diperlukan jumlah investasi sebesar Rp 24.854,92 miliar. Jumlah investasi sebesar ini adalah 21,62 persen dari jumlah Produk Domestic Regional Bruto selama lima tahun kedepan. Perhitungan jumlah investasi didasarkan pada asumsi bahwa tingkat inflasi rata-rata 7,50 persen setahun, angka ICOR 3,75 dan laju pertumbuhan sebesar 5,76 persen.

4.1.2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Iklim usaha yang selama ini terbentuk tidak cukup kondusif untuk berkembangnya usaha ekonomi rakyat. Perusahaan-perusahaan kecil, menengah dan koperasi masih sulit mengakses ke berbagai fasilitas pengembangan yang tersedia, baik fasilitas pemodalan, teknologi maupun pemasaran. Selain dari itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memberikan perhatian pada usaha kecil, menengah dan koperasi disektor masing-masing.

Berdasarkan kondisi yang demikian itu, maka jelaslah bahwa kesempatan berusaha dan berkembang masih sangat terbatas yang menyebabkan rendahnya pendapatan mereka, yang justru menimbulkan kesenjangan pada distribusi pendapatan, serta memperlambat usaha mengentaskan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran, sehingga meningkatnya jumlah kemiskinan dan angka pengangguran yang dapat dilihat secara relative maupun absolute.

Ketimpangan relative adalah ketimpangan diantara berbagai golongan masyarakat yaitu antara 40 persen masyarakat yang berpenghasilan sedang, 20 persen masyarakat yang berpenghasilan tinggi, serta diperkuat dengan angka indek Gini. Ketimpangan relative untuk tahun 1997 dengan tahun 2000 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 4.1 : Ketimpangan Relatif Pendapatan Produk Propinsi Riau Tahun 1997-2000

Tahun	Golongan	Prosentase Pendapatan	Kriteria
1997	40 % penduduk berpenghasilan rendah menerima	17,07	<i>Moderat inequity</i>
	40 % penduduk berpenghasilan sedang menerima	42,09	
	20 % penduduk berpenghasilan tinggi menerima	40,84	
2000	40 % penduduk berpenghasilan rendah menerima	12,22	<i>Hight inequity</i>
	40 % penduduk berpenghasilan sedang menerima	35,65	
	20 % penduduk berpenghasilan tinggi menerima	52,13	

Sumber : PPSE-UNRI

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa antar tahun 1997 dengan tahun 2000 telah terjadi distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dimana 40 persen penduduk yang

berpenghasilan rendah menerima bagian yang semakin berkurang dari 17,07% turun menjadi 12,22% dari jumlah pendapatan nasional. Sebaliknya bagi 20 persen penduduk yang berpenghasilan tinggi telah menerima bagian yang semakin besar, yakni dari 40,84% naik menjadi 52,13 % dari jumlah pendapatan nasional.

Jika dilihat dari segi pendapatan perkapita, maka penduduk yang berpenghasilan rendah dengan pendapatan perkapita tahun 1997 sebesar Rp.1.163.200,83 dan pada tahun 2000 turun menjadi Rp 1.302.385, 06. untuk penduduk yang berpenghasilan sedang pendapatan perkapita pada tahun 1997 adalah Rp 2.868.123,14 dan pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp.3.799.511,19. demikian juga 20 persen penduduk yang berpenghasilan tinggi juga pendapatan perkapitanya naik dua kali lipat yaitu Rp 5.565.912,64 tahun 1997 menjadi Rp 1.111.844,79 tahun 2000.

Menyangkut dengan tingkat kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang menyangkut dengan pendapatan keluarga atau orang perorang. Jika seseorang mempunyai pendapatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan minimalnya seperti pengeluaran untuk perumahan, pakaian, makanan, pendidikan dan kebutuhan kesehatan, maka keluarga tersebut dikategorikan berada dibawah garis kemiskinan. Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 1999 sebanyak 40,6 persen dari jumlah penduduk tahun 1990. angka ini menurun sehingga mencapai 13,6 persen dari jumlah penduduk tahun 1996 dan tahun 1997 sudah mencapai 12,1 persen, tahun 1997 diperkirakan sebesar 9,6 persen. Namun pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi, krisis sosial maka terjadilah pemutusan hubungan kerja besar-besaran, sehingga tingkat kemiskinan absolute naik menjadi 45,5 persen dari jumlah penduduk tahun 1998.

Sejalan dengan semakin bertambah tingginya distribusi pendapatan diantara golongan masyarakat serta semakin meningkatnya jumlah kemiskinan absolute, maka seiring dengan itu terjadi pula peningkatan pengangguran ditengah masyarakat. Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi propinsi riau untuk tahun 2000, menyatakan jumlah penduduk Propinsi Riau tahun 2000 adalah 4.383.142 jiwa. Jumlah tenaga kerja adalah 2.292.368 orang. Dari jumlah tenaga kerja yang sedemikian itu terdapat angkatan kerja sebanyak 1.751.910 orang atau 59,97 persen dari jumlah tenaga kerja.

Jumlah angkatan kerja 1.751.910 orang yang bekerja lebih dari 30 jam perminggu hanya sebanyak 538.208 orang hanya 32,76 persen dari jumlah angkatan kerja tersebut. Data ini memberikan indikator bahwa sebanyak 1.110.881 orang angkatan kerja atau sebanyak 67,24 persen telah bekerja dibawah kapasitasnya yaitu kurang dari 35 jam per minggu, kondisi ini hampir mirip dengan angka pengangguran tersembunyi (*Disguised Unemployment*).

Selain dari itu msih terdapat sebanyak 102.821 orang yang belum bekerja atau menganggur. Dengan demikian jumlah angkatan kerja yang bekerja dibawah kapasitasnya dan jumlah yang menganggur adalah 67,24 persen ditambah dengan yang menganggur 6,26 persen adalah 72,50 persen. Angka ini sangat memenuhi tingkat produktifitas rata-rata tenaga kerja di Propinsi Riau yang tentu saja akan berpengaruh kepada pendapatan yang diterima.

Menyangkut dengan pelaku ekonomi yang tergolong kepada penduduk yang berpenghasilan rendah dan terkait dengan jumlah pengangguran pada umumnya adalah usaha kecil menengah dan koperasi. Di Propinsi Riau yang tergolong pada usaha kecil menengah dan koperasi pada tahun 1999 sebanyak 65,035 badan usaha, dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1) Industri kecil rumah tangga dll | 6.354 buah |
| 2) Pertanian rakyat | 7.418 buah |
| 3) Perdagangan kecil, informasi dll | 25.353 buah |
| 4) Pengangkutan, pelayanan rakyat | 6.123 buah |
| 5) Usaha jasa | 18.023 buah |
| 6) Koperasi | 1.764 buah |

Peranan usaha kecil menengah dan koperasi pada masa krisis ekonomi, dapat dilihat pada jumlah investasi yang telah mereka lakukan sebesar Rp.685.024, 51 juta dari usaha kecil menengah dan Rp 654.519,23 juta dari koperasi atau sebesar 21,15 persen dari total investasi sebesar Rp 6.331.280,77 juta pada tahun 1999. Peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Propinsi Riau dapat dilakukan oleh usaha kecil menengah dan koperasi dalam keadaan dimana hampir seluruh fasilitas dan kemudahan-kemudahan telah diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar atau konglomerat serta dalam keadaan yang tidak kondusif.

2. Permasalahan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran

Memperhatikan perkembangan yang terjadi selama ini didalam perekonomian daerah, disamping dampak dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan yang dapat menghambat usaha pengentasan tersebut. Permasalahan yang utama terletak pada adanya ketimpangan struktur perekonomian Daerah Riau, mencakup:

- a. Kesenjangan antar kabupaten dan kota di Propinsi Riau, pembangunan sektor industri ternyata hanya terpusat di Kota Batam dan beberapa daerah kabupaten dan kota tertentu. Kesenjangan antar sektor khususnya antara sektor industri dan sektor pertanian, pertumbuhan sektor pertanian kurang dari 1,00 persen sehingga peranan sektor pertanian terhadap PDRB turun dari 20,76 persen tahun 1993 menjadi 18,18 persen tahun 1998, pada angkatan kerja yang diserap sektor ini paling tinggi yaitu sebesar 48,09 persen. Sebaliknya sektor industri tumbuh rata-rata 9,30 persen, perennannya terhadap PDRB naik dari 26,02 persen menjadi 29,17 persen tahun 1998. Pertumbuhan sektor industri yang cukup lumayan hanya mampu menampung angkatan kerja dari 104.136 orang tahun 1997 menjadi 130.914 orang ditahun 2000 yaitu dari 7,19 persen pertahun 1997 menjasi 7,94 persen ditahun 2000.
- b. Kesenjangan antar golongan baik dalam bentuk pendapatan perorangan maupun antar pelaku ekonomi khususnya antara Bina Usaha. Hal ini ditunjukan oleh komposisi pemilikan sebagian besar asset oleh sebagian kecil kelompok usaha besar.
- c. Kemiskinan absolut. Pada tahun 1990 sebanyak 40,6 Persen penduduk berada dibawah garis kemiskinan, angka ini terus menurun yaitu tahun 1996 sebesar 13,6 persen dan tahun 1997 menjadi 12,1 persen, namun karena terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah sehingga mencapai angka 45,5 persen ditahun 1998.
- d. Masalah ketenagakerjaan, berdasarkan hasil survey sosial ekonomi tahun 2000 menunjukan bahwa 59,02 persen tenaga kerja berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah, hanya sekitar 3,21 persen yang berpendidikan akademik atau perguruan tinggi, dengan tingkat produktivitas yang rendah. Akibatnya dirasakan rendahnya daya saing, belum memiliki keahlian memadai dalam mengelolah setiap aspek usaha secara baik, karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilannya, disamping itu pada umumnya adalah lemahnya etos kerja.

3. Peluang Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran

Dalam rangkai untuk mengentaskan kemiskminan dan pengangguran adalah dengan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya serta memberdayakan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat disamping dapat memperluas dan mengembangkan usaha untuk meningkatkan produksi, juga akan membuka kesempatan kerja yang akan berpengaruh terhadap kurangnya tingkat pengangguran dan akhirnya akan mengurangi jumlah kemiskinan baik kemiskinan relative maupun kemiskinan absolut.

Dalam upaya memperbaiki tatanan struktural perekonomian daerah dan sekaligus untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran serta menekan munculnya masalah sosial akibat ketimpangan sosial ekonomi, pemerintah telah membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pemerdayaan ekonomi rakyat. Hal ini secara nyata telah diamalkan dalam Tap MPR 1998 No. XVI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangkai demokrasi ekonomi yang juga memberikan arahan yang lebih tegas tentang pemberian prioritas dan bantuan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Pemerintah akan membantu mengembangkan dan memberikan prioritas kepada usaha ekonomi lemah.
- b. Usaha kecil menengah dan koperasi akan memperoleh kesempatan utama dukungan dan perlindungan serta pengembangan.
- c. BUMN dan usaha swasta besar akan didorong untuk bermitra dengan usaha kecil menengah dan koperasi
- d. Usaha kecil menengah dan koperasi akan diberi akses terhadap pengolahan tanah, terutama di bidang pertanian termasuk kehutanan dan perkebunan.
- e. Usaha kecil menengah dan koperasi juga diberi kesempatan untuk mengakses sumber danah dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Komitmen itu juga tertuang dalam Tap MPR No XV/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang menyebutkan bertanggung jawab, transparan terbuka dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil menengah dan koprasi. Masalahnya adalah bagaimana pemerintah dalam menterjemahkan amanat MPR tersebut dalam berbagai bentuk kebijakan, baik kebijakan makro maupun sektoral, dan bagaimana cara menghindari penyalagunaan amanah tersebut untuk menghindari kepentingan politik jangka pendek dari pemerintah maupun kepentingan golongan.

4. Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Memperhatikan kondisi, perkembangan serta berbagai masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi, maka upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat khususnya yang tergabung dalam masyarakat marginal dalam bentuk usaha kecil menengah dan koperasi didalam perekonomian daerah. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi sub sitem ke ekonomi pasar, dan dari ketergantungan ke kemandirian. Perubahan struktur ini mengisyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber dana, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi, serta pemerdayaan sumber daya manusia. Sebagai implementasi dari strategi diatas, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- a. Mengupayakan peluang dan akses yang lebih besar kepada asset produksi yang paling penting adalah akses kepada sumber dana. Tersedianya injeksi dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat digunakan untuk memupukkan modal secara berkesinambungan.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat sebagai prosedur dan penjual, posisi dan kekuatan dalam perekonomian sangat lemah, dalam persaingan yang tidak seimbang keuntungan akan jatuh pada usaha besar. Keadaan ini harus diperbaiki, untuk itu pertama-tama rakyat harus dibantu dengan prasarana dan sarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya. Selain dari itu yang tidak kala pentingnya adalah memperkuat pola transaksi dan kemitraan usaha kecil menengah dan koperasi dengan pendekatan kebersamaan melalui wadah koperasi. Dengan membangun

kesetiakawanan dan rasa kebersamaan akan menimbulkan kepercayaan dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.

- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Kebijakan pembangunan industri haruslah mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri kecil menengah, yang kuat haruslah menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Proses industrialisasi haruslah mengarah keperdesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agroindustri
- e. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
- f. Pemerataan pembangunan antar kabupaten dan kota mengingat kegiatan ekonomi rakyat tersebar diseluruh wilayah Propinsi Riau.

4.1.3. Penanggulangan Konflik Sosial dan Kerusuhan Masa.

Krisis ekonomi dan krisis politik juga telah menimbulkan dampak negatif pada aspek-aspek kehidupan social lainnya, seperti sistem hukum, system pertahanan keamanan serta system social budaya. Krisis ini bukan saja telah menimbulkan ketegangan dan kerusuhan social, krisis yang sama juga telah mulai menimbulkan krisis kepemimpinan nasional yang mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat luas dan merusak jalinan hubungan sosial serta kesatuan maupun keutuhan bangsa dan negara.

Keterhasilan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menimbulkan kesenjangan antar daerah kota/kabupaten. Kesenjangan dan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang cukup tajam, yang disebabkan oleh karena perbedaan dalam penyediaan fasilitas pelayanan social dan pelayanan umum.

Pergeseran nilai-nilai social budaya sudah dimiliki jauh terjadi dan tingginya biaya hidup, telah menyebabkan persaingan hidup yang semakin berat, sehingga secara makro telah melahirkan sikap individualisme dan falsafah hidup yang materialistis dalam rangka untuk tetap bisa survive. Kondisi ini semakin diperberat lagi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga berkembang kesegala aspek kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan social budaya, telah mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan kurang ditetapkan pada strata yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Kasus-kasus kriminalitas dalam berbagai jenis, kuantitas, dan kualitasnya setiap hari menghiyati halaman surat kabar daerah, ini bisa menjadi cermin betapa kerasnya kehidupan saat ini.

Dari aspek kesejahteraan social lainnya yang cukup menonjol berkembang adalah masalah gelandangan dan pengemis yang juga tumbuh menjamur dan sampai saat sekarang belum mampu diatasi secara tuntas oleh aparat terkait, aktifitas usaha informal yang kurang tertata dan terbina dengan baik, tuna karya dan tuna wisma yang berkeliaran, berkembangnya kegiatan-kegiatan prostitusi, serta semakin tingginya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum. Hal ini disamping ikut mengurangi keindahan juga menimbulkan citra negatif terhadap budaya masyarakat.

Pluralitas budaya yang ada dalam masyarakat, telah pula ikut mewarnai dinamika dan sekaligus permasalahan yang semakin kompleks. Demikian pula terhadap perilaku yang sudah tidak menghormati hukum dan menjunjung tinggi hukum. Ketimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit social lainnya makin menggejala disamping kurangnya rasa peduli dan kesetiakawanan social masyarakat, serta sudah semakin berkurangnya tokoh baik formal maupun informal yang dapat dijadikan panutan dan teladan dalam berbagai hal.

Upaya pengendalian stabilisasi dan pemulihan kembali kegiatan perekonomian memerlukan stabilitas social. Pada gilirannya, pemulihan kembali stabilitas social memerlukan pembaharuan system social atau repormasi berdasarkan kontrak social. Kontrak social baru itu hendaknya didasarkan pada tuntutan masyarakat yang marak dalam era repormasi dewasa ini. Kontrak social yang baru hendaknya dapat mewujudkan demokrasi politik berdasarkan perwakilan yang sebenarnya serta menjamin partisipasi aktif seluruh warga. Secara eksplisit system social baru itu harus dapat mengakui dan menjamin le bhinnekaan yang terdiri atas berbagai ras, suku, agama dan adat istiadatnya sendiri-sendiri. Sisten social baru itupun harus dapat mengoreksi distorsi serta kosentrasi kekuasaan pilitik dan ekonomi guna menjamin adanya kesamaan hak politik warga negara otonomi, daerah serta pemerataan ekonomi. Pendak kata kontrak social yang baru itu harus dapat mengikut sertakan dan memobilisir potensi seluruh lapisan masyarakat serta menjamin keadilan maupun pemerataan dibidang politik, ekonomi, dan social budaya. Adapun kebijakan untuk meminimalisasikan konflik social dan kerusuan massa dapat ditempuh dengan:

1. Peningkatan dan pelaksanaan proses integrasi bangsa baik vertikal maupun horizontal, naik dimensi public, social budaya dan ekonomi.
2. Peningkatan peran dan fungsi partai-partai politik sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat.
3. Melibatkan dan meningkatkan peran dan fungsi elit-elit strategi yang telibat dalam masyarakat
4. Melibatkan dan meningkatkan peran serta fungsi organisasi masyarakat.
5. Meningkatkan peran dan fungsi BAKON PKB.

4.1.4. Penegakan Hukum

Kondisi wilayah dan geografis Propinsi Riau sedemikian rupa, merupakan suatu tantangan sekaligus membuka peluang untuk memepersiapkan perencanaan pembangunan dalam arti yang seluas-seluasnya meliputi segala segi dari pada kehidupan masyarakat dengan melibatkan semua unsur dan potensi yang ada, baik dari dalam maupun dari luar sekaligus mempertahankan hasil pembangunan.

Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan bagi masyarakat dan Daerah Propinsi Riau. Dari sekian banyak permasalahan yang harus dihadapi pemerintah Propinsi dalam era otonomi, salah satunya dikatakan oleh Gubernur Riau adalah masalah pertanahan. Permasalahan ini terjadi akibat pengelolaan pertanahan telah menyimpang dari jiwa semangat Undang-Undang pertanahan dan agrarian (Pengelolaan tanah menyimpang, Riau pos, 5 oktober 2000).

Selanjutnya dikatakan oleh gubenu, akibat dari penyimpangan tersebut juga menyebabkan kebijakan pertanahan masih belum mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukun hak atas tanah bagi sebahagian besar masyarakat, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan pertanahan dimasa lalu, dapat dilihat dari banyaknya masalah dan kasus yang ditimbulkan bahkan diikuti dengan aksi unjuk rasa di berbagai tempat. Karena kompleksnya permasalahan pertanahan yang sedang dihadapi, Gubernur Riau mengajak aparat yang terkait untuk memperbaharui sikap dan komitmen dalam mensukseskan tugas dan fungsi pertanahan, terutama terhadap pelayanan masyarakat.

Hal ini mencerminkan bahwa persoalan tahan harus dikembalikan kepada ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jo pasal 6 UU No 5 Tahun 1990 yang mana pada prinsipnya tanah harus mempunyai fungsi social sekaligus mampu mewujudkan kesejahteraan. Yang menjadi masalah dalam perkembangan pertanahan akhir-akhir in adalah tingginya tingkat

kebutuhan akan tanah dalam proses pembangunan yang berakibat fungsi tanah yang seharusnya bertujuan social beralih pada orientasi komersial dan infestasi. Justru itu dalam masalah pertanahan harus dilakukan reorganisasi reorientasi secara nasional, khususnya di Propinsi Riau. Adalah benar dikatakan gubenur bahwa kesadaran politik rakyat yang semakin tinggi, menuntut transparansi pengelolaan manajemen pemerintahan dan peningkatan pengawasan.

Begitu pula masalah lain yang harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Propinsi Riau dengan seluruh jajarannya, adalah menghadapi berkembangnya musuh bangsa yang dikenal dengan istilah penyakit masyarakat (PEKAT) yaitu narkoba, judi, miras, WTS dan lain-lain. Secara kenyataan pekat benar-benar berkembang dan dapat merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi mudah, dan ironisnya pengedar dan pemakai pekat masih berkembang sedemikian rupa seolah-olah tidak terjangkau oleh aturan dan institusi hukum. Karena itu sangatlah tepat dikembangkannya istilah RIAN (Riau Anti Narkoba) dengan harapan istilah itu harus mampu dibuktikan untuk mencegah dan berkembangnya pekat sekaligus semua instansi pemerintah dan penegak hukum benar-benar mampu membangun kordinasi untuk melakukan pencegahan dan tindakan terhadap pekat secara konsisten.

Dengan demikian maka keadaan dan berbagai masalah pokok yang dihadapi dalam bidang hukum adalah sebagai berikut;

1. Hukum sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh mencakup segenap bidang pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum dikaitkan secara langsung dengan berbagai kebijaksanaan disegenap bidang pembangunan, agar kerangkah hukumnya dapat dimantapkan sebagai pemberi patokan serta pengarahan selanjutnya bagi pembangunan ekonomi dan perkembangan social budaya. Proses pemantapan itu sendiri perlu ditingkatkan supaya dapat lebih mengimbangi pesatnya perkembangan masyarakat dan pembangunan itu sendiri.
2. Hukum sebagai alat penegak ketertiban perlu lebih ditingkatkan karena tanpa ketertiban dan kepastian, kehidupan masyarakat yang teratur tidak mungkin terselenggara. Ketertiban umum merupakan prasyarat bagi segala usaha dan kegiatan masyarakat. Karena itu pemeliharannya perlu diutamakan. Landasan yang mantap perlu diletakan diberbagai institusi yang berfungsi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pemberantasan kejahatan.
3. Hukum sebagai pemberi keadilan memerlukan pembinaan peradilan yang tetap dan untuk menyelenggarakan hal tersebut semata-mata untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pencari keadilan dalam negara hukum. Hal ini sesuai dengan cita-cita hukum masyarakat antara lain pelaksanaan peradilan harus menggunakan azas cepat, sederhana dan biaya murah. Hal ini bertalihan pula dengan keyakinan bahwa hukum itu berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat tanpa membedakan derajat dan kedudukan (Azas victie).
4. Khusus dalam pelaksanaan keputusan pidana, masalah pokok ialah untuk lebih mengembangkan suatu system pemasyarakatan yang bersifat mendidik dan lebih berperikemanusiaan.
5. Permasalahan dalam menyelenggarakan administrasi urusan hukum guna kepentingan umum terletak pada bidang perizinan dan pengawasan yang proses pelaksanaannya akan memerlukan penyempurnaan dan penyederhanaan. Dalam usaha ini perlu sekaligus dihilangkan hambatan sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan kedudukan dalam hukum.

Permasalahan tersebut diatas secara kenyataan bersifat nasional dan hal ini harus segera dilakukan perbaikan disegalah bidang untuk melakukan dan menciptakan ketertibab masyarakat dan proses penegakan hukum.

4.1.5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Keaneka ragaman kondisi masyarakat dan potensi wilayah selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah agar hal-hal tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal sesuai dengan kemampuan dan kelembagaan yang mendukungnya. Kesadaran tersebut menajai kekuatan pendaoronnng dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional, pada hakekatnya adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang handal dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelolah sumber daya daerah secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunsn daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan desentralisasi pengaturan sumberdaya adminitrasi dengan mempertimbangkan penerapan pemerintah ayng baik dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Disampingn itu, pembangunan daerah juga merupoakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk memperluas pilihan bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan social-ekonominya dengan baik dan maju.

Upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah merupakan salah satu agenda pembangunan yang integral dengan upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, meningkatkan kehidupan demokrasi, mewujudkan supermasi hukum dan pemerintahan yang baik, mempercepat pemulihan ekonomi dan memeperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya masyarakat.

Ketidak tanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, ketidak larasan antara kebijakan dan praktek pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan penyebab adanya krisis ekonomi dan politik, melemahnya kemampuan pemerintah daerah melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, ketidak merataan pertumbuhan ekonomi di daerah dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses pertumbuhan social bagi peningkatan kesejahteraan di berbagai daerah.

Pelaksanaan pembangunan selama ini lebih menekankan kepada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat sehingga pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan lepada masyarakat secara optimal. Hal tersebut ditunjukan dari meningkatnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan orientasi kepertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah lebih kepada pemerintah pusat dari pada ke masyarakat. Sebagai akibat input pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat diberbagai daerah tidak dapat memberikan hasil secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat.

Kapasitas Pemerintah Daerah yang tidak optimal ini disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dan dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang rinci dan kaku. Hal tersebut diperparah oleh adanya keenggangan beberapa instansi pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangan, penyerahan tugas dan fungsi pelayanan dan pengaturan perijinan, serta pengolahan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah. Kuatnya kendali pemerintah pusat yang semakin tinggi terhadap pemerintah daerah pada waktu yang lalu telah menyebabkan pula hilangnya motivasi, inivasi, dan kreativitas aparat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi tanggung jawabnya. Berbagai upaya telah dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan otonomi daerah, pendelegasian

wewenang, pengambilan keputusan, dan alokasi dana pembangunan kepada pemerintah daerah, serta disertai dengan desentralisasi pengaturan dan perjanjian.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, tentu saja akan terjadi berbagai perubahan didalam pemerintahan propinsi riau, terutama yang menyangkut Pemerintah Daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta timbulnya berbagai gejolak dan dinamika social budaya, politik, ekonomi dan hukum serta birokrasi pemerintah daerah. Perubahan tersebut menempatkan kewenangan Pemerintah Daerah yang luas dan kekuasaan yang besar untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan kemampuan dan dukungan sumber daya manusianya sekaligus merupakan tantangan, kendala dan peluang untuk mebangun Propinsi Riau disegala aspek kehidupan masyarakat yang didukung dengan mewujudkan supermasi hukum dan pemerintahan yang bersih. Besarnya tantangan, kendala dan peluang yang dihadapi Pemerintah Daerah Propinsi Riau kedepan tentu saja harus dilakukan persiapan yang matang, karena itu sangatlah beralasan dalam menghadapi perspektif global dan kompetitif perlu suatu penjabaran yang telah dirumuskan sebagai konsep **“Strategi Riau Menuju Era Baru”** sebagai komitmen pembangunan daerah, secara konseptual telah dituangkan kedalam **“Lima Pilar Utama Pemacu Pembangunan Daerah”** yaitu:

1. Pembangunan dalam rangkai meningkatkan iman dan taqwa.
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
4. Pembangunan kesehatan dan olahraga.
5. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Melalui kelima pilar tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Riau secara adil dan merata. Tantangan dan kendala untuk memanfaatkan peluang pembangunan daerah dan masyarakat Riau tidak lepas dari permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat birokrasi pemerintah daerah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan dan pengaruh kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penegakan hukum Pemerintah Daerah Propinsi Riau harus berjalan dengan baik untuk mendukung program pembangunan daerah sekaligus mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Karena itu pembangunan di Propinsi Riau disegala bidang aspek kehidupan masyarakat akan berhasil dengan baik, apabila terwujudnya supermasi hukum dan pemerintahan yang bersih disamping perlu ditingkatkan peran aktif sekaligus diberdayakan DPRD untuk mengisi otonomi daerah sesuai dengan hak dan kewajiban serta memberdayakan masyarakat (*empowerment*), secara bersama-sama membangun Propinsi Riau sesuai dengan Lima Pilar Utama Pemacu Pembangunan Propinsi Riau.

Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah Propinsi Riau harus melakukan persiapan melaksanakan otonomi daerah disegala bidang dengan meningkatkan kapasitas daerah sehingga terselenggara pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, mengembangkan potensi wilayah secara terencana dan profesional serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan, terutama menyiapkan strategi pembangunan daerah untuk menarik dan mengembangkan investasi local, regional, nasional dan internasional di Propinsi Riau.

4.2. Perencanaan Program Pembangunan Daerah

4.2.1. Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Iman dan Taqwa.

1. Kondisi Umum

Propinsi Riau mempunyai penduduk yang berlatar belakang sosial budaya, bahasa dan agama yang berbeda. Meskipun demikian, dari segi agama, perbedaan itu hanya berdasarkan jumlah agama yang dibenarkan oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan berkembangnya aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keberagaman agama merupakan nikmat dari Tuhan Yang Maha kuasa. Namun, kekayaan itu dapat juga berubah menjadi sumber malapetaka bagi pemeluk-pemeluknya yang tidak memahami keberadaan dan keberagaman agama. Agama dapat saja menjadi penyebab kerusuhan antar umat jika pemeluk-pemeluknya tidak dibina dan dibimbing dengan baik.

Agama seharusnya menjadi landasi bagi pemeluk-pemeluknya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbudaya, bahkan berbangsa dan bernegara. Namun, fenomena yang muncul, agama seolah-olah hanya dijadikan landasan beribadah untuk menuju ke kehidupan yang kekal diakhirat, dan hal ini pun belum memperhatikan tingginya keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Agama seolah-olah tidak dapat digunakan untuk menta kehidupan manusia alam berbagai aspek sehingga berbagai penyakit masyarakat, seperti korupsi, kriminalitas, penyalagunaan obat-obatan terlarang, dan perilaku menyimpang yang melanggar moralitas, etika, dan kepatutan, masih sering terjadi. Hal ini merupakan gambaran dari terjadinya kesenjangan antar perilaku formal keagamaan dengan perilaku kehidupan keseharian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Kebijakan Pembangunan

Tujuan pembangunan agama adalah meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pergaulan antar umat beragama serta memantapkan rasa persaudaraan dukaungan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai sehingga pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan tercapainya keselarasan antar umat beragama akan mempersulit masuknya pengaruh yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), sehingga masyarakat akan merasa aman dalam menjalankan peribadahnya.

Sejalan dengan tujuan diatas, arah kebijakan pembangunan agama ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan penghayatan/ pelaksanaan ajaran agama.
- b. Membina dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
- c. Membina partisipasi antar umat beragama dalam menciptakan persatuan dan kesatuan.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan kehidupan beragama dan penyempurnaan kualitas pelayanan haji.
- e. Meningkatkan mutu pelayanan agama melalui profesionalisme aparat serta sarana dan prasarana.

3. Program Pembangunan

Untuk melaksanakan pembangunan keagamaan di Propinsi Riau, perlu diperhatikan program-program sebagai berikut:

- a. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kehidupan beragama.

- b. Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, serta kerukunan hidup umat beragama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dan memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup beragama serta meembangun harmoni social dan persatuan.
- c. Program penerangan bimbingan dan kerukunan hidup beragama agar dapat terwujudnya suasana yang damai, tenang, tertib, rukun dan saling menghormati serta menghargai diantara sesama umat beragama.
- d. Program pengembangan kualitas kegiatan keagamaan dan masyarakat agar semakin meningkatnya dan berkembangnya rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Program peningkatan sarana kehidupan beragama.
- f. Program bimbingan dan penyuluhan keagamaan.
- g. Program pembinaan kerukunan umat beragama guna mengapresisikan kebijakan tentang kerukunan umat beragama, pembinaan seni budaya keagamaan.
- h. Program peningkatan kualitas pendidikan agama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi luhur.
- i. Program pembinaan lembaga-lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan guna memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas peran serta lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia seutuhnya.

4.2.2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2.2.1. Pendidikan

1. Kondisi Umum

Pada tahun ajaran 2000/2001, jumlah murid SD/MI negeri dan swasta adalah 731.420 orang. Angka Partisipasi Kasar (APM) adalah 110,35 % dan angka partisipasi murni adalah 94,25 %. Jumlah ruang belajar adalah 19.595 ruang dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 26.714. jumlah ruang ini tidak dapat menampung seluruh murid sehingga harus dilakukan double shift sebanyak 7.119 shift.

Jumlah guru sebanyak 28.066 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah murid, rasio guru dan murid adalah 1:26. angka ini menunjukkan bahwa satu orang guru menanganinya 26 orang murid. Rasio ini masih tergolong baik. Jika dilihat dari jumlah guru itu, terdapat 25.152 (89,62%) orang guru layak mengajar, 2.914 (10,38%) orang guru semi layak mengajar, dan 1.718 (1,53%) orang guru yang tidak layak mengajar.

Pada jenjang SLTP dan MTs, AKP-nya adalah 76,34% dan APM-nya adalah 61,00%. Jumlah murid kedua sekolah jenis ini adalah 253.680 orang yang tertampung dalam 499 sekolah. Untuk menampung murid-murid tersebut disediakan 4.886 ruang belajar. Rombongan belajar sebanyak 5.411 rombongan sehingga ruang belajar tersebut belum sanggup menampung satu shift. Untuk menangani hal ini, dilakukan double shift sebanyak 525 shift.

Jumlah guru yang mengajar di SLTP dan MTs adalah 12.917 orang. Dalam jumlah ini terdapat 5.978 (59,78%) orang guru yang layak mengajar, 2.731 (22,21%) orang guru yang semi layak mengajar, dan 3.107 (23,68%) guru yang tidak layak mengajar. Rasio guru dan murid adalah 1:20., rasio ini tergolong sangat baik karena satu orang guru hanya menangani 20 murid.

Pada tingkat SMU/SMK/MA, AKP-nya hanya 39,98% dan APM-nya hanya 30,50 %. Angka AKP dan APM ini tergolong rendah karena hanya 30,50 % remaja usia 16-18 tahun yang bersekolah. Dengan kata lain, 60,50 % remaja usia 16-18 tahun tidak dapat mengenyang pendidikan SMU/SMK/MA. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi

pengembangan pendidikan Riau karena dapat diprediksikan bahwa tenaga kerja yang akan datang lebih banyak yang berijazah SLTP. Kondisi ini yang juga dapat menjadi kendala dalam menghadapi dunia kerja adalah siswa SMU lebih besar dibandingkan dengan jumlah murid SMK, yaitu 3;1 atau 122.621 ; 37.255 murid. Perbandingan ini bermakna bahwa masih rendah minat siswa-siswa untuk memasuki SMK. Dampak lain yang mungkin timbul adalah tidak terisnya lowongan kerja yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil yang berijazah SMK.

Dilihat dari kualitas guru, yang layak mengajar hanya 13,79%, yang semilayak mengajar 69,15% dan tidak layak 17,06%(Dinas diknas, 2001). Pada saat ini, Riau masih memiliki sejumlah guru yang berkualitas tidak sesuai lagi dengan tingkat pendidikan tempat dia melakukan proses belajar mengajar. Untuk tingkat SD, jumlah guru adalah 28;260 orang. Dari jumlah ini, 235 orang (0,83%) berijazah SMTP non keguruan, 1.712 orang (6,06%) berijazah SMTA nonkeguruan, 17.486 orang (61,88%) berijazah SMTS keguruan, 7.334 orang (25,95%) berijazah PGSD/DII, 408 orang (1,44%) berijazah sarjana muda, 1.076 orang (3,81%) berijazah S1 dan 9 orang (0,03%) berijazah S2 (Dinas Depdikbud Tk.I, 1999). Guru yang S2 ini tidak mengajar lagi di SD karena tenaganya diperlukan di kantor, seperti di kantor dinas dan kanwil.

Kesempatan memperoleh pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan perlu juga diperhatikan. Berdasarkan data susenas 1997, penduduk perempuan lebih kecil jumlahnya memperoleh pendidikan. Jumlah penduduk perempuan yang tidak sekolah dan tidak atau belum tamat SD pun jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Berikut disajikan table yang memuat perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan usia 10 tahun keatas menurut pendidikan.

Table 4.1: Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Usia 10 Tahun Keatas, Menurut Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Tidak/belum pernah sekolah	41.444	93.334	134.778	3.90
2	Tidak/belum tamat SD	439.974	473.554	913.528	26.48
3	SD/MI	545.004	542.392	1.087.396	31.50
4	SLTP	323.734	299.676	623.410	18.06
5	SMU	247.565	199.081	446.646	12.94
6	SMK	85.491	59.143	144.634	4.19
7	Diploma I dan II	8.075	9.652	17.727	0.51
8	Akademi/Diploma III	16.944	15.102	32.046	0.93
9	Universitas/Strata I	30.799	20.661	51.460	1.49
Jumlah		1.739.030	1.712.595	3.451.625	100

Sumber : BPS Propinsi Riau : Susenas 2000.

Berdasarkan kondisi umum diatas, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pendidikan di Propinsi Riau adalah;

- Pembinaan pendidikan usia dini
- Pembinaan sekolah dasar
- Pembinaan sekolah luar biasa
- Pembinaan sekolah lanjutan tingkat pertama
- Pembinaan sekolah lanjutan menengah umum
- Pembinaan sekolah kejuruan
- Pembinaan pendidikan tinggi
- Pembinaan pendidikan luar sekolah
- Peningkatan pembinaan aktivitas kebudayaan melayu.

2. Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Riau didasarkan pada kondisi umum dan permasalahan pendidikan yang dihadapi Riau pada saat ini. Arah kebijakan itu adalah:

- a. Mengupayakan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan usia dini
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Melakukan pembaharuan dan pengembangan kurikulum muatan local, yang lebih menekankan pada pendidikan keilmuan yang bernuansa religius.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan dalam dan luar sekolah sebagai pusat kegiatan belajar
- e. Melakukan pemantapan pembinaan pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, keilmuan dan manajemen.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan.
- g. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai agama dan kebudayaan Melayu.
- h. Meningkatkan dan membantu pelaksanaan pendidikan tinggi.
- i. Meningkatkan hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri serta menggalakan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

3. Program Pembangunan

Program pendidikan dan kegiatan daerah Propinsi Riau disusun sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Dasar, Sekolah Luar Biasa dan Prasekolah, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan daya tampung sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat, meningkatkan kesamaan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan terselenggaranya manajemen pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat.
- b. Program pendidikan menengah dan kejuruan, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan daya tampung, kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi sumber daya pendidikan, keadilan dalam pembiayaan, efektifitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Program pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk melakukan penataan sistem pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas dan revansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
- d. Program pembinaan pendidikan non formal dan luar sekolah, perpustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk menyediakan pelayanan pada masyarakat yang tidak atau belum memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, dan memberikan keterampilan berusaha secara profesional.
- e. Program perencanaan dan pengawasan jaringan kerjasama pendidikan dan pengembangan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
- f. Program penelitian, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Program peningkatan kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi
- h. Program pembinaan pengembangan pendidikan dan kurikulum
- i. Program pembinaan perpustakaan dan bahasa
- j. Program peningkatan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha

- k. Program pengadaan dan peningkatan alat pendidikan
- l. Program pengadaan tenaga dan peningkatan kualitas guru

4.2.2.2. Tenaga Kerja.

1. Kondisi Umum

Masalah tenaga kerja di Riau merupakan masalah yang rumit dan belum terpecahkan. Bahkan perusahaan industri besar yang berdiri di Riau, tetapi tidak dapat diisi oleh tenaga kerja Riau sehingga penduduk masih banyak yang menganggur (12,46%).

Sejalan dengan pertumbuhan industri di Riau, banyak migrasi tenaga kerja yang datang ke Riau. kondisi ini secara tidak langsung merebut peluang kerja penduduk local. Apalagi ada kesan bahwa penduduk local tidak mampu bersaing karena kurang memiliki kompetensi, profesionalisme, dan budaya kerja yang kurang bagus.

Faktor lain juga menjadi penghambat penyerapan tenaga kerja local adalah tingginya persaingan kerja, terutama pekerjaan dalam bentuk kerja sama, seperti IMS-GT dan IMT-GT. Persaingan terjadi tidak saja berasal dari dalam negeri, tetapi juga berasal dari luar negeri. Hal ini terjadi karena Riau berbatasan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Kondisi seperti diatas dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang mengarah kepada konflik horizontal antara penduduk local dan pendatang. Masalah lain yang juga selalu muncul adalah upah yang selalu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi tenaga kerja.

2. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan bidang ketenaga kerjaan adalah :

- a. Penyusunan rencana tenaga kerja tingkat Propinsi dan Kabupaten.
- b. Penyusunan dan pengembangan system informasi pasar kerja, serta pengembangan bursa kerja awasta melalui *on line system*.
- c. Perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja local.
- d. Pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya pelatihan.
- e. Pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- f. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja keluar negeri.
- g. Penataan kembali hubungan industrial dan kebebasan berserikat.
- h. Perlindungan dan pengawasan norma ketenagakerjaan.
- i. Penyempurnaan system pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

3. Program Pembangunan.

- a. Program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja
- b. Program pembinaan, pengembangan peningkatan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja, yang dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- c. Program pengembangan fasilitas pelatihan dan perlindungan, yang dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja maupun untuk meningkatkan pendidikan tenaga andal sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- d. Program pengawasan tenaga kerja, dengan maksud untuk memberikan pengawasan tenaga kerja agar dipelakuakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Program pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja.
- f. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
- g. Program pembinaan tenaga kerja terdidik
- h. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.
- i. Program penyusunan dan penerapan system pengupahan tenaga kerja.
- j. Program peningkatan kesejahteraan kerja dan purna kerja.

4.2.2.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Kondisi Umum

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tumpuan untuk mencapai kemajuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. ini berarti ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat lajunya pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia,. Baik melalui pendidikan formal dan informal, serta pendidikan dan pelatihan, akan meningkatkan produktivitas pembangunan.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan untuk memajukan tingkat kecerdasan masyarakat, mengembangkan kemampuan bangsa serta ikut serta mendorong proses pembaharuan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, persaingan antar bangsa yang semakin ketat, serta dampak arus globalisasi yang semakin luas, menuntut pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih tepat, cepat dan cermat serta bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.

Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan berbarengan dengan peningkatan dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK, diterapkan dalam kegiatan industri, perdagangan, jasa, pariwisata dan bidang-bidang pembangunan lainnya, akan menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, yang siap menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas ASEAN tahun 2003, menarik manfaat dari perdagangan besar anggota negara-negara maju tahun 2010 dan siap bersaing pada perdagangan anggota negara-negara dikawasan Asia Pasifik pada tahun 2020.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Mengoptimalkan pengembangan system informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan kebijakan dan pembangunan daerah secara tepat, cepat, dan akurat.
- b. Mengoptimalkan pengembangan data dan statistik bagi perencanaan kebijakan pembangunan daerah.
- c. Mengembangkan nilai-nilai positif budaya Melayu dalam menghadapi tantangan pembangunan di Propinsi Riau dimasa yang akan datang.
- d. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, dan menengahserta koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis local.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan system informasi agar mudah diakses untuk kepentingan perumusan perencanaan kebijakan dan lebih membuka akses Propinsi Riau
- b. Program survey dan pemetaan dalam akurasi data-data dan informasi lapangan tentang kondisi fisik wilayah Propinsi Riau yang telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat
- c. Program pengembangan data dan statistic yang lebih mengarah pada upaya pemuktahiran data dan informasi tentang Propinsi Riau secara keseluruhan dari berbagai aspek.
- d. Program pengembangan telekomunikasi, multimedia dan informatika (TELEMATIKA) yang bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang tersebut guna mempermudah akses keluar maupun kedalam untuk pengembangan potensi sumber daya yang ada di Propinsi Riau.

- e. Program penelitian dan pengembangan (research dan development) dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebudayaan Melayu yang berperan sebagai penggerak kemajuan dan perkembangan Propinsi Riau pada masa datang.
- f. Program peningkatan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK yang disejalankan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama untuk perwujudan, percepatan pembangunan daerah dan kemajuan IPTEK itu sendiri.
- g. Program penyebarluasan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang bertujuan untuk peningkatan upaya pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat secara luas.
- h. Program penguatan dan pendalaman struktur industri yang akan mampu mempercepat proses industrialisasi yang akan dapat dijadikan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian disamping sector-sektor ekonomi lainnya yang berbasis kerakyatan.
- i. Program pengembangan jaringan system informasi teknologi dan manajemen IPTEK agar mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
- j. Program pemberdayaan kelembagaan IPTEK agar mampu berperan sebagai wadah pengkaji dan pengembangan IPTEK yang dapat diandalkan.

4.2.2.4. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja

1. Kondisi Umum

Pembangunan sumberdaya manusia mencakup pada pengembangan sumber daya insan wanita, anak dan remaja sebagai sumber daya sekaligus subjek pembangunan. Peningkatan kualitas sumberdaya wanita, anak dan remaja sangat berpengaruh terhadap upaya pembinaan unsur masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Sejalan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan di daerah Riau agar terciptanya komunitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri, tentram, sejahtera lahir dan bathin.

Optimalisasi penduduk sebagai sumberdaya pembangunan harus diimbangi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan pilihan atas peran mereka dalam pembangunan.

Berbagai upaya pembangunan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan telah dilakukan, namun masih dijumpai berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal peluang dan akses terhadap sumber daya pembangunan, control atas pembangunan, serta memperoleh manfaat atas hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan ini merupakan masalah struktural yang sudah lama ada dan berkembang dalam masyarakat, dan terutama disebabkan oleh nilai-nilai sosial budaya. Beberapa permasalahan dan ketimpangan tersebut antara lain adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pendidikan, yang memberikan dampak pada kesulitan bersaing dalam pasar kerja. Kesehatan dan masalah gizi juga masih memprihatinkan dengan adanya kondisi krisis yang berkepanjangan, yang disebabkan oleh adanya nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat yang kurang kondusif terhadap pola hidup sehat, kesadaran akan perlunya pemeriksaan kesehatan yang teratur, dan prasarana dan sarana kesehatan yang terbatas dan belum merata.

Permasalahan ini adalah masalah pelaksanaan program keluarga berencana yang masih perlu mendapatkan perhatian, karena masih menekankan pada kepentingan pemerintah, yaitu untuk mengendalikan penduduk dan bukan untuk pengaturan kelahiran demi kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Disamping itu dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perempuan masih belum banyak dilibatkan dalam setiap tahap dan proses pembangunan, terutama perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam mengatasi masalah-masalah sebagaimana diatas, peran pemerintah bersama dengan masyarakat sipil dan lembag-lembaga yang ada didalam masyarakat, terutama lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan sangat pesat untuk pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian maka tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah permasalahan structural yang terutama disebabkan oleh karena nilai-nilai budaya tradisional yang berkembang dalam system sosisl dan berlaku pada berbagai tingkatan masyarakat, menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan peran yang berbeda-beda.serta masih banyaknya kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang belum peka jender yaitu; belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara perempuan dan laki-laki serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan jender sebagai sarana akhir pembangunan.

Sejalan dengan pemberdayaan perempuan, peranan anak dan remaja sebagai kader dan penerus cita-cita perjuangan bangsa sangat menentukan yang tercermin dalam sikap dan kepeloporannya dalam berbuat dan bertindak laku.segala permasalahan anak dan remaja yang muncul dewasa ini relatif mudah diatasi apabila mereka dibekalkan dengan berbagai disiplin ilmu dan kursus-kursus yang sifatnya positif. Dengan wadah pembekalan yang sedini mungkin akan terciptanya suatu tatanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang mandiri, kreatif, inovatif, dan tanggap akan setiap permasalahan yang mengganggu mental anak dan remaja.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Meningkatkan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan serta peran aktif wanita, anak dan remaja dalam pembangunan
- b. Mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, sejahtera dan bahagia dalam masyarakat.
- c. Peningkatan kesadaran dan kepekaan jender, mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan jender, dan perilaku jender untuk seluruh instansi/lembaga politik dan hukum.
- d. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW)
- e. Pengembangan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja
- b. Program peningkatan dan kemandirian perempuan
- c. Program peningkatan kesetaraan perempuan (gender)
- d. Program perlindungan tenaga kerja perempuan
- e. Program perwujudan keluarga sehat, beriman dan bertaqwa.

4.2.2.5. Pemuda

1. Kondisi Umum

Pengembangan kepemudaan dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kekuatan fisik, daya nalar, keterampilan kerja, kreatifitas, kecerdasan, kemandirian berwiraswata, dan peningkatan serta berkemampuan dalam memanfaatkan, membangkitkan, dan menuasai IPTEK. Pengembangan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pemuda sebagai insan, pelopor dan penggerak pembangunan, serta sebagai sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Kepeloporan dan keperintisan pemuda sebagai pelopor penggerak pembangunan yang didorong dengan pemilihan pemuda pelopor ditingkat daerah, dengan menempatkan Sarjana Sebagai Pelopor Dan Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3), dan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST). Pembinaan pemuda sebagai kader pemimpin dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi kader dan motivator pembangunan yang berasal dari kalangan organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), karang taruna, pramuka, dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), organisasi kemahasiswaan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, pemuda dan organisasi permasyarakatan lainnya.

Kaderisasi pemuda dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara telah diwujudkan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan berkembangnya sikap kritis kalangan pemuda dalam kehidupan politik.

Keterampilan pemuda ditingkatkan melalui pelatihan yang dilaksanakan dibalai latihan kerja serta melalui system magang pada berbagai perusahaan, dan pengembangan kewiraswastaan dikalangan pemuda dari golongan ekonomi lemah. Melalui pembinaan tersebut telah berhasil dikembangkan keterampilan kerja, kreativitas, keahlian dan jiwa kewirausahaan sehingga mampu meraih peluang dan berperan secara produktif dalam pembangunan di Propinsi Riau.

Maraknya permasalahan yang selama ini banyak dilakukan oleh pemuda tentunya tidak luput dari perhatian pemerintah daerah Propinsi Riau sendiri, dimana tempat-tempat kegiatan seperti olahraga, pramuka, sanggar/wadah untuk berorganisasi maupun balai kegiatan telah berubah fungsi atau hilang. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pusat kegiatan tersebut menyebabkan pemuda berpindah kearah yang semestinya tidak dilakukannya seperti penyalagunaan narkoba, alat terlarang, zat aditif dan yang pada akhirnya melakukan tindakan kriminalitas. Jika kita kaji kesalahan tidak sepenuhnya di jatuhkan kepada pemuda, dimana tempat-tempat dulunya sering diisi dengan kegiatan olahraga, seni/tari, dan tempat yang sifatnya memacu sportifitas dan kreatifitas sulit dijumpai baik di kabupaten, kecamatan maupun desa-desa yang ada di Riau.

Masalah pembangunan pemuda yang dihadapi saat ini adalah mudahnya terpropokasi dikalangan pemuda dalam berbagai hal, tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh kalangan pemuda, banyaknya tingkat pengangguran dikalangan pemuda, dan tingginya tingkat penyebaran penyakit masyarakat dilakukan oleh pemuda. Dengan demikian maka tantangan yang dihadapi pada masa depan adalah masih rendahnya wahana pendewasaan bagi kepemudaan, relative rendahnya kualitas dan kuantitas potensi kepemudaan, belum terbinanya peranan pemuda dalam pembangunan social politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan, dan masih tingginya penyakit masyarakat yang disebabkan oleh kalangan pemuda.

Walaupun masalah dan tantangan harus dihadapi, namun peluang untuk pengembangan pembangunan pemuda masih terbuka. Adapun peluang tersebut adalah; pengembangan dan pemberdayaan organisasi dan kepemimpinan kepemudaan, pengembangan kemampuan kepemudaan dalam berwirausaha, peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam kegiatan pembangunan.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan organisasi.
- b. Mengembangkan minat dan bakat dikalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, ulet serta mandiri.

3. Program Pembangunan

- a. Program kepemudaan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan potensi kepemudaan
- b. Program pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan
- c. Program peningkatan dan pemberdayaan partisipasi pemuda

4.2.3. Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

4.2.3.1. Industri

1. Kondisi Umum

Kegiatan industri pengolahan adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi. Peranan industri pengolahan didalam struktur ekonomi Riau cukup besar, disamping penyerapan tenaga kerjanya juga besar.

Untuk melihat peranan industri pengolahan ini, dapat dilihat kontribusinya didalam PDRB Riau yang menduduki posisi kedua setelah minyak dan gas bumi. Kontribusi industri pengolahan didalam PDRB, tahun 1994 sebesar 27,36%, tahun 1995 sebesar 29,70%, tahun 1996 sebesar 30,75%, tahun 1997 sebesar 30,96%, dan tahun 1998 sebesar 26,13%. Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB ini diperkirakan pada masa yang akan datang semakin besar sejalan dengan membaiknya keadaan ekonomi Indonesia.

Secara keseluruhan dalam sepuluh tahun ini perkembangan jumlah industri pengolahan menunjukkan trend meningkat. Pada tahun 1998 jumlah industri dan sebanyak 290 buah yang terdiri dari industri makanan/ minuman 69 buah, industri tekstil/pakaian sebanyak 23 buah, industri kayu/barang-barang dari kayu sebanyak 15 buah, industri barang dari kimia sebanyak 42 buah, industri barang galian bukan logam 10 buah, dan industri barang dari logam/mesin dan peralatannya sebanyak 131 buah, sedangkan jumlah industri kecil pada tahun 2000 yang terdiri dari industri sandang dan pangan, industri kulit dan kerajinan umum, serta industri kimia, bahan bangunan dan logam yang seluruhnya berjumlah 1.536 buah.

Berdasarkan perkiraan, keadaan dan perkembangan industri pengolahan pada masa yang akan datang cukup prospektif. Keadaan ini dimungkinkan oleh adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki Riau dan kesetategisan letak Riau berada diposisi silang lintas jalur dunia (perdagangan internasional). Membaliknya keadaan ekonomi nasional pasca SI. Memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi secara nasional. Hal ini juga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri di Riau.

Ketimpangan antara industri besar dengan industri rumah tangga, kecil dan menengah (IRTKM) di Riau sangat nyata, dan hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pada industri rumah tangga, kecil dan menengah secara agregat, modal terbatas, produksi terbatas, menyerap tenaga kerja yang besar. Sebaliknya pada industri besar, modal besar, produksi besar, akan tetapi penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan IRTKM relatif kecil. Sementara itu keterkaitan antara industri besar dengan IRTKM sangat kecil sekali. Hal ini sebagai akibat tatanan industri yang dibangun semata-mata berorientasi pada pasar jangka pendek dan menggunakan pendekatan-pendekatan klasik. Untuk membangun kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan tatanan ini perlu dikaji ulang yaitu menempatkan IRTKM menjadi basis kekuatan ekonomi makro.

Untuk menumbuhkan kembangkan IRTKM perlu dilihat lingkungan internal dan eksternal IRTKM itu sendiri. Dilihat dari lingkungan internal, IRTKM mempunyai kekuatan : relatif lebih tahan terhadap goncangan ekonomi, tidak terlalu tergantung pada fasilitas pemerintah, dan didukung oleh sejumlah sumber daya manusia yang relatif besar. IRTKM mempunyai kelemahan; kurang dapat memanfaatkan peluang pasar, struktur modal dan kurang akses untuk

mendapatkan modal, administrasi dan manajemen sumber daya manusia yang terbatas, teknologi yang digunakan relative sederhana, aktivitas usaha yang kurang kondusif, tidak dapat memanfaatkan kekuatan system aglomerasi, dan kelembagaan pemasaran yang masih terbatas.

Dari lingkungan eksternal, IRTKM mempunyai peluang; adanya peluang pasar yang relative besar, baik pasar local maupun nasional maupun pasar internasional; menguatnya keinginan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil (rakyat); relative kondusifnya kegiatan ekonomi. Ancaman IRTKM adalah ; bagi industri kecil yang ada di Riau, besarnya pangsa pasar yang dapat diambil oleh industri-industri kecil diluar Riau, dan masih besarnya kendala birokrasi perizinan khususnya industri kecil.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka isu-isu IRTKM adalah sebagian besar adalah produk IRTKM tidak atau kurang dapat dipasarkan. Isu lain yang menonjol adalah lemahnya kemampuan financial, manajemen, dan pemasaran IRTKM.

2. Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan industri adalah membangun kesejahteraan dan ketahanan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui kegiatan industri hulu dan hilir. Untuk itu, upaya mempercepat keterkaitan industri kecil dan menengah dengan industri besar, membangun industri rumah tangga, kecil dan menengah yang memiliki daya tahan dan fleksibilitas terhadap gejolak ekonomi, dan menumbuhkan kewirausahaan yang maju dan mandiri.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah (IRTKM) yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah yang mandiri berbasis ekonomi kerakyatan.
- b. Program pembinaan kawasan industri, dimaksudkan agar kawasan-lawasan industri yang ada dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan pasar dan agar lebih kompetitif serta memiliki nilai keunggulan komperatif.
- c. Program alih teknologi, dimaksudkan agar adanya proses industrialisasi diikuti oleh adanya proses alih teknologi kepada masyarakat local/ bangsa Indonesia.
- d. Program pembinaan kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan atas dasar saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menuntungkan, antara industri kecil-menengah dengan industri besar.
- e. Program pengembangan industri penunjang pertanian, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian, seperti menghasilkan alat-alat kebutuhan sector pertanian, bajak, pacul, parang dan sebagainya.
- f. Program pengembangan industri yang menyediakan kebutuhan rakyat, dimaksudkan untuk menunjang agroindustri.
- g. Program pengembangan industri alat-alat angkutan umum, yang dimaksudkan untuk menunjang sector angkutan darat, angkutan sungai, dan angkutan laut.
- h. Program bimbingan, penyuluhan dan pengawasan industri, yang bertujuan untuk membantu industriawan mengatasi berbagai hambatan seperti penyediaan dana, pengadaan bahan baku, proses produksi, manajemen dan memperluas pasar.

4.2.3.2. Pertanian

A. Tanaman Pangan dan Holtikultura

1. Kondisi Umum

Kegiatan pertanian terdiri dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Khususnya untuk pertanian tanaman pangan dan

hortikultura di Riau cukup potensial, terutama bila dilihat dari luas lahan yang dapat dikembangkan tanaman pangan dan hortikultura. Produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Riau terdiri dari padi, palawjia, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dalam lima tahun terakhir ini kegiatan tanaman pangan cenderung meningkat, terutama bila dilihat dari luas lahan dan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Selama priode 1999 luas panen tanaman padi mengalami kenaikan sekitar 23,28 persen yaitu dari 126.280 hektar menjadi 155.683 hektar. Sedangkan produksinya juga naik sebesar 24,72 persen yaitu dari 370.124 ton menjadi 461.630 ton. Naiknya produksi pada disusul oleh jagung 41.433 ton pada tahun 1998 menjadi 56.317 ton pada tahun 1999 sebesar 35,92 persen. Produksi ubi kayu juga mengalami kenaikan dari 71.892 pada tahun 1998 menjadi 82.437 pada tahun 1999 atau naik 14,67 persen, sagu dari 102.861 ton pada tahun 1998 menjadi 109.392 ton pada tahun 1999. sedangkan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan jenis lainnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tingkat harga produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan indikator terhadap nilai produk pertanian tanaman pangan. Naik turunnya harga produk pertanian tanaman pangan ini mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima petani, dan pengaruh harga terhadap pendapatan ini berbanding lurus. Semakin tinggi tingkat harga semakin besar keuntungan yang diterima petani, dan selanjutnya akan memperbesar pendapatan yang diterima petani. Sebaliknya, rendahnya tingkat harga akan memperkecil keuntungan yang diterima petani, dan selanjutnya akan menurunkan pendapatan petani. Oleh karena itu, tinggi rendahnya harga pertanian tanaman pangan dan hortikultura akan dapat mempengaruhi kegairahan petani untuk melakukan kegiatan produksi. Mengamati, tingkat harga produk-produk pertanian tanaman pangan di Riau selama lima tahun terakhir relative meningkat. Akan tetapi peningkatan harga ini tidak sebanding dengan kenaikan harga produk lain. Dengan demikian maka secara riil kenaikan produk pertanian tanaman pangan tidak menaikkan pendapatan petani walaupun harga produk pertanian tanaman dan hortikultura meningkat.

Untuk melihat prospek dan arah kebijakan (strategi) yang akan dibuat pada masa yang akan datang, aspek lingkungan internal dan eksternal dapat dijadikan dasar kajian. Dilihat dari aspek lingkungan internal, kekuatan pertanian tanaman pangan adalah lahan pertanian tanaman pangan cukup potensial, sumber tenaga kerja manusia secara kuantitas cukup tersedia. Sebagian besar budaya masyarakat desa masih berorientasi pada budaya agraris. Sedangkan kelemahan pertanian tanaman pangan adalah; adanya konversi lahan pertanian yang potensial menjadi lahan untuk kegiatan non pertanian tanaman pangan, masih terbatas kemampuan petani baik dilihat dari manajemen usaha tani, teknologi, financial maupun wawasannya.

Dari lingkungan eksternal, peluang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, masih terbukanya peluang pasar untuk produk-produk tanaman pangan, semakin meningkatnya teknologi pertanian tanaman pangan, adanya dukungan pemerintah terhadap pengembangan tanaman pangan. Ancaman pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah semakin besarnya jumlah produk-produk tanaman pangan dari daerah atau negara lain yang masuk ke Riau, produk-produk tanaman daerah atau negara lain mempunyai daya saing yang lebih baik dibandingkan produk-produk tanaman pangan yang berasal dari Riau.

Tingkat produksi dan produktivitas kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Riau masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: a) jenis typologi lahan yang didominasi oleh tanah Podzolik Merah Kuning, b). system pengairan sebagian besar masih mengandalkan tadah hujan, c). pemanfaatan teknologi serta usaha tani oleh petani masih belum optimal, d). permodalan petani masih lemah. Dampak dari permasalahan tersebut diatas, produk tanaman pangan dan horticultural Riau relative belum dapat mengakses pasar dan bersaing, baik ditingkat nasional, regional dan internasional karena

kualitas produk yang relative rendah, produksi yang tidak berkelanjutan dan biaya produksi yang cukup tinggi.

2. Kebijakan Pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura pada intinya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pengembangan system dan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang pada gilirannya nanti akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- c. Mendukung pmbangan system dan usaha agribisnis serta agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah usaha tanaman pangan dan hortikultura dipedesaan.
- d. Mendukung pembangunan sub sector tanaman pangan dan hortikultura an pengembangan wilayah yang masih tertinggal di Daerah Propinsi Riau.
- e. Mempertahankan dan memelihara kesuburan tanah, sumber air dan kelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup.
- f. Mendorong minat investor dan pengusaha dalam menanamkan modal dan bermitra pada sub sector tanaman pangan dan hortikultura di Propinsi Riau.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan aparatur, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas petani agar dapat mengelola usaha pertanian secara professional dan meningkatkan pengetahuan aparatur dan keterampilan.
- b. Program pengembangan potensi lahan pertanian yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang masih belum digarap dan pengembangan system informasi dan statistic pertanian tanaman pangan dan hortikultura, agar tersedia dan tersusunnya data dan informasi yang akurat.
- c. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas petani agar dapat mengelola usaha pertanian secara professional.
- d. Program peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Riau dalam memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap berbagai kebutuhan akan produk-produk pertanian tanaman pangan, dalam rangka peningkatan gizi masyarakat.
- e. Program pengembangan agribisnis komoditas pertanian tanaman pangan, yang bertujuan memacu peningkatan pendapatan/kesejahteraan petani dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada masyarakat pedesaan.
- f. Program diversifikasi pangan dan gizi, bertujuan untuk mendorong pengembangan diversifikasi pangan dan gizi melalui usaha pemanfaatan lahan perkarangan dan pengolahan keanekaragaman pangan.
- g. Program pengembangan system dan usaha pengolahan tanaman pangan dan hortikultura yang dapat mendorong terciptanya system dan usaha pengolahan hasil, kelembagaan, permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil.
- h. Program pengembangan sub sector tanaman pangan dan hortikultura di wilayah yang masih tertinggal.

B. Peternakan

1. Kondisi Umum

Pembangunan sub sector peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat disamping meningkatkan pendapatan peternak. Secara umum perkembangan populasi ternak di daerah Riau mengalami peningkatan selama kurun waktu 1995 sampai 1999. populasi ternak pada tahun 1999 tercatat: sapi 140.897 ekor, kerbau 43.518 ekor, kambing 215.702 ekor, domba 1.057 ekor dan babi 514.566 ekor. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan populasi pada hampir seluruh jenis ternak, hanya domba dan babi yang mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah populasi ternak tahun 1999 disebabkan kenaikan populasi ternak babi yang sangat drastis, yaitu dari 273.587 ekor pada tahun 1998 menjadi 514.566 ekor di tahun 1999.

Informasi lain yang diperoleh dinas peternakan jumlah ternak yang dipotong pada tahun 1999 tercatat sebanyak 25.798 ekor sapi, 7.943 ekor kerbau, 86.151 ekor kambing dan 68.540 ekor babi. Sementara itu produksi daging tahun 1999 diperkirakan 25.369 ton atau mengalami penurunan 14,22 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 29.576 ton. Sedangkan produksi telur diperkirakan mencapai 165.909.475 butir berarti turun sebesar 11,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Usaha peternakan pada umumnya diusahakan sebagai usaha sampingan sehingga belum memenuhi persyaratan secara ekonomi sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan peternak. disamping itu tingkat pemeliharaan ternak masih rendah karena kurangnya pengetahuan tentang pemeliharaan ternak, apalagi ternak dianggap sebagai tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Kebijakan Pembangunan.

- a. Meningkatkan populasi ternak
- b. Arah kebijakan peternakan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat yang dilakukan melalui kegiatan peternakan yang bersekala ekonomi, menggunakan teknologi tepat guna sehingga didapat nilai tambah yang meningkat serta mendorong peranan masyarakat yang lebih besar.
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui usaha peternakan yang berorientasi agribisnis, serta meningkatkan modal untuk pengembangan usaha petani melalui pemerdayaan ekonomi kerakyatan.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembangunan peternakan rakyat terpadu yang diarahkan untuk mewujudkan peternakan berkualitas, sikap mandiri, serta pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan
- b. Program diversifikasi pangan dan gizi dan bertujuan meningkatkan dan mengembangkan diversifikasi hasil ternak, dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
- c. Program pengembangan usaha peternakan, adalah upaya meningkatkan pengembangan dan produksi peternakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan imseminasi buatan
- d. Program peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Propinsi Riau memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap berbagai kebutuhan akan produk-produk peternakan, dalam rangka peningkatan gizi masyarakat.
- e. Program pembangunan sumber daya, sarana dan prasarana peternakan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas aparat peternakan, peternak dan terwujudnya sistem informasi dan dukungan prasarana peternakan.

- f. Program pengembangan agribisnis komoditas, bertujuan memaju peningkatan pendapatan/kesejahteraan peternak dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada masyarakat pedesaan.
- g. Program pembinaan daerah potensi peternakan
- h. Program pengembangan kawasan produksi peternakan
- i. Program peningkatan usaha dan industri peternakan
- j. Program pengembangan pembinaan kelembagaan dan kemitraan

C. Perikanan

1. Kondisi Umum

Kondisi perikanan didaerah Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut. Data menunjukan bahwa dari sejumlah 284.992,4 ton produksi ikan pada tahun 1999 sebanyak 265.843,1 ton atau 93,28 persen merupakan hasil perikanan laut dan budidaya, 18.749,3 ton (6,72%) hasil dari perikanan umum, tambak dan kolam. Bila dibandingkan dengan total produksi ikan pada tahun 1998 yang berjumlah 274.145,2 ton berarti produksi ikan pada tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 3,80 persen.

Nilai produksi perikanan pada tahun 1999 tercatat Rp 1.021, 92 miliar rupiah lebih, sedangkan pada tahun 1998 tercatat sebanyak Rp 850, 45 miliar rupiah.

Walaupun tingkat produksi meningkat, namun belum mampu meningkatkan kehidupan nelayan karena hasil tangkapan yang semakin menurun terutama diperaian selat malaka, dan tingkat harga yang ditentukan oleh perantara (tengkulak), serta cara penanganan yang masih tradisional. Disamping itu areal penangkapan diperaian selat malaka yang merupakan perairan internasional terlalu padat oleh kapal-kapal yang berukuran besar dan sering terjadi pembuangan limbah melalui tangki kapal sehingga menimbulkan pencemaran laut yang menyebabkan produksi ikan berkurang. Demikian juga kondisi sungai-sungai yang berada dipropinsi Riau, terjadi pencemaran karena limbah industri, terutama sungai Siak, Sungai Rokan dan Sungai Indragiri.

2. Kebijakan Pembangunan.

Arah kebijakan perikanan adalah meningkatnya kesejahteraan nelayan, untuk itu pengembangan nelayan dilakukan melalui pemanfaatan optimal dan terpadu seluruh sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Program Pembangunan

- a. Program meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan/ petani ikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan/ petani untuk menghasilkan produksi yang berkualitas.
- b. Program peningkatan kegiatan penyuluhan (kelestarian sumber perairan) dan pelatihan (budidaya perikanan air darat/laut), dengan pemanfaatan IPTEK yang berwawasan lingkungan.
- c. Program pengawasan dan penertiban penangkapan perairan laut/umum dalam rangka menjaga kelestarian perairan laut/umum.
- d. Program diversifikasi pangan dan gizi, yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan diversifikasi hasil-hasil perikanan, dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
- e. Program peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Propinsi Riau memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap berbagai

kebutuhan akan produk-produk perikanan, dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat.

- f. Program pengembangan agribisnis komoditas perikanan, yang bertujuan memacu peningkatan pendapatan /kesejahteraan nelayan/petani ikan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

D. Perkebunan

1. Kondisi Umum

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan pertanian baik ditingkat nasional maupun regional. Perkembangan kegiatan perkebunan di Riau menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan yang sampai saat ini (tahun 2000) mencapai luas 2.187.554 hektar dengan peningkatan rata-rata 7,64 persen pertahun. Dan peningkatan produksi rata-rata 16,87 % atau sebesar 3.011.379 ton pada tahun 2000, dengan komoditas utama karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, dan aneka tanaman lainnya.

Dilihat dari lingkungan internal, dan eksternal, maka pada lingkungan internal kekuatan kegiatan perkebunan adalah; semakin besarnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam usaha perkebunan yang sampai dengan tahun 2000 telah melibatkan petani sebanyak 923.605 kepala keluarga, yang meliputi perkebunan besar sebanyak 145 perusahaan swasta dan 1 perusahaan BUMN (PTPN V), memberikan dampak yang luas dalam kegiatan usaha perkebunan, dengan semakin beragamnya jenis tanaman disamping tersedianya lahan untuk kegiatan pembangunan. Sedangkan kelemahan kegiatan perkebunan ini, khususnya perkebunan rakyat adalah produktifitas dan kualitas produk masih relative rendah dan petani selalu berada pada posisi lemah khususnya dalam penentuan harga produk.

Dari lingkungan eksternal peluang tanaman perkebunan adalah; semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap usaha perkebunan rakyat, tumbuhnya berbagai industri yang membutuhkan bahan baku dari produk perkebunan, dan semakin luasnya pasar produk perkebunan. Sedangkan ancaman terhadap perkebunan rakyat adalah; semakin maraknya tuntutan isu lingkungan dan hak asasi manusia, hanya isu pasar global (AFTA) dimana masyarakat belum siap, serta beberapa produk perkebunan tertentu pasarnya dikuasai oleh negara lain.

Dalam hal pemasaran hasil-hasil perkebunan, petani tidak dapat menentukan harga karena adanya monopsoni dan oligopoly. Tingkat harga ditentukan oleh perusahaan, hal ini terjadi karena sempitnya daerah pemasaran karena kelangkaan transportasi dan monopoli harga.

2. Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan sub sector perkebunan adalah pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dengan upaya; peningkatan/penguatan pemodalan masyarakat/petani, peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, dan memperkuat posisi tawar, perluasan kesempatan penduduk local, serta persiapan menghadapi pasar AFTA dan globalisasi dibidang perkebunan.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembangunan sarana penunjang dan kelembagaan perkebunan.
- b. Program pembangunan dan pengembangan usaha perkebunan rakyat.
- c. Program pengembangan komoditas perkebunan.
- d. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas petani agar dapat mengelola usaha perkebunan secara professional.

- e. Program pemanfaatan hasil ikutan komoditi perkebunan yang dapat meningkatkan pendapatan petani.

E. Kehutanan

1. Kondisi Umum

Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lainnya serta ekosistemnya, baik secara pelindung system penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sumber daya pembangunan. Pembangunan kehutanan meliputi aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social, dalam hutan negara maupun sekitar kawasan hutan.

Apa yang dikemukakan diatas ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat sebaliknya, hilang atau setidaknya tiga fungsi hutan yaitu fungsi ekonomi (jangka panjang), fungsi ekologi dan fungsi estetika. Gambaran tentang keadaan hutan secara nasional ini tidak berbeda dengan keadaan hutan di Riau. proses degradasi hutan dan deforesatasi hutan Riau ini telah dimulai sejak tahun 1967. salah satu penyebab kerusakan atau degradasi hutan adalah eksploitasi hutan secara besar-besaran dalam rangka mendapatkan dana segar untuk pembangunan diawal pemerintahan Orde Baru maupun dalam rangka industrialisasi kehutanan. Disamping kerusakan tersebut, kondisi hutan Riau diperburuk dengan adanya permintaan lahan hutan untuk dirubah/ dikonversi bagi peruntukan pembanguan sector diluar kehutanan seperti pembangunan transmigrasi, perkebunan, pertambangan, pengembangan pemukiman/ kota dsan lain sebagainya. Pembangunan sector non kehutanan pada lahan hutan ini bahkan menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi dan manfaat yang dimiliki oleh hutan selama ini baik yang dapat diukur (tangible) maupun yang tidak dapat diukur (intangible).

Riau yang mepunyai wilayah daratan lebih kurang 9.456.160 hektar, dan berdasarkan paduserasi antara TGHK dan RTRWP Riau yang ditetapkan melalui keputusan gubernur/ kepala daerah tingkat I Riau, nomor Kptas/105a/III 1998 tanggal 27 maret 1998, hutan di Propinsi Riau adalah 4.935. 178 hektar. Adapun rincian pambagian kawasan hutan tersebut adalah:

- Hutan lindung 361.867 hektar (3,83%)
- Kawasan lindung gambut 695.874 hektar (7,36%)
- Cagar alam/suaka margasatwa 439.230 hektar (4,64%)
- Taman nasional 110.114 hektar (1,16%) taman hutan raya 6.172 hektar (0,07%)
- Taman wisata alam 4.721 hektar (0,05%)
- Kawasan sekitar waduk, sungai dan danau 13.100 hektar (0,14%)
- Hutan produksi 2.649.608 hektar (28,02%)
- Hutan produksi konvensi 334.521 hektar (3,54%)
- Hutan bakau 252.860 hektar (2,67%)

Secara keseluruhan produksi kayu olahan yang diproduksi menunjukan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 1999/2000 tercatat produksi kayu olahan untuk jenis kayu gergajian sebanyak 345.502,46 m³, kayu lapis sebanyak 574.702,86 m³, chip 85.115,76 m³,venner 71.243,79 m³, pulp 1.387.225,02 m³, blok board 47.763,10 m³, dan fancy wood 4.655,36 m³.

2. Kebijakan Pembangunan.

Arah kebijakan hutan adalah pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pembangunan hutan yang berazaskan kelestarian dengan menitik beratkan kepada pengembangan fungsi social hutan, pembangunan ekonomi rakyat, redistribusi asset, peningkatan peran masyarakat

local atas pengelolaan hutan dilakukan melalui perlindungan hak masyarakat local, kemantapan kawasan dan fungsi hutan, serta peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia (aparatur dan masyarakat).

3. Program Pembangunan

- a. Program perencanaan dan pembangunan kehutanan yang terpadu dan komprehensif untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan yang lestari dan sesuai dengan fungsinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. Program perlindungan dan pengawasan serta pengendalian kerusakan hutan untuk melindungi dan mengendalikan kerusakan hutan akibat dari berbagai macam gangguan seperti ilegaloging, kebakaran hutan serta meningkatkan fungsi dan manfaat hutan sebagai system penyangga kehidupan.
- c. Program penyelamatan hutan, tanah dan air yang bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan (menjaga kelestarian lingkungan dan sekaligus sebagai daerah tangkapan air).
- d. Program rehabilitasi lahan kritis yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lahan yang sudah kritis akibat eksploitasi sumber daya alam/hutan.
- e. Program pemantapan kawasan hutan dan upaya peningkatan produktivitas hutan alam baik pesisir pantai atau di darat.
- f. Program penghijauan kota, dalam upaya mewujudkan kota yang asri, paru-paru kota dan daerah tangkapan air.
- g. Program pemetaan dan inventarisasi hutan sesuai dengan kawasan peruntukannya.

4.2.3.3. Perdagangan

1. Kondisi Umum

Kegiatan perdagangan di Riau semakin krisis ekonomi (sebelum tahun 1998) didominasi oleh produk industri. Akan tetapi saat krisis ekonomi produk pertanian semakin besar proporsinya dalam kegiatan perdagangan, walaupun secara keseluruhan masih didominasi oleh produk industri.

Secara keseluruhan kontribusi sector perdagangan dalam PDRB sedikit menurun. Tahun 1993 kontribusi sector perdagangan dalam PDRB sebesar 18,70%, dan tahun 1998 turun sedikit menjadi 18,54%. Kontribusi sektor perdagangan ini tahun 1993 menduduki posisi ketiga setelah sector industri, dan sector pertanian. Untuk tahun 1998 kontribusi sector perdagangan menduduki posisi pertama dalam PDRB.

Dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahun pada tahun 1993 sampai tahun 1996 sebesar 8,32 %. Pada tahun 1996 sampai tahun 1998 pertumbuhan sector perdagangan ini rata-rata pertahun hanya 4,19 %. Besarnya penurunan sector perdagangan ini sangat terasa pada saat krisis ekonomi 1998, walaupun begitu kontribusinya dalam PDRB terbesar.

Pernasalahan secara keseluruhan perdagangan yang terutama berkaitan dengan ekonomi kerakyatan adalah kecilnya nilai tambah yang didapat oleh usaha perdagangan kecil kalau dibandingkan dengan usaha perdagangan yang bersekala besar.

2. Kebijakan Pembangunan.

Arah kebijakan perdangan adalah meningkatkan kemampuan usaha kecil menengah melalui perluasan lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha kecil dan menengah dan pengembangan kewirausahaan serta mendorong partisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha untuk usaha kecil dan menengah, terutama dalam upaya peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri. Dalam membedakan usaha kecil diusahakan adanya kepastian usaha, tempat berusaha dan kemudahan memperoleh modal usaha.

3. Program Pembangunan.

- a. Program pengembangan kegiatan perdagangan, terutama dalam rangka meningkatkan ekspor non migas
- b. Program pengembangan kewirausahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di sector perdagangan.
- c. Program pengembangan usaha perdagangan dan industri untuk mengembangkan system pengawasan dan distribusi serta memantapkan pengadaan dan penyaluran barang strategis dan kebutuhan masyarakat lainnya.
- d. Program pengembangan kerjasama perdagangan regional dan internasional untuk mengembangkan kerjasama perdagangan regional dan internasional dalam rangka memperkuat kedudukan posisi tawar, memperluas pasar luar negeri dan mendorong peningkatan ekspor non migas.
- e. Program optimalisasi prasarana dan sarana pedagang kecil.
- f. Program kelembagaan dan informasi pasar untuk mengembangkan system kelembagaan dan informasi perdagangan yang efektif dan efisien dalam mendukung usaha perdagangan yang efisien dan efektif.
- g. Program pemberian bantuan modal.

4.2.3.4. Pengembangan Dunia Usaha di Daerah

1. Kondisi Umum

Perkembangan perekonomian di Propinsi Riau tidak dapat dilepaskan dengan peranan dunia usaha yang ada, baik dalam skala yang kecil maupun besar. Jumlah pengusaha yang di Propinsi Riau relatif banyak yang keberadaannya tersebar diseluruh wilayah kabupaten/kota yang ada, sekalipun dalam distribusinya kurang menyebarkan oleh karena pada umumnya menumpuk di ibukota Propinsi dan ibu kota kabupaten/kota.

Sekalipun telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang relatif pesat terutama sejak berlakunya otonomi daerah oleh karena Propinsi Riau telah terkenal seantero penjuru nusantara sebagai propinsi yang kaya akan sumber daya alam sehingga memiliki peluang usaha yang besar sehingga menjadikan daerah ini sebagai tujuan utama bagi berbagai kalangan dunia usaha yang ada diluar Propinsi Riau untuk dapat melakukan kegiatan ekspansi ataupun dalam rangka realokasi usaha diberbagai bidang dan sector produksi, namun hal tersebut telah menjadikan potensi dunia usaha local mendapatkan persaingan yang ketat, bahkan dalam beberapa hal tersisih dalam persaingan tersebut.

Propinsi Riau masih memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, namun kemampuan daerah secara totalitas masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama dalam hal permodalan, teknologi dan keterampilan sumber daya manusianya. Untuk itu pada masa mendatang kegiatan investasi masih sangat diperlukan, terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan dalam rangka transformasi teknologi yang dapat di adopsi oleh masyarakat tempatan, serta untuk menghadapi persaingan global yang bukan hanya mengandalkan pada keunggulan komperatif semata-mata tetapi lebih diutamakan pada keunggulan dan persaingan (competitive advantage).

2. Kebijakan Pembangunan

Pengembangan usaha ekonomi daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan teknologi dan pemodalan, dan sumber daya manusia, baik secara kelembagaan maupun dalam

operasionalisasinya serta pengembangan investasi yang mengarah pada sector-sektor riil dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembinaan kerjasama antara usaha ekonomi kuat dengan usaha ekonomi lemah.
- b. Program pembinaan usaha kecil, untuk mengembangkan usaha kecil secara terkendali dan terarah.
- c. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi
- d. Program penguatan lembaga pendukung usaha kecil
- e. Program pembinaan usaha ekonomi daerah
- f. Program pengembangan penanaman modal daerah
- g. Program peningkatan promosi dagang dan investasi

4.2.3.5. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Kondisi Umum

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan Riau khususnya. Ekonomi daerah akan tangguh jika pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh. Kalau kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kekuatan ekonomi daerah juga yang akan rapuh. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan sinergi kolektif yang dinaungi oleh koperasi tumbuh dan berkembang.

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena siratnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Untuk koperasi saja di Propinsi Riau (sebelum pemekaran) yang bergerak pada bidang produksi, penyaluran, pertanian tanaman pangan, perikanan dan lain-lain, pada tahun 1999 berjumlah 1.764 buah. Dengan dicapainya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,31 persen di Propinsi Riau tentunya berkaitan dengan besarnya investasi yang dilaksanakan pada kurun waktu yang bersangkutan. Jumlah investasi di Propinsi Riau bidang perkoperasian mencapai Rp 654.519, 23 juta (10,34 persen).

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Mengembangkan koperasi dan usaha kecil-menengah sebagai wadah kolektif yang efisien dan efektif sehingga tumbuhnya sinergi kolektif kegiatan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan produktif yang mempunyai nilai tambah yang tinggi.
- b. Pembinaan pengembangan koperasi dan UKM secara umum bertujuan untuk membantu mempercepat pelaksanaan ekonomi kerakyatan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produktif dalam rangka untuk menolong peningkatan produktifitas, efisiensi usaha, melalui koperasi dan UKM untuk membentuk masyarakat yang tangguh, mandiri berwirausaha.
- d. Memperkuat kerangka dasar koperasi dan UKM sebagai wadah ekonomi rakyat sekaligus mitra kerja usaha lainnya sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan perekonomian nasional.

- e. Memperluas wawasan pengetahuan, organisasi manajemen dan usaha, pengalaman bagi koperasi dan UKM dalam bidang organisasi, manajemandan usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
- f. Meningkatkan keyakinan masyarakat dan dunia usaha lainnya untuk menanamkan investasi dalam rangka menggali potensi sumber daya alam yang ada melalui koperasi dan UKM.
- g. Program refungsionalisasi dan revitalisasi koperasi sebagai sokoguru perekonomian daerah.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan koperasi usaha kecil-menengah
- b. Program peningkatan iklim pendukung usaha PKMK
- c. Program pengembangan jaringan kemitraan dan system informasi
- d. Program peningkatan akses pasar
- e. Program peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM
- f. Program pembinaan dukungan perkuatan modal
- g. Program pengembangan koperasi dan unit UKM
- h. Program pembinaan koperasi dan unit UKM
- i. Program penataan dan kelembagaan koperasi.

4.2.3.6. Pertambangan dan Energi

1. Kondisi Umum

Perkembangan pertambangan umum di Propinsi Riau relatif cukup pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang ini yang mengusahakan bahan galian pasir laut, granit, bauksit, timah, emas, batu bara, gambut, pasir kwarsa dan andesit. Sampai bulan September 2000, tercatat sebanyak 164 pemegang izin usaha pertambangan dalam bentuk kuasa pertambangan (KP), kontrak karya (KK) dan perjanjian karya penusaha pertambangan batubara (PKP2B) dengan berbagai tingkatan, baik penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi. Total wilayah dari 163 pemegang izin usaha pertambangan umum sebesar 1.408.376 hektar.

Jenis izin kuasa pertambangan (KP) diberikan kepada perusahaan swasta nasional. Sedangkan bila diminati oleh perusahaan asing, jenis izin berupa kontrak karya (KK) yang diberikan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Sebagian saham dan kontrak ini harus dimiliki oleh perusahaan nasional.

Wilayah batu bara yang telah dicadangkan untuk dikelola oleh pemerintah, bila diminati oleh pihak swasta, dapat diberikan dalam bentuk PKP2B ini diwajibkan menyeter 13,5% dari hasil produksinya kepada pemerintah melalui kas menteri keuangan.

Produksi gambut dihasilkan oleh PT. Arara Abadi di daerah Perawang Kabupaten Siak. Sedangkan batu bara merupakan produksi PT. Nusa Riau Kencana Coal di Kabupaten Kuantan Singingi. Bauksit oleh PT. Aneka Tambang di Kabupaten Kepulauan Riau dan timah oleh PT. Tambang Timah di Kabupaten Karimun.

Untuk setiap perusahaan pemegang izin tahap eksploitasi dikenakan iuran, yaitu iuran tetap/independent dan iuran produksi/royalti. Sedangkan untuk memegang izin terhadap eksplorasi dan penyelidikan umum hanya dikenakan iuran tetap yang besarnya tergantung kepada luas wilayah pertambangannya. Disamping iuran tersebut perusahaan pertambangan ini juga diwajibkan membayar iuran dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk tahun 1999/2000, jumlah iuran yang diterima tercatat sebesar Rp.5.093.481.874 dan US \$ 4.805.791,31.

Riau merupakan daerah yang mempunyai produksi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang terhimpun per-1 Januari 1999, bahwa cadangan minyak bumi di Propinsi Riau tercatat sebesar 6.107,6 MMSTB (juta standar tank barel) atau 69% cadangan nasional. Sedangkan cadangan gas bumi sebesar 50 TCF (triliun cubic feet) atau 38 % dari cadangan nasional.

Perusahaan pertambangan migas yang beroperasi di Propinsi Riau tercatat sebanyak 9 (sembilan) perusahaan yang merupakan operator Pertamina dengan sistem kontrak production sharing/bagi hasil (KPS) dan joint operating body (JOB). PT.Caltex Pacific Indonesia (CPI) merupakan minyak terbesar di Riau, bahkan di Indonesia. Luas wilayah kuasa pertambangan (WKP) migas perusahaan ini mencapai 31.641 km² yang terbagi dalam 4 (empat) blok yaitu Rokan blok (9.898 km²), Siak blok (8.314 km²), coastalplain Pekanbaru (CPP) blok (9.996 km²) dan mountain front Kuantan (MFK) blok (3.433 km²).

Untuk mengoptimalkan produksinya, PT. CPI dalam melakukan pengeboran menerapkan teknologi lanjutan (advanced technology) yaitu seperti EOR (enhanced oil recovery), LOSF (light oil steam flood) dan DSF (duri steam flood). Produksi migas PT. CPI pada tahun 1999 mencapai 272.321.270 barel minyak mentah (crude oil) atau sekitar 60% dari produksi nasional. Sedangkan untuk gas bumi tercatat sebesar 65.248,71 MSCF. Keberadaan perusahaan pertambangan migas di Propinsi Riau memberikan peluang kerja yang cukup besar bagi perusahaan lokal. Hal tersebut disebabkan, untuk kegiatan operasi penunjang (support operation) dan sebagai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (seperti seismic, work over, logging, cementing, drilling, dan lain-lain) di sub kontrakan kepada perusahaan jasa penunjang (PJP) nasional dan asing. Untuk tahun anggaran 1999/2000 tercatat sebanyak 293 PJP yang mendapatkan pekerjaan di KPS-migas dengan total nilai kontrak mencapai Rp 1,5 triliun (kontrak dalam rupiah) dan US \$ 424 juta (kontrak dalam dolar). Setiap PJP-migas yang akan bekerja di perusahaan pertambangan migas, selama ini harus terdaftar dengan mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Direktorat Jendral Migas. Sesuai dengan semangat otonomi daerah dan PP nomor 25 tahun 2000, penerbitan SKT-migas tersebut termasuk kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan di segala bidang yang dilaksanakan baik pemerintah maupun swasta, kebutuhan air bersih untuk berbagai keperluan menunjukkan kecenderungan meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih telah banyak dibangun sarana air bersih dengan sumber yang diambil dari permukaan dan air bawah tanah.

Air bawah tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan mengandung air (akifer) dibawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Air bawah tanah dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu mata air, air tanah bebas, dan air tanah tertekan (artesis). Potensi air bawah tanah dan air permukaan di kabupaten/kota yang ada di Riau relative besar. Jumlah perusahaan pemboran air bawah tanah yang telah mendapatkan izin di propinsi Riau sebanyak 9 perusahaan. Sedangkan untuk pengambilan air bawah tanah yang telah mempunyai izin berkumulah 112 perusahaan.

Mengamati potensi dan perkembangan kegiatan pertambangan yang ada di Riau sebagian besar adalah kegiatan-kegiatan yang berskala besar dan kurang memberi efek ganda bagi kegiatan masyarakat yang berskala kecil. Sebenarnya dari potensi pertambangan yang ada, peluang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan pada kegiatan pertambangan cukup besar terutama pada kegiatan bahan galian golongan C.

Energi mempunyai peranan yang sangat penting bagi pendukung pembangunan daerah, terutama untuk mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya. Untuk itu maka sasaran pembangunan energi adalah menyediakan energi yang cukup, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Potensi pengembangan energi di Propinsi Riau sebenarnya relative besar, namun untuk pengembangannya dihadapkan kepada aspek pembiayaan maupun investasi. Oleh karenanya

pembangunan energi di Propinsi Riau harus dicarikan jalan keluarnya untuk mengatasi segala permasalahan penyediaan energi yang cepat dan murah, terutama untuk mendukung pembangunan industri serta pemerataan keseluruh daerah yang membutuhkan energi.

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan daerah, maupun pembangunan sector-sektor, maka permintaan energi khususnya listrik akan terus meningkat. Demikian juga dalam beberapa tahun kedepan dengan adanya proses transisi masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan akan mendorong kebutuhan akan energi. Selain daripada itu pengembangan ekonomi kerakyatan (ekonomi pedesaan) akan semakin ditingkatkan, oleh karena itu kebutuhan akan energi dipedesaan juga akan semakin meningkat pula.

Permasalahan pembangunan perlistrikan didaerah Riau untuk lima tahun mendatang adalah menusahakan bagaimana pemerintah mampu mengolah potensi energi yang ada (baik PLTA maupun PLTD) untuk pemenuhan kebutuhan listrik khususnya pengembangan industri serta listrik pedesaan.

Kebijakan Pembangunan

- a. Membuat dan meninjau kembali peraturan izin di bidang pertambangan dan energi yang disesuaikan dengan otonomi daerah.
- b. Memberikan kemudahan dan mefasilitasi aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam manajemen dan usaha pembangunan dan energi.
- c. Mengembangkan system informasi dan pelayanan terpadu (SIPT)
- d. Penataan dan pengendalian wilayah pertambangan dan energi.
- e. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat tempatan berperan aktif dalam usaha pertambangan dan energi.
- f. Melakukan koprdinasi dengan institusi/instansi terkait dipusat maupun didaerah (propinsi, kabupaten, kota)
- g. Mengembangkan keterkaitan usaha pertambangan dan energi dengan sector lain.
- h. Menyediakan sumber energi baik dalam bentuk listrik maupun sumber energi alternative lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara murah, mudah, dan merata keseluruh wilayah dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

3.Program Pembangunan

- a. Program pembangunan pertambangan umum
- b. Pengembangan usaha pertambangan rakyat dan kemitraan
- c. Program pengembamngan kelistrikan
- d. Program pembangunan geologi dan sumber mineral
- e. Program peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia
- f. Program penelitian dan iventarisasi potensi mineral, energi dan air bawah tanah/ air permukaan.
- g. Program pembinaan/bimbingan dan pengawasan usaha pertambangan
- h. Program pembinaan dan pengembangan pertambangan rakyat.
- i. Program kemitraan dan keterlibatan potensi masyarakat tempatan pada pengusahaan pertambangan
- j. Program pemanfaatan lahan bekas tambang untuk sector lain
- k. Program pengembangan energi, untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan energi dengan energi industri didalamnya.
- l. Program pengembangan kelistrikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pemanfaatan listrik yang berimbang untuk keperluan industri dan rumah tangga.

- m. Program penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi alternative, dengan berbagai macam kegiatan studi dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber energi listrik yang efisien dan efektif.
- n. Program perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik, terutama untuk daerah pedesaan.

4.2.3.7. Kepariwisataaan

1. Kondisi Umum

Propinsi Riau sebagai pintu gerbang terdekat dengan dunia luar khususnya wilayah Malaysia dan Singapura. Propinsi Riau juga merupakan daerah tujuan wisatawan mancanegara. Untuk itu wisatawan memerlukan waktu yang relative pendek menuju ke Propinsi Riau (terutama Malaysia dan Singapura) dan untuk itu dapat menggunakan transportasi laut ataupun udara. potensi pariwisata Riau yang dapat dikembangkan antara lain adalah wisata alam, wisata budayah, wisata olaraga, wisata industri niaga, dan wisata bahari.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ketahun terus meningkat dan mempunyai urutan ketiga setelah Bali dan DKI Jakarta.. pada tahun 1995 jumlah kunjungan wisatawan ke Riau sebanyak 1.242.848 orang, tahun 1996 sebanyak 1.490.801 orang, tahun 1997 sebanyak 1.600.629 orang, tahun 1998 sebanyak 1.920.027 orang. Dari jumlah kunjungan wisatawan tersebut , 95,50% merupakan kunjuaangan ke daerah Riau Kepulauan, dan 3,50% kunjungan ke Riau daratan. Unsure penunjang pariwisata seperti hotel, transporasi, dan nunsur-unsur penunjang lainnya cukup memadai dan dari tahun ketahun terus meningkat.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Pengembangan pariwisata yang berbasiskan pada kekuatan ekonomi kerakyatan, melalui pembangunan peningkatan dan perkuasan usaha jasa pariwisata yang ditujang oleh unsure-unsur perhotelan, jasa pelayanan pariwisata, transportasi dan infranstruktur lainnya serta menciptakan keamanan da ketertiban yang kondusif
- b. Pengembangan dan peningkatan wisata budaya, wisata alam, di Riau daratan, termasuk sarana penunjang lainnya.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembangunan dan pengembangan potensi kepariwisatan dalam rangka untuk pemanfaatan secara optimal potensi kekayaan yang ada, seperi kawasan budaya, belanja, perdagangan dan sebagainya
- b. Program pengembangan objek dan daya tarik wisata
- c. Program peningkatan promosi dan pemasaran wisata
- d. Program pembinaan jasa wisata, yang dapat diandalkan seperti ujung tombak kegiatan kepariwisataan.

4.2.3.8. Telekomunikasi

1. Kondisi Umum

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan informasi, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya sarana komunikasi ini menjadi semakin tinggi.hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya pengguna jasa telekomunikasi dari jenis alat yang digunakan maupun intensitas penggunaanya.

Dari jenis alat yang digunakan saja perkembangannya relatif pesat, seperti untuk jenis telekomunikasi tidak bergerak (station) yang sudah banyak digunakan didaerah perdesaan

berupa penggunaan satekit dan penggunaan pemancar radio untuk daerah yang tidak terjangkau atau yang jalur kabelnya padat, seperti yang dilakukan baik oleh telkom maupun satelindo. Demikian juga terhadap penggunaan jenis peralatan telekomunikasi lainnya untuk yang bergerak (mobile) yang kompetisinya di Propinsi Riau semakin ketat, seperti yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan telekomunikasi seluler telkomsel, komselindo, dan satelindo.

Disamping itu pada saat sekarang di Propinsi Riau telah pula berkembangnya jasa internet yang dapat melakukan akses secara lintas negara dengan biaya yang relative murah. Usaha jasa internet yang telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang berperan sebagai provider, telah pula disambut oleh masyarakat dengan mendirikan sejumlah usaha jasa rental internet dalam bentuk warnet, cafenet, dan sebagainya.

2. Kebijakan Pembangunan

Pembangunan telekomunikasi diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih merata, hemat, akurat dan mudah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

3. Program Pembangunan

- a. Program inventarisasi sarana dan prasarana telekomunikasi daerah.
- b. Program pengembangan jasa telekomunikasi untuk meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat dan perluasan areal daya tangkap telpon seluler dan telepon.

4.2.3.9. Transportasi

1. Kondisi Umum

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Guna menunjang kelancaran perhubungan darat di daerah Riau tahun 1999 tercatat panjang jalan 13.205,24 km dan jembatan 876 buah. Dilihat dari kondisinya, jalan yang baik tercatat sepanjang 2.489,76 km (18,85%), sedang 4.682,70 km (35,46%), rusak/rusak berat 6.032,78 km (45,68%). Jika panjang jalan dirinci menurut jenis permukaan diperoleh proporsi 41,50 persen diaspal, 13,97 persen jalan kerikil dan 44,53 persen jalan tanah dan beton 0,82 persen. Selanjutnya dari 876 buah jembatan sebanyak 443 jembatan dengan konstruksi beton, 123 komposit, 185 dengan konstruksi kayu, 118 buah rangka, 5 buah adalah jembatan belly 2 buah.

Apabila prasarana jalan diibaratkan sebagai urat nadi maka prasarana pengangkutan adalah ibarat darah yang mengalir melalui urat nadi tersebut. Dalam kurun waktu 1993-1996 jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat. Pada tahun 1996 tercatat 304.239 buah kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang 25.857 buah, mobil bus 15.201 buah, mobil gerobak 32.211 buah dan sepeda motor sebanyak 230.970 buah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan jumlah mobil penumpang 13,77 %, mobil bus 21,47 %, dan mobil gerobak 13,93 % dan sepeda motor 23,58%.

Disamping angkutan jalan raya, maka kebutuhan untuk membangun jalan kereta api sebagai modal transportasi juga sudah saatnya pula untuk melaksanakan sesuai dengan hasil survey yang dilakukan.

Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang sangat penting di Riau. hal ini disebabkan sebagian daerah Riau terdiri dari pulau-pulau yang terhampar diselat Sumatra sampai ke laut Cina Selatan. Dari laporan 42 pelabuhan laut yang ada diperoleh informasi bahwa pada tahun 1997 banyaknya barang-barang antar pulau yang dibongkar sejumlah 22,06

juta ton dan yang dimuat berjumlah 89,62 juta ton. Sedangkan pada tahun 1998 barang-barang antar pulau yang dibongkar berjumlah 15,24 juta ton, dengan kata lain lalu lintas barang-barang antar pulau tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 44,77 persen untuk barang yang dibongkar dan naik sebesar 175,67 persen untuk yang dimuat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari laporan 11 pelabuhan udara di Propinsi RIAU, hanya 2 bandara yang berfungsi secara komersial yaitu bandara Sultan Sarif Kasim II di Pekanbaru, dan bandara Hang Nadim-Batam dengan grafik pada kedua bandara menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Adapun lima bandara lainnya (Kijang, Japura, Sebatik, Dabo, dan Pinang Lampai, Reth dan Pasir Pangarayan, Ranai, Sungai Pakning) belum beroperasi secara optimal dan hanya melayani penerbangan perintis dan penerbangan non komersial dengan grafik angkutan dan penumpang yang mengalami penurunan. Pada tahun 1999 frekwensi penerbangan pesawat udara dan penumpang yang datang dan berangkat pada umumnya menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Frekwensi pesawat yang datang mengalami penurunan yaitu 4,03 persen atau dari 14.219 menjadi 13.646 dan frekwensi pesawat yang berangkat turun sebesar 3,25 persen atau dari 14.241 pada tahun 1998 menjadi 13.778 pada tahun 1999. selanjutnya lalu lintas penumpang yang datang tahun 1999 tercatat 402.057 orang, sedangkan pada tahun sebelumnya berjumlah 471.459 orang atau turun sebesar 14,72 persen. Disisi lain, jumlah penumpang yang berangkat ikut mengalami penurunan sebesar 18,29 dari 469.758 orang tahun 1998 menjadi 383.846 orang tahun 1999.

Selanjutnya kegiatan bongkar muat barang, bagasi, dan pos paket secara umum mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Banyaknya barang yang dibongkar pada tahun 1999 turun yaitu dari 8.874,26 ton tahun 1998 menjadi 5.827,40 ton pada tahun 1999 atau turun sekitar 34,33 persen, sedangkan barang yang dimuat mengalami penurunan sebesar 3,21 persen dari 4.987,58 ton pada tahun 1998 menjadi 4.927,40 ton pada tahun 1999. banyaknya bagasi yang dibongkar pada tahun 1999 tercatat 5.004,43 ton atau naik sebesar 3,22 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 4.848,22 ton. Sedangkan bagasi yang dimuat pada tahun 1999 berjumlah 5.298,60 ton atau naik sebesar 11,05 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang berjumlah 4.771,143 ton.

2. Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan transportasi yang ada adalah membangun kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pembangunan dan pengembangan transportasi rakyat.

3. Program Pembangunan

- a. Program rehabilitasi/pemeliharaan jaringan prasarana jalan
- b. Program peningkatan jalan
- c. Program pembangunan prasarana jalan
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
- e. Program pembangunan jembatan
- f. Program pengembangan sarana penunjang transportasi
- g. Program pengembangan fasilitas lalu lintas
- h. Program pembangunan jaringan kereta api
- i. Program pengembangan aksesibilitas ASDP
- j. Program rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan
- k. Program pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan udara dan keselamatan penerbangan
- l. Program pengembangan armada perintis

4.2.3.10. Kelautan

1. Kondisi Umum

Luas wilayah perairan laut Propinsi Riau mencapai 235.306 km² atau meliputi 71,33 % dari luas daratan yang didalamnya terdapat 3.214 pulau besar dan kecil, sebagian besar pulau-pulau kecil tersebut terhampar dilaut cina selatan, masih banyak yang belum berpenghuni.

Potensi kelautan yang ada diwilayah tersebut sangat besar baik ditinjau dari segi pemanfaatannya sebagai prasarana transportasi laut, maupun dari sisi sumber daya yang terkandung dibawah permukaannya seperti pasir laut, terumbu karang, dan kemungkinan adanya harta karun karena wilayah perairan Riau sangat dikenal pada zaman VOC dahulunya sebagai wilayah lintasan, dan berbagai jenis ikan mengingat bahwa wilayah perairan tersebut adalah merupakan selat dan pertemuan arus.

Aktifitas diwilayah perairan relative sangat padat, terutama diselat malaka yang dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi laut yang menghubungkan dengan daerah-daerah disekitarnya dan juga dengan negara luar. Dengan terbukanya akses transportasi laut kepulauan-pulau yang berada di Propinsi Riau, merupakan salah satu faktor pemacu pertumbuhan yang pada akhir-akhir ini cukup pesat.

Tuntutan terhadap kebutuhan akan pemanfaatan laut dan pantai untuk berbagai kepentingan akan semakin meningkat terutama untuk kegiatan ekonomi sehingga menjadikan laut semakin lama akan semakin penting dan semakin bernilai ekonomi yang cukup tinggi, terutama untuk keperluan usaha transportasi laut yang intensitas kegiatannya semakin tinggi, budi daya perairan yang semakin menjurus kelaut, penambangan pasir laut, dan sebagainya.

Oleh karena itu maka permasalahannya adalah bagaimana mengelolah potensi kelautan yang selama masih belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di daerah pesisir dan pantai. Dengan belum adanya satu lembaga yang memiliki tanggungjawab penuh dan jelas atas wilayah laut, maka sulit untuk mencari akar permasalahan yang ada di laut jika terjadi sesuatu, seperti apabila terjadinya pencemaran di laut, kerusakan pada ekosistem di laut (termaksud biota dan terumbu karang). Padatnya arus lalu lintas di laut akan membawah konsekwensi logis terhadap berbagai hal, seperti tingkat kerawanan kecelakaan laut yang tinggi.

Masih terdapat sejumlah pulau yang kosong, maka hal tersebut adalah merupakan potensi yang dapat di kembangkan. Tantangan pemanfaatan laut untuk kepentingan ekonomi, sangat di dominasi oleh mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi tinggi, permodalan yang kuat, dan memiliki akses komunikasi dengan luar negeri serta dengan pihak tertentu, sehingga upaya optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan ini belum dapat sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai dan pesisir yang selama ini kehidupan mereka akarab dengan laut, bahkan ekonomi mereka semakin terancam oleh karena potensi laut yang ada untuk kesejahteraan mereka semakin sulit di dapat, seperti potensi perikanan, laut yang tercemar sehingga sulit untuk melakukan budidaya, dan sebagainya.

Teknologi kelautan semakin maju dan berkembang seiring dengan semakin tinggi intensitas kegiatan di laut. Oleh karena sejauh mana kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangannya agar tidak tertinggal dan kehilangan momentum.

Infestasi di sector kelautan relative lebih mahal jika dibandingkan dengan infestasi di darat, sementara itu kemampuan pemerintah sangat terbatas. Oleh karenanya sejauh man kemampuan pemerintah untuk dapat memotivasi dan mendorong masyarakat melakukan investasi ke laut terutama guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah pantai dan pesisir.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perikanan, budidaya pantai dan pariwisata. Dengan berusaha untuk meminimalisasi dampak negative dari pada kegiatan eksploitasi dan eksplokasi laut, pantai, dan pesisir agar tetap terjaga kelestarian sumber daya laut yang ada dan mempertahankan ekosistem laut
- b. Perlindungan atau proteksi terhadap pemanfaatan potensi kelautan untuk masyarakat pantai.

3. Program Pembangunan

- a. Program optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan kelautan.
- b. Program kelestarian dan konservasi sumber daya laut
- c. Program optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya kelautan
- d. Program inventarisasi dan pengembangan potensi kelautan
- e. Program promosi dan pengembangan investasi ke laut
- f. Program pengendalian dampak lingkungan kelautan terutama untuk daerah pesisir dan pantai, melalui kajian dampak lingkungan secara intensif
- g. Pemberdayaan masyarakat pantai, untuk dapat mengolah potensi kelautan dengan menjaga kelestarian lingkungan

4.2.3.11. Sumber Daya Air dan Irigasi

1. Kondisi Umum

Pendaya gunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, regional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungannya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan perairan mencakup segala upaya mengembangkan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan air beserta sumbernya dengan perencanaan yang terpadu dan serasi guna mencapai manfaat sebesar besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan pri kehidupan rakyat. Pembangunan pengairan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, dan semakin memudahkan rakyat mendapatkan dan memanfaatkan air untuk keperluan hidupnya.

Pemanfaatan dan pengaturan air beserta sumber-sumbernya meliputi usaha penyediaan dan pengaturan air guna menunjang usaha pemukiman, pembangunan pertanian, industri, pariwisata dan kehutanan, pengaturan penyediaan air minum, air industri dan pencegahan terhadap pencemaran dan pengotoran air, pengamatan pantai serta pengembangan daerah rawan dan tambak. Pembangunan pengairan harus dilaksanakan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi dengan sector lainnya, agar diperoleh manfaat yang optimal. Tata guna air dan tata guna tanah serta kehutanan diselenggarakan secara terpadu sehingga menjamin fungsi-fungsi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan berpedoman pada pengertian-pengertian diatas, maka pembangunan perairan di Propinsi Riau dilaksanakan melalui peningkatan, perluasan dan pembaharuan usaha pengembangan sumber daya air dan upaya pelestarian serta distribusinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan air untuk hajat hidup rakyat, maka pelaksanaannya harus terpadu dan memperhatikan pembangunan pada sector lain. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup, berkembangnya wilayah dan daerah, serta berkembangnya sector pertanian, perindustrian, dan sector ekonomi lainnya, yang semua itu membutuhkan perhatian khusus perlu

diberikan pada konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, pemeliharaan wilayah peresapan dan daerah aliran sungai serta sumber air lainnya.

Potensi sumber daya air yang ada di Riau bukan saja karena terdapatnya empat sungai besar dengan beberapa anak sungainya, akan tetapi juga karena adanya curah hujan tahunan yang cukup tinggi. Selain itu Riau memiliki perairan pantai dan lahan basah yang sangat luas dan tersebar disepanjang wilayah bagian timur pulau Sumatra. Pembangunan dibidang pengairan meliputi:

a. Pembangunan Pengairan

- 1) Telah dilaksanakan pengembangan sumber daya air melalui program pengelolaan air sungai, danau an sumber air lainnya serta program perbaikan dan pengamanan sungai yang bertujuan untuk pengendalian banjir. Tujuan program ini adalah untuk penyediaan air baku, dan perlindungan pemukiman dari bahaya banjir dimana program ini dilaksanakan untuk sungai Siak, Indragiri, Kampar, Rokan.
- 2) Program pengembangan dan konservasi sumber daya air dilakukan diseluruh daerah Riau dengan tujkan untuk mengumpulkan data hidrometri, klimatologi serta membentuk sistem pendataan sumber air.

b. Pembangunan Irigasi

- 1) Program irigasi yang telah dilaksanakan terdiri dari program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang fungsional diseluruh Riau yang memiliki jaringan irigasi. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan produksi pertanian terutama tanaman pangan serta menunjang program transmigrasi. Kegiatan ini meliputi irigasi di Batang Teso, Natuna, Kaiti Samo, Batang Kumu, Kerandin dan Kuala Cinaku.
- 2) Program pengembangan dan pengelolaan daerah rawa telah dilaksanakan diberbagai daerah kabupaten yaitu Kampar, Indragiri Hilir, Indagiri Hulu dan Bengkalis.selain itu juga telah dilaksanakan proyek P2DR Kampar-Indragiri untuk pembangunan jaringan dan analisis. Tujuan kegiatan ini adalah menunjang transmigrasi dan optimalisasi pengembangan pemanfaatan rawa untuk pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan rakyat
- 3) Program inventarisasi daerah irigasi sehingga dapat diketahui tingkat fungsionalisasinya.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan dan kebutuhan air baku
- b. Pengamanan sumber daya air dalam rangka melindungi kawasan budidaya (pemukiman, pertanian, industri dan lain-lain).

3. Program Pembangunan

- 1) Program pembangunan konservasi sumber daya air, untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumber daya air melalui peningkatan penyediaan prasarana pengairan dan mendayagunakan sumber daya air bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Program pengembangan dan pengelolaan daerah rawa
- 3) Program sungai, danau, dan sumber air lainnya, untuk melestarikan kondisi dan fungsi sumber air sekaligus menunjang daya dukung serta meningkatkan nilai dan manfaat sumber air sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.
- 4) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

- 5) Program penyediaan dan pengolahan air baku, untuk meningkatkan penyediaan air baku serta prasarannya dalam memenuhi air bagi hajat hidup rakyat, baik di daerah kota dan desa.

4.2.3.12. Air Bersih, Perumahan dan Pemukiman.

1. Kondisi Umum

Perkembangan pemukiman dapat terjadi secara alamiah dan terencana yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi, menyebabkan pula meningkatnya kebutuhan penyediaan hunian dan lingkungan pendukungnya serta lebih layak, anam, dan nyaman dan ketersediaan sarana air bersih. Meskipun sebahagian besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara swadaya dan didukung oleh pasar penyediaan hunian, namun bagi kelompok masyarakat berpenghasilan kecil masalah ketersediaan hunian tidak hanya mungkin dipecahkan oleh masyarakat sendiri.

Permasalahan yang dihadapi pada sector perumahan dan permukiman di propinsi Riau saat ini adalah:

- a. Masih banyaknya perumahan penduduk yang belum memenuhi syarat rumah sehat/ rumah layak huni.
- b. Pemukiman penduduk yang terpecah-pecah (jaraknya berjauhan), sehingga menyebabkan sulit dalam pembinaan dan tata fisik desa tidak teratur, tidak terawat beberapa fasilitas di desa, seperti jalan-jalan desa, parit/saluran air dan sebagainya.
- c. Terbatasnya fasilitas air bersih, penerangan/lampu, perhubungan antar desa dan antar tempat pemukiman, serta banyaknya masyarakat yang belum punya WC yang memenuhi syarat kesehatan.
- d. Kemampuan masyarakat untuk membangun rumah sehat relative kecil disebabkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan juga tergolong kecil/rendah.
- e. Penyediaan dan pengolahan sarana air bersih untuk perumahan dan pemukiman yang layak huni.

Dalam kerangka itu maka sangat diharapkan peranan sector swasta untuk mengambil bagian dalam pembangunan perumahan dan pemukiman ini. Di lain pihak pemerintah Propinsi Riau harus dapat mendorong penyediaan ketentuan-ketentuan yang mendukung, seperti kemudahan perizinan, pencadangan areal yang pasti serta bantuan fasilitas ke dan di daerah pemukiman sehingga dapat menurunkan biaya pokok pembangunan perumahan dan pemukiman.

2. Kebijakan Pembangunan

Mengembangkan dan memantapkan sistem penyediaan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dan miskin yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat, meningkatkan institusi pembiayaan perumahan yang bertumpu pada mekanisme pasar primer dan sekunder, meningkatkan kapasitas pelayanan jaringan prasarana dan sarana pemukiman skala lingkungan, kota, dan wilayah, meningkatkan pekataan kawasan dalam rangka pengendalian perkembangan dan kualitas pemukiman, serta meningkatkan pengelolaan pemanfaatan, pemugaran, dan pelestarian kawasan strategis khususnya di perkotaan, pedesaan dan kawasan pemukiman tradisional serta peningkatan sarana air bersih. Sasaran kebijaksanaan ini adalah meningkatnya akses masyarakat berpendapatan rendah dan miskin untuk mendapatkan hunian, tersedianya sumber pembiayaan perumahan yang bermanfaat yang berasal dari akumulasi dana masyarakat, terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan prasarana dan sarana dan

meningkatnya fungsi kawasan dan pelestarian lingkungan. Prioritas pembangunan diarahkan pada pengembangan perumahan yang bertumpu pada suwadaya masyarakat, mendorong peranan swasta dalam pembangunan perumahan terutama daerah perkotaan, perbaikan dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana dasar pemukiman, termasuk dasar peningkatan koperasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan dan pemanfaatan, pemugaran dan pelestarian kawasan sehat dan kawasan strategis. Memenuhi kebutuhan rumah penduduk miskin yang memenuhi standarisasi

3. Program Pemabangunan

- a. Program perbaikan perumahan dan pemukiman
- b. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- c. Perogram penyehatan lingkungan pemukiman
- d. Perogram pengendalian dan keselamatan bangunan
- e. Program penyediaan penerangan

4.2.4. Pembangunan Kesehatan dan Olahraga

4.2.4.1. Kesehatan

1. Kondisi Umum

Bangunan kesehatan di Propinsi Riau diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju kesejahteraan dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, perhatian khusus diberikan pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), daerah kumuh baik perkotaan dan perdesaan yang menyebar keseluruh daerah terpencil dan masyarakat yang hidupnya terasing di Propinsi Riau.

Kesehatan pada dasarnya adalah merupakan hak azasi setiap individu manusia yang harus dihormati oleh setiap negara. Oleh karena itu kesehatan adakah kebutuhan mendasar yang harus mendapat prioritas pembangunannya. Munculnya masalah kesehatan sering kali sebagai dampak akibat pembangunan, sehingga setiap kebijakan pembangunan hendaklah berwawasan kesehatan.

Disamping masalah kesehatan masyarakat memiliki dampak jangka panjang munculnya sehingga mengeluarkan anggaran kesehatan bukanlah komsumtif atau pemborosan melainkan suatu infestasi yang hasilnya akan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pelayanan kesehatan selama ini selalu mengacu pada perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu, disisi lain yang perlu dibudi dayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap menjaga hidup sehat, bersih dan peduli terhadap lingkungan tempat tinggal masing-masing, penyediaan air bersih, jamban keluarga, pembuangan sampah dan limbah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan bidan di dasa yang telah terbinah, terus ditingkatkan pelayanannya yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dengan jumlah tenaga medis yang mencukupi agar permasalahan kesehatan di Propinsi Riau dapat ditangani dengan baik. Untuk itu perlu kesiapan dan propesionalisme kerja yang ekstra oleh para medis, sehingga permasalahan berbagai kesehatan masyarakat dapat diatasi dengan cepat dan tepat, perlu pengontrolan lebih cepat lagi untuk mengatasi permasalahan obat dan makan yang beredar di masyarakat sehingga peredarannya tidak menimbulkan masalah di masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan hendaknya berupaya untuk pencegahan dan pemberatan dari berbagai macam penyakit baik menular maupun tidak menular, penyediaan air bersih, MCK, dan sanitasi lingkungan diharapkan telah mencapai kepelosok dan lapisan masyarakat di Propinsi Riau. Untuk menunjang kebijakan program klesehatan sudah selayaknya

mempunyai peraturan daerah (PERDA) serta perangkat pelaturan daerah lainnya yang menjurus pada kesehatan. Adapun aspek pembangunan kesehatan meliputi:

a. Derajat kesehatan dan gizi masyarakat

Usaha peningkatan derajat masyarakat di Propinsi Riau sudah dilakukan semaksimal mungkin. Tolak ukur selama ini ditandai dengan penurunan tingkat kelahiran kasar (CBR) tingkat kelahiran menurut umun (ASFR), tingkat kelahiran total (TFR), tingkat kematian kasar (CDR), tingkat kematian bayi (IMR), tingkat kematian balita dan kematian menurut angka kesakitan tertentu dan meningkatnya usia harapan hidup (UHH). Dari data dapat dilihat perkiraan angka kelahiran kasar di Propinsi Riau tahun 1980 – 1990 sebesar 33,10 per 1000 penduduk. Pada tahun 1990 -1995 angka tersebut diperkirakan menurun menjadi 28,80 per 1000 penduduk. Dan angka kelahiran totak (TFR) tahun 1980 -1985 diperkirakan rata-rata yang dilahirkan oleh wanita usia subur yaitu 4,70 per WUS. Tahun 1985 -1990 yaitu 4,00 per WUS, tahun 1990 -1995 yaitu 3,40 per WUS dan tahun 1995 -2000 yaitu 2,9 per WUS. Untuk umur harapan hidup lahir (Eo) 1997 yaitu 66,06 angka kematian bayi per1000 kelahiran hidup tahun 1997 sebesar 32. Perkiraan BPS angka kematian kasar di Propinsi Riau 1985 -1990 sebesar 8,3 per 1000 penduduk, 1990 -1995 angka kematian kasar cenderung menurun menjadi 7,4 per 1000 penduduk. Menurut data pada kematian penyalik penyebab kematian pasien rawat inap di rumah sakit di Propinsi Riau tahun 1998 yang tertinggi adalah demam tidak diketahui penyebabnya dengan jumlah 136 orang (10,11 %), Struk 133 orang (9,89 %) cedara dan rupa paksa 98 orang (7,29 %), TBC paru BTA(+) 90 orang (6,69 %) dan yang rendah gagal ginjal 15 orang (1,12 %) serta ditambah penyakit lainnya 485 orang (36,06 %). Sedangkan angka lahir mati dan BBLR dirumah sakit dan rumah bersalin yang diperoleh dari kanupaten/kota di Propinsi Riau tahun 1998 adalah (2,28 %) dengan kisaran yang lebih tinggi dikabupaten Indragili Hilir (14 77 %) dan yang terendah di kabupaten Kampar (0%). Dan persentase penurunan angka lahir di RS/RB tahun 1998 di Propinsi Riau (12,17 %) dengan persentase tertinggi di kabupaten Bengkalis (57,41 %) dan terendah kabupaten Indragiri Hulu (9,42 %). Untuk penyakit menular seperti Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan yang perlu penanganan khusus di Propinsi Riau, dimana jumlah kasus klinis dan kematian Malaria di Propinsi Riau dipantau tahun 1998 menempati urutan tertinggi adalah kepulauan Riau dengan klinis (20.914), Batam (11.071) dan Indragiri Hulu (8.925) sedangkan urutan terendaha adalah Pekanbaru (5.36) dan Indragiri Hilir (1.373). Penyakit demam berdarah *Dengue* tidak luput dari perhatian diman penyakit ini telah menyebar luas dan berjangkit diseluruh kabupaten/kota di Propinsi Riau. Didaerah kepulauan Riau terdapat 489 kasus dengan CFR (0,61%), kemudian daerah Bengkalis 468 dengan kasus CFR (1,93%), kota Pekanbaru 237 kasus CFR (3,67%), daerah Kampar 119 kasus CFR (0), kota Batam 30 kasus CFR (10,0%). Serta penyakit-penyakit lainnya seperti rabies tertinggi di daerah Bengkalis dengan 249 kasus diberi Var 82, dan terendah di daerah Indragili Hilir 27 kasus di beri var 26 dan posutri 4 kasus, data Febuari 1999 menunjukan penyakit Aids dan HIV urutan tertinggi di kepulauan Riau dengan sample yang diperiksa 11,878, AIDS (0) dan HIV (77), kota Batam sample yang diperiksa 11,615, AIDS (5) dan HIV (31), daerah Bengkalis sample yang diperiksa 5.093, AIDS (1) dan HIV (7) sedangkan terendaha adalah kabupaten Kampar, Indragiri Hulu dan Indra ggiri Hilir, masing-masing AIDS (0) dan HIV (0). Data tentang rehabilitasi social korban narkoba tahun 1998 menunjukan bahwa sebagian besar adalah laki-laki (80%) dengan kelompok usia 17 – 80 dan 14 orang (56%) dan umur 20-30 tahun 11 orang (44%), pelajar 12 orang (48%) dan mahasiswa 2 Orang. Serta obat-obat yang dipakai extacy 12 orang, obat lainnya 8 orang. Indikator lainnya adalah status gizi masyarakat dengan melihat status balita dan gizi bayi, gizi ibu hamil dan

gizi kaum manula. Jumlah bayi menderita KEP total 26 ribu 469 orang. Untuk cakupan distribusi kapsul minyak ikan beryodium bagi Bumil, Buteki dan WUS dirinci menurut kabupaten/ kota di Propinsi Riau. Dengan cakupan terbanyak di kabupaten Kampar dengan jumlah Bumil 3.806 (18,91%), Buteki 3.436 (17,78 %) dan WUS 28.45 (18,71 %). Selanjutnya diikuti oleh kabupaten Indragiri Hulu Bumil 2,3 (1,61%), Buteki 886 (6,94 %) dan WUs 6.224 (6,49%). Pravelensi KEP nyata yang tertinggi di kabupaten Indragiri Hulu 304 orang (7,0%), terendah kota Pekanbaru 73 orang (1,7 %) dan KEP total tertinggi di kabupaten Indragiri Hulu 1.416 orang (32,7%) dan terendah di daerah Indragiri Hilir 737 orang (13,3%). Upaya perbaikan gizi melalui program ini dimaksudkan guna untuk peningkatan mutu balita dan masyarakat secara luas.

b. Kelembagaan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melengkapi mobil unit puskesmas keliling, serta tetap terus mengaktifkan posyandu, desa wisma disetiap kelurahan/desa. Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah sarana kesehatan dari swadaya masyarakat pada tahun 1998, meliputi posyandu sebanyak 3.927 buah, pos obat desa 156 buah, polindes 359% ratio terhadap puskesmas 2.55 dan polindes dengan desa 0.28, Toga sebanyak 1.458 buah dengan ratio terhadap desa 1.13. Guna mencukupi pelayanan telah dibangun 1 buah rumahsakit jiwa (RSJ), 7 buah rumah sakit daerah, 2 buah milik BUMN, 3 rumah sakit milik ABRI dan 16 Rumah sakit swasta. Sedangkan tenaga kesehatan dari seluruh tenaga kesehatan yang ada sebagian besar PNS dan ditambah PTT, yang bekerja di rumah sakit sebanyak 2.466 orang (26,05%), puskesmas 1.899 (20,05 %) selebihnya pada unit kesehatan sebanyak 5.103 (53,9%). Dengan meningkatnya sarana kesehatan berarti pelayanan dapat dikatakan semakin membaik. Walaupun tingkat pelayanan kesehatan semakin membaik namun masih dirasakan kekurangannya, dan penyebaran tenaga medis belum merata pada masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Riau. Data tahun 1994 menunjukkan jumlah para media 568 orang yang terdiri dari 87 spesialis, 372 dokter umum dan 109 dokter gigi, maka tahun 1998 meningkat menjadi 950 tenaga medis yang terdiri dari 139 dokter spesialis 612 dokter umum dan 199 dokter gigi. Dan untuk sample air bersih yang memenuhi persyaratan secara fisik kimiawi dan bakteriologis yang dilakukan pada air bersih seperti ledeng secara kimiawi 46 buah dengan memenuhi syarat 42 buah (91,30%), bakteriologis 599 dan memenuhi syarat 494 (82,47%). Sumur gali dari 1.130 memenuhi syarat 1.050 (92,92%), penampungan air hujan (PAH) dari 284 memenuhi syarat 152 (52,53%). Sedangkan untuk pembuangan kotoran manusia pada tahun 1998 yang menggunakan jamban sebanyak 344.642 KK ternyata 195.728 KK, dengan jamban yang memenuhi syarat sehat (56,8%). Jumlah persentase tempat BAB/jamban yang memenuhi syarat dari jumlah KK di Propinsi Riau yaitu; Pekanbaru 78.848 (79,1%), Kampar 63.978 (54,2%), Indragiri Hulu 298 (100%), Indragiri Hilir 11.915 (22,2%), Bengkalis 12.591 (48%), Kepri 27.727 (60%) dan Batam 371 (62,1%).

Beberapa permasalahan pembangunan kesehatan di Propinsi Riau antara lain adalah: kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau; tingginya mobilitas penduduk yang keluar masuk di beberapa daerah di Propinsi Riau; tingginya penurunan penyakit menular masyarakat seperti malaria, demam berdarah, HIV/ AIDS, gizi buruk, penyalagunaan obat terlarang; pesatnya pembangunan rumah-rumah liar (Ruli) di beberapa daerah; tingginya dampak pencemaran ekosistem akibat pesatnya pembangunan, kecilnya pendistribusian tenaga pelayanan kesehatan, lemahnya mutu pelayanan kesehatan, tingginya biaya pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan lemahnya kesadaran masyarakat arti hidup sehat, lingkungan dan tempat-tempat umum.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan melalui pendekatan paradigma sehat dengan memperhatikan peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitas sehingga mampu memproduksi secara optimal.
- b. Meningkatkan dan memelihara kualitas institusi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang terjangkau oleh masyarakat.
- c. Meningkatkan fungsi rujukan melalui pemenuhan kebutuhan 4 dokter spesialis (bedah, anak, penyakit dalam dan kebidanan/ kandungan). dan upaya peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan.
- d. Penataan system pembiayaan kesehatan masyarakat dengan menggalang komitmen dari masyarakat serta pihak terkait yang dapat menghasilkan cakupan pelayanan kesehatan yang optimal dan merata.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta meningkatkan pola hidup sehat, dengan memanfaatkan forum komunikasi yang sudah ada dimasyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- f. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pemberantasan penyalagunaan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba)
- g. Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap penyalagunaan produk dan pelayanan kesehatan melalui pembinaan, pengawasan yang lebih intensif.
- h. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional yang rasional dan bertanggung jawab sehingga terwujud kemitraan yang berfungsi dengan baik.
- i. Mewujudkan pesat pelayanan kesehatan yang professional (Health centre).
- j. Rekonstruksi dan refungsionalisasi puskesmas.

3. Program Pembangunan

- a. Program lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat untuk mendukung tumbuh kembangnya anak remaja, memenuhi kebutuhan dasar, dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya penyakit.
- b. Program penyuluhan kesehatan.
- c. Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan, dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
- d. Program perbaikan gizi dalam bentuk pengulangan gizi (Kep) balita dan bantuan program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS), dalam rangka meningkatkan intelektualitas dan produktifitas sumber daya manusia.
- e. Program penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular, meningkatkan pemerataan dan mutu kesehatan masyarakat.
- f. Program pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya yang beredar dalam lingkungan masyarakat.
- g. Program pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, untuk menyelenggarakan upaya kesehatan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- h. Program upaya kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.
- i. Program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan manajemen di puskesmas.

4.2.4.2. Olaraga

1. Tujuan Umum

Hakekat pembangunan olaraga nasional meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengembangan olaraga yang merupakan baghian upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang utamanya ditujukan untuk pembentukan watak dan keperibadian ternasuk sifat-sifat disiplin, sportifitas dan etos kerja yang tinggi. Penyelenggaraan pembangunan olaraga daerah terutama didasarkan kepada kesadaran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan hak dan kewajiban dalam upaya untuk berpartisipasi guna meningkatkan kualitas sumber daya melalui olaraga sebagai kebiasaan dan pola hidup, serta terbentuknya manusia dengan jasmani yang sehat.

Kegiatan olaraga juga merupakan sala satu bentuk ari pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan rangkaian aktivitas jasmani, bermain dan berolaraga, untuk membangun peserta didik yang sehat dan kuat sehingga dapat menghasilkan prestasi akademik yang tinggi. Selain itu pendidikan jasmani yang dilakukan sejak dini merupakan awal pengembangan prestasi olaraga. Hgal ini menunjukan betapa pentingnya pembinaan pendidikan jasmani, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah, yang ahrus dilakukan sejak usia muda.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya olaraga sebagai sala satu ke3butuha hidup dan bagi kesehatan semakin tinggi. Olaraga telah berkembang sebagi gerakan yang mekibatkan keseluruhan lapisan masyarakat yang terscermin dalam kegiatan olaraga masal.

Dalam rangka olaraga persentasi diarena regional dan nasional, atlit yang aa di Propinsi Riau melaui berbagai turnamen cabang olaraga maupun dalam beberapa Pekan Olaraga Daerah (KORDA), Pekan Olaraga Wilayah (KORWI) dan Pekan Olaraga Nasional (PON) telah menunjukan persentasi yang menggembirakan. Hal ini tentu tidak terlepas dari pernana Propinsi Riau sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat kegiatan kemasyarakatan, sehingga dengan demikian menjadikan tempat berdomisilinya sebagian atlit yang ada di Riau.

Pembangunan olaraga untuk event-event selama ini dicerminkan pula dari pembangunan sarana dan prasarana olaraga yang mengalami perkembangan yang sangat cepat yang dipusatkan pada kota dan daerah. Dalam rangka pembinaan olaraga telah dibangun dan dikembangkan sejumlah fasilitas olaraga dengan memacu pada standar tradisional

Kegiatan olahraga perstasiterutama dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONE) bersama induk organisasi olaraga, yang dapat meningkatkan kualitas dan kegiatan serta organisasi keolaragaan.

Masyarakat termaksud perusahaan swasta dan BUMN maupun BUMD banyak berperanh da;lam pembangunan olahraga melalui pembinaan terhadap olaragawan berperestasi dan berbakat.

Kegiatan olarag telah berkembang dan mencakup pula bagi para penyandang cacat yang dibina oleh Yayasan Pembinaan Olaraga Cacat (YPOC), kini menjadi Badan Pembinah Olaraga Cacat (BPOC) olaraga tradisional, Pencinta alam, kebaharian dan perairan, serta kedirgantaraan.

Permasalahan olaraga berfungsi untuk menumbuhkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di propinsi Riau dalam rangkah membangun manusia yang berkualitas dengan menjadikan olahraga sebagai wahana dalam penelusuran bibit untuk membentuk olaragawan berprstasi. Dengan demikian, permasalahan yang ada adalah pembangunan olaraga adalah bagaimana meningkatkan dan memperluas olaraga atau permasyarakatan olaraga dikalangan pelajaran, mahasiswa, dan masyarakat dalam upaya untuk membangun kesehatan dan kesegaran jasmani, mental, dan rohani masyarakat serta membentuk watak dan keperibadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi, merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas manusia.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan olaraga telah cukup berkembang, bahkan mempunyai andil dalam pencapaian perestasi ditringkat nasional pada

beberapa cabang olahraga. Namun, keterlibatan itu masih terbatas dan belum melibatkan dunia usaha secara keseluruhan sehingga masih luas potensi yang masih dapat dikembangkan. Oleh karena itu, menjadi tantangan untuk membangkitkan swadana dan keikutsertaan masyarakat terutama masyarakat pengusaha, untuk turut serta dalam pembangunan olahraga dalam rangka olahraga berprestasi. Disisi lain adalah belum mantapnya koordinasi serta belum berkembangnya prestasi olahraga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu juga tetap harus memperhatikan permasalahan yang dimiliki oleh atlet olahraga, baik itu sarana dan prasarana serta juga yang tidak kalah pentingnya masalah gizi para atlet sehingga mereka bisa berkompetisi dengan baik. Paling-paling diharapkan adalah partisipasi pemerintah daerah dalam pemberian kehidupan yang layak bagi para olahragawan yang berprestasi untuk mempertahankan nama baik daerah.

Permasalahan pembangunan olahraga yang sedang dihadapi adalah kurangnya pengorganisasian induk organisasi olahraga, kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi atlet, pelatih dan guru olahraga, kurangnya penguasaan dan pemberdayaan IPTEK olahraga secara kualitas dan kuantitas cabang olahraga berprestasi, rendahnya pengakuan oleh pemerintah dan swasta untuk atlet yang berprestasi, rendahnya pembinaan dan penyuluhan olahraga penyandang cacat, kurangnya pembinaan atlet dan pelatih yang berprestasi serta guru pendidikan jasmani, dan kurang terbinaanya olahraga prestasi, olahraga tradisional daerah serta olahraga masyarakat.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Pembangunan olahraga diarahkan pada penataan ulang dan penyempurnaan system pembangunan keolahragaan yang berbasiskan pada profesionalisme pada pelayanan public, pemberdayaan daerah, partisipasi masyarakat, system pendidikan, kalangan profesional dan dunia usaha, serta kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teknologi informasi, dengan mewujudkan keserasian, keterpaduan dan keharmonisan kebijaksanaan, program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan, dengan daerah kabupaten/kota.
- b. Mewujudkan kemandirian dan pencarian bibit olahraga pada jalur formal maupun non formal.
- c.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan olahraga diberbagai bidang pembangunan
- b. Program pembinaan keolahragaan
- c. Program peningkatan pemaduan dan pencarian bibit olahraga formal dan non formal, terutama terhadap olahraga berprestasi dan olahraga tradisional, dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pemaduan bakat dan pembibitan olahraga sejak dini termasuk penyandang cacat terutama disekolah.
- d. Program pemasyarakatan olahraga dan kesegaran jasmani, bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat dan pelaksanaan kegiatan olahraga.
- e. Program peningkatan prestasi olahraga, bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga termasuk olahraga bagi penyandang cacat.

4.2.5. Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan.

1. Kondisi Umum.

Propinsi Riau memiliki keragaman suku dan budaya, selain memiliki budaya asli, yaitu budaya melayu. Keberagaman suku dan budaya juga merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha

Kuasa karena keberagaman itu merupakan asset daerah yang dapat menghasilkan devisa. Meskipun beragam, budaya melayu tetap eksis dan bahkan mulai disadari oleh kaum muda bahwa budaya melayu memiliki daya tarik sendiri karena mengandung falsafah hidup orang melayu yang tidak ketinggalan kemajuan zaman. Selain itu, penghargaan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan budaya melayu merupakan hal yang kondusif bagi perkembangan budaya melayu. Masyarakat bukan melayu yang berada di Daerah Riau pada umumnya dan di daerah-daerah kosentrasi masyarakat Melayu telah banyak yang berbahasa melayu dan mengikuti cara-cara hidup orang melayu. Kondisi seperti ini perlu dipertahankan dan dikembangkan agar budaya melayu tetap eksis, terutama dalam menghadapi budaya global.

Tujuan pembangunan kebudayaan adalah membangun ketahanan budaya daerah yang kokoh, dinamis, dan kreatif dengan tetap berperibadian dengan berakar pada jati diri bangsa dan berdaya terhadap pengaruh globalisasi. Dan sasaran yang akan dicapai adalah terbentuknya rujukan system nilai budaya yang berbasis pada warisan nilai luhur guna mendukung kerukunan, harapan hidup, dan peradaban bangsa.

2. Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan kebudayaan adalah menggali, memelihara dan melestarikan nilai-nilai seni budaya lokal untuk memperkaya khasanah budaya melayu, serta mengembangkannya untuk memperkaya budaya nasional serta menangkal akses penetrasi budaya asing yang bersifat negatif, melalui revitalisasi dan apresiasi kebudayaan.

3. Program Pembangunan

- a. Program pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya luhur, keragaman budaya dan tradisi.
- b. Program pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah
- c. Pembinaan bahasa dan kesusastraan dalam rangka pengembangan dan pelestarian bahasa dan sastra melayu
- d. Program pembinaan peninggalan sejarah dan permuseuman, terutama terhadap sejarah melayu Riau
- e. Program pembinaan dan pengembangan kesenian daerah (melayu)
- f. Program pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana bagi pengembangan kebudayaan melayu
- g. Program pembentukan pusat-pusat kebudayaan dan sanggar-sanggar kebudayaan daerah di kabupaten/kota di Propinsi Riau.

4.2.6. Penunjang

4.2.6.1. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang Pertanahan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup

1. Kondisi Umum

Riau memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, antara lain minyak bumi, batu bara, timah, bauksit, pasir laut, gas alam, hutan, bermacam-macam jenis ikan dilaut dan di sungai dan objek wisata. Sebagian potensi sumber daya alam itu telah diolah dan dipergunakan untuk keperluan dalam negeri dan luar negeri (komoditi ekspor). Sekalipun demikian, masih banyak lagi sumber daya alam yang belum dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal. Masalah terbesar dalam pembangunan, terutama di daerah perairan adalah karena

letaknya yang terbesar dan terpercaya serta masih terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan dan telekomunikasi.

Pembangunan Daerah Riau adalah bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional, yang hakikatnya adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Daerah Riau dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi dan desentralisasi pengaturan sumber daya ekonomi dengan mempertimbangkan penerapan pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Disamping itu, pembangunan daerah Riau juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk memperluas pilihan bagi masyarakat mengembangkan kehidupan sosial-ekonominya dengan lebih baik dan maju.

Pembangunan Daerah Riau dilaksanakan dengan sinergis oleh seluruh komponen dan potensi daerah dengan berdasarkan azas keseimbangan pemerataan pertumbuhan antar daerah, kemitraan antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, komunikasi dan interaksi lintas pelaku secara terbuka secara demokratis, manajemen publik yang efektif dan efisien, serta didukung dengan instrument pengelolaan tata ruang, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup serta pembangunan desa/kota dan perumahan dan pemukiman, yang memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal penataan ruang Daerah Riau masih menghadapi ketidaktepatan rencana dan ketidak tertiban pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi efisiensi kegiatan sosial-ekonomi, investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, dan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. hal tersebut selanjutnya akan menurunkan kualitas kehidupan, produktifitas ekonomi daerah, dan hambatan terhadap kelanjutan pembangunan.

Pembangunan desa-desa di Provinsi Riau masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti kesenjangan antara kota dan desa, keterbelakangan, serta belum adanya kemampuan untuk memanfaatkan keunggulan dan potensinya, serta keterbatasan aparatur desa. Sedangkan pembangunan kawasan perkotaan yang merupakan kendala adalah terbatasnya infrastruktur kota yang belum mampu memberikan pelayanan sosial-ekonomi yang memadai kepada masyarakat. Sementara itu masalah pengangguran, kemiskinan dan kerawanan sosial tetap terjadi masalah yang belum terpecahkan, yang berdampak pada penurunan keterbatasan, dan lingkungan hidup serta jaminan keamanan berusaha.

Dalam hal pertanahan, pada saat ini Daerah Riau masih menghadapi masalah kurangnya kemampuan pemerintah dalam pengelolaan administrasi pertanahan antaralain dalam menangani proses sertifikasi status tanah, sedangkan dilain pihak peranan pemerintah sangat penting untuk menjamin ketepatan penggunaan dan ketertiban penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan sosial ekonomi dan umum.

Mengiangat potensi sumber daya alam yang relative besar baik didarat sungai maupun laut pada saat ini sudah sangat menurun, baik jumlah deposited maupun kualitasnya, karena adanya kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang relative lebih tinggi intensitasnya dibandingkan dengan kegiatan rehabilitasi dan koservasi, terutam dalam bidang pertambangan dan kehutanan serta laut. Sejumlah kawasan, seperti didaerah Singkep terdapat bekas penambangan timah, Karimun terdapat bekas penambagnn timah dan garanit, bebrapa kawasan terdapat lahan-lahan kritis, bekas penebangan hutan, yang sudah tidak dapat dimanfaatkan karena potensinya telah habis dan ekosistemnya terganggu.

Kerusakan hutan di Daerah Riau telah mencapai 212.547 hektar dan yang masih baik dan efektif tinggal 828.814 hektar sehingga semangkin berkurangnya kemampuan fungsi hutan

sebagai resapan air yang akan mengendalikan permukaan air tanah dan erosi. Disamping itu, telah pula terjadi gangguan lingkungan yang cukup serius meliputi udara, air sungai, dan tanah yang disebabkan oleh kurang disipkinnya sejumlah perusahaan industri dalam mematuhi ketentuan tentang pengelolaan limbah industri. Gangguan terhadap lingkungan tersebut tidak hanya terjadi didaratan, tetapi terdapat didaerah pantai dan perairan, dalam bentuk abrasi dan pencemaran laut.

Menurut sensus tahun 2002 penduduk Riau berjumlah 4.733.946 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.405.283 jiwa dan perempuan 2.328.665 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Riau relative tinggi yaitu 3,79 persen pertahun kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah kota Batam yang rata-rata 12, 79 persen pertahun dan terendah adalah kabupaten Natuna dengan rata-rata 0,15 persen pertahun.

Dalam hal kepadatan penduduk urutan tertinggi adalah kota Pekanbaru sebesar 944,69 orang per Km², urutan kedua kota Batam yaitu 505,83 oarang per Km² dan kepadatan penduduk dengan urutan terendah adalah kabupaten Kampar yaitu 22,81 oarng per Km². Sedangkan banyaknya rumah tangga di Propinsi Riau berdasarkan data 1999 tercatat 986.884 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4,27 per rumah tangga. Penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan suatu kendala karena dapat menimbulkan suatu kondidisi yang kurang sehat bagi kegiatan ekonomi dan keadilan sosial.

Penanganan masalah kependudukan melalui keluarga berencana, adalah sejauh mana upaya perwujudan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dapat terwujudlan melalui berbagai aktifitas yang dilakukann oleh keluarga itu sendiri.

Dengan letak Propinsi Riau yang cukup strategis, maka permasalahan kependudukan yang dihadapi antara lain adalah ; penyebaran penduduk yang tidak merata, permasalahan sosial, kriminalitas, tinggihnya pertumbuhan penduduk karena adanya migrasi; pemukiman kumuh dan masalah kependudukan lainnya akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan semakin tinggihnya arus mobilitas penduduk yang masih cukup tinggi, pertumbuhan yang tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan penyediaan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas sosial.

Masalah-maslah sosial di Riau yang menonjol saat ini adalah pelacuran, perjudian, dan penggunaan obat-obat terlarang atau Narkoba. Masalah-masalah ini tampaknya menjadi dilema karena sulit diberantas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan diantara beberapa faktor itu muncul dari masyarakat itu sendiri. Kemiskinan merupakan sala satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial, muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan, dan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar. Jumlah keluarga di Riau adalah 970.443 (BKBN, 2000). Dalam jumlah keluarga itu, terdapat 74.489 (7,67%) keluarga pra-sejahtera dan 155.191 (15,99%) keluarga sejahtera I, dengan alasan ekonomi. Gam,baran ini menunjukkan bahwa terdapat 435.239 (43,85%) keluarga miskin di Riau. Kemiskinan selalu memiliki korelasi dengan rendahnya pendidikan kepala keluarga. Dari 970.443 keluarga itu, 268.209 (27,64%) KK tidak tamat SD, 422.120 (43,50%) KK tamat SD dan SLTP, 280.105 (28,86%) KK tamat SLTA dan Perguruan Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas SDM keluarga Riau.

Masalah sosial lainnyayang tidak kala pentingnya untuk diperhatikan adalah penyalagunaan obat-obat terlarang. Meskipun angka resmi tergolong kecil jika dibandingkan dengan pemberitaan di surat-surat kabar, penyalagunaan obat-obatan terlarang ini perlu mendapat perhatian khusus karena Riau merupakan daerah yang strategis bagi arus lalu lintas barang-barang haram itu.

Selain masalah-masalah diatas, masalah suku terasing juga harus mendapat perhatian, terutama program pemukiman dan pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian maka,

banyaknya penyandang masalah sosial merupakan beban pembangunan. Hal ini harus mendapat penanganan yang baik dari pihak pemerintah karena salah satu tujuann pembangunan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Kebijakan Pembangunan

A. Penataan Ruang

- 1) Memantapkan system perencanaan tata ruang dengan meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan sesuai dengan kaidah perencanaan.
- 2) Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang melalui penyediaan rencana rinci tata ruang dan melengkapinya dengan kebijakan, peraturan-peraturan, dan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui pengembangan prosedur dan mekanisme, pengembangan organisasi, pemasyarakatan, prinsip penataan ruang, termasuk mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penyusunan rencana, perwujudan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 4) Menata kembali dan mengembangkan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

B. Pertanahan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan adminitrasi dan system informasi pertanahan kepada masyarakat tentang setatus kepemilikan tanah.
- 2) Meningkatkan pengembangan pertanahan yang serasi dengan rencana dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan.
- 3) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelolaan dan organisasi pertanahan.
- 4) Memberikan kepastian hak atas tanah adat dan ulayat.
- 5) Melaksanakan redistribusi dan realokasi lahan-lahan yang dikuasai secara berlebihan yang tidak memenuhi azas keadilan dan kesamarataan, terlantar, tidak ataupun belum dimanfaatkan bekas HGU yang dicabut atau sudah habis jangka waktunya untuk menjamin ketersediaan lahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan umum (*public utilities*).

C. Pembangunan Daerah

- 1) Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga pollitik, lembaga hukum, lembaga adat, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat di Propinsi Riau.
- 2) Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah sesuai dengan potensi dan kekayaan sumber daya alam yang telah di manfaatkan selama ini oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan penerimaan dalam negerinya.
- 3) Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna mendukung mewujudkan otonomi yang luas dan khusus bagi Propinsi Riau.
- 4) Meningkatkan pembinaan terhadap kota-kota yang mengalami perkembangan yang cepat sebagai akibat dari pesatnya kegiatan pembangunan diwilayah tersebut.
- 5) Memberdayakan desa-desa terutama yang berada didaerah terpencil dan sulit di jangkau.

D. Kependudukan

- 1) Mengembangkan kebijaksanaan kependudukan yang selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatann sumber daya manusia, khususnya meningkatkan kualitas penduduk.
- 2) Pengendalian penduduk
- 3) Penataan dan penyebaran penduduk
- 4) Pengembangan potensi penduduk
- 5) Meningkatkan peran kader tenaga keluarga berencana menuju keluarga informal masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk.
- 6) Pengembangan potensi penduduk baik kualitas maupun kuantitas.

E. Kesejahteraan Sosial

- 1) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan sosial sehingga mampu mendukung tumbuhnya sikap tekad kemandirian manusia dan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia.
- 2) Mempekuat jangkauan dan pelayanan sosial yang semakin adil dan merata.
- 3) Peningkatan profesionalitas pelayanan sosial, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh masyarakat.
- 4) Meningkatkan pembinaan organisasi sosial sebagai ujung tombak dalam menggerakan penenganan masalah sosial terutama pada lapisan bawah.
- 5) Pembangunan ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana.

F. Lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang dilalukan secara terpadu dengan mempertimbangkan keselarasan dan keseimbangan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Pembangunan lingkungan hidup dilakukan dengan mengembangkan berbagai program yang bertujuan mempertahankan kelestarian potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga kemampuan sumber daya untuk menunjang pembangunan tetap dapat dipertahankan.
- 3) Mengembangkan kelembagaan, peran serta masyarakat dan kemampuan sumber daya manusia serta mengembangkan teknologi pengelolaan lingkungan.
- 4) Menegakan hukum serta meningkatkan kerja sama lintas kabupaten/kota dibidang lingkungan hidup.

3. Program Pembangunan

A. Penataan Ruang

- a. Pemantapan system perencanaan tata ruang.
- b. Program penataan ruang pekotaan, perdesaan dan kawasan khusus termasuk kawasan pantai, laut, dan pulau-pualau kecil.
- c. Program penyusunan rencana detail pemanfaatan ruas kawasan.
- d. Program penyediaan forum koordinasi dan konsultasi keterpaduan dan sinkronisasi tata ruang pada semua tingkatan pemerintahan.
- e. Program penataan pembangunan
- f. Program pengawasan, pengendalian, dan pembinaan tata bangunan.
- g. Program pengembangan sumber daya manusia dalam bidang tata ruang.

- h. Program pembangunan sarana dan prasarana
- i. Program peningkatan kapasitas pengelolaan kota
- j. Program pembangunan sarana dan prasarana tata ruang
- k. Program pengembangan fasilitas pengelolaan kota.

B. Pertanahan

- a. Program pengembangan system sertifikasi dan administrasi pertanahan.
- b. Program penataan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang, wilayah dan kawasan.
- c. Program pengembangan dan pelayanan pertanahan
- d. Program pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pembangunan administrasi pertanahan.

C. Pembangunan Daerah

- a. Program pembinaan kelembagaan
- b. Program pembinaan keuangan daerah
- c. Program pengembangan peranan dan fungsi DPRD
- d. Program pembinaan perkotaan
- e. Program pembangunan pedesaan

D. Kependudukan

- a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan kependudukan, dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pembangunan kependudukan.
- b. Program kependudukan dalam rangka pengendalian pertumbuhan dan penyebaran penduduk.
- c. Program keluarga berencana untuk menuju keluarga sejahtera, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang lebih berkualitas.
- d. Program pemberdayaan keluarga, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

E. Kesejahteraan Sosial

- a. Program peningkatan mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial.
- b. Program pembinaan kesejahteraan sosial.
- c. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial,
- d. Program pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah kemasyarakatan.
- e. Program pengembangan sistem informasi masalah kemasyarakatan.
- f. Program pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMTS).

F. Lingkungan Hidup

- a. Program pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian lingkungan
- b. Program pengembangan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Program pembinaan daerah pantai.

- d. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terutama terhadap daerah yang berpotensi mengalami kerusakan ekosistem pantai dan laut.
- e. Program penyelamatan dan pengendalian kerusakan hutan, tanah dan air.
- f. Program konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- g. Program pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- h. Program penataan hukum dan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- i. Program peningkatan peran serta masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4.2.6.2. Pembinaan dan Pengembangan Supremasi Hukum, Aparatur, Politik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

A. Hukum

1. Kondisi Umum

Pemerintah Propinsi Riau melaksanakan azas dikonsentrasi melalui penekanan supremasi hukum yang menyangkut persoalan-persoalan nasional berada di daerah pemerintah Propinsi RIAU. dilain pihak pemerintah Propinsi Riau juga melaksanakan azas desentralisasi atau otonomi. Aspek-aspek hukum harus relevan dengan persoalan daerah menyangkut kehidupan masyarakat dalam lingkup Propinsi Riau. dalam melaksanakan pemerintahan, harus ada input atau output peraturan, berupa aturan yang menuntut keteraturan masyarakat dalam bermasyarakat dan pemerintahan.

Kesempatan luas pada era reformasi adalah peninjauan kembali peraturan-peraturan yang tidak relevan lagi dan peraturan-peraturan baru dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi. Review peraturan-peraturan, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta peraturan ketertiban masyarakat maupun aparat pemerintah.

Peraturan-peraturan baru dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi, sesuai dengan kewenangan pemerintah Propinsi Riau adalah menyangkut keterkaitan antar kabupaten dan kota, serta keterkaitan sektoral. Peraturan-peraturan itu berupaya menata kehidupan masyarakat dalam wilayah Propinsi Riau. tingkat pencapaian pelaksanaan peraturan itu harus didukung oleh aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, agar tercapai partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu sosialisasi peraturan harus terus menerus dilaksanakan, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang pada tindak lanjutnya akan menghasilkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelembagaan hukum diakui eksistensinya dalam menegakan supremasi hukum ditengan masyarakat. Lembaga hukum dapat berfungsi sebagai alat control bagi aparat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pakar dan praktisi hukum yang potensial dapat mensikapi penyelenggaraan supremasi hukum harus dikembangkan. Reformasi hukum untuk menuju sistm pengawasan yang mantap sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berkesinambungan.

Isu strategi pembangunan bidang hukum adalah:

- a. Belum terlaksana review peraturan yang tidak relevan lagi dengan perekonomian otonomi dengan optimal, guna terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Identifikasi peraturan-peraturan baru, terutama untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawah, sehingga tercapai aparat yang berfungsi *reinventing government* serta menerapkan prinsip-prinsip reformasi.
- c. Peningkatan kualitas aparat hukum demi tegaknya supremasi hukum belum terlaksana.

- d. Masih lemahnya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan dalam pemerintahan, untuk itu isu yang menonjol adalah peningkatan pemberdayaan system hukum yang mandiri dan netral, serta mempunyai integritas yang kuat dan handal untuk mensikapi peradilan yang bermoral, dan bertindak seadil-adilnya.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Meningkatkan kualitas penegakan hukum secara konsisten sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pelaksanaan penyuluhan hukum serta *law enforcement* yang diikuti oleh sangsi-sangsi bagi yang melanggar secara tegas, konsisten, adil, dan transparan.
- c. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukannya.
- d. Mengaktualisasikan dan merevisi berbagai bentuk peraturan daerah Propinsi Riau yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungan yang sangat dinamis.
- e. Mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang mendukung kegiatan pembangunan daerah.

3. Program Pembangunan

Dalam rangka menjabarkan arah kebijakan pembangunan dibidang hukum maka disusun program sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat dan penegak hukum, termasuk berbagai produk PERDA Propinsi Riau.
- b. Program peningkatan penyuluhan hukum.
- c. Program pembinaan hukum guna mewujudkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Program peningkatan partisipasi masyarakat dibidang hukum.
- e. Program pemberdayaan system hukum
- f. Program penegakkan hukum

B. Aparatur Pemerintahan

1. Kondisi umum.

Kelembagaan pemerintah pada umumnya belum dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan selalu ketinggalan dari kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Ada kecenderungan aparat pemerintah yang dilayani masyarakat. Tidak ada ketepatan waktu pelayanan, sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru tentang aparat sebagai pelayan masyarakat. Penempatan aparat cenderung tidak sesuai dengan bidang studi atau keahliannya, sehingga menimbulkan kelambanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Prasarana dan sarana kerja, belum memenuhi kelengkapan sebagai pelayan masyarakat. Disiplin kerja dan kesejahteraan yang memadai sesuai indeks biaya hidup, belum terlaksana dengan baik dan konsistensi sebagai pelayan yang bersih dan berwibawah.

Kelembagaan pemerintah yang diakui eksistensinya berfungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat. Aparatur pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Aparatur pemerintah merupakan sumber daya yang potensial dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai

dengan bidang dan tugasnya. Tersedia prasarana dan sarana kerja, terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Reformasi dalam penertiban dan pengawasan aparatur pemerintah Riau yang konsisten sebagai pelayan masyarakat yang bersih dan mampu mengawasi pembangunan berkesinambungan.

Isu strategis pembangunan aparatur pemerintah adalah:

- a. Integritas kelembagaan pemerintah propinsi yang mantap dan dinamis dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, serta lebih responsive terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Aparatur pemerintah propinsi yang proaktif dalam melayani masyarakat bukan dilayani masyarakat.
- c. Batas waktu penyelesaian pelayanan, tidak adanya kepastian waktu dan ketepatan pelayanan, sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru tentang aparatur sebagai pelayan masyarakat.
- d. Penempatan apratur yang sesuai dengan bidang studi atau keahliannya,, sehingga dapat menimbulkan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
- e. Prasarana dan sarana kerja, dan kelengkapan sebagai pelayanan masyarakat.
- f. Disiplin kerja dan intensif yang memadai sesuai indeks biaya hidup, dan konsistensi sebagai pelayan yang bersih dan berwibawah dalam mengendalikan pembangunan.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Meningkatkan kesetiaan dan pengabdian aparatur pemerintah daerah kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara serta perjuangan masyarakat Riau dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- b. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dan konsisten guna menghaapi tuntutan global yang sangat dinamis, kompetitif, akuntabilitas publik, demokratisasi dan transparansi.
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana kerja serta kesertaan aparatur.
- d. Meningkatkan upaya penertiban terhadap apratur untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, berwibawah dan bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
- b. Program pengembangan sumber daya manusia aparatur
- c. Program penataan kelembagaan, struktur organisas. Ketatalaksanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan
- d. Program aparatur pemrintah daerah yang bersih dan berwibawah
- e. Program peningkatan kesejahteraan aparatur
- f. Program pendayagunaan system dan pelaksanaan pengawasan
- g. Program pemberian sanksi penghargaan.

C. Politik

1. Kondisi Umum

Kondisi perpolitikan nasional pada saat ini, dilandasi oleh kebebasan mengemukakan pendapat yang sudah kebablasan, bahkan cenderung arogansi yang berlebihan dan kurang memperhatikan koridor yang berlaku. Penjarahan asset negara banyak dilakuakn masyarakat, karena selama ini merasa hak-haknya banyak diambil. Elit politik banyak meperalat masyarakat dengan maksud mencapai tujuan tertentu, baik untuk melawan pemerintah dan

mendukung pemerintah. Masyarakat terombang-ambing karena provokator sebagai akibat informasi salah yang diperoleh oleh masyarakat. Distorsi atau aspirasi, kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datang dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintahan maupun kelompok-kelompok berkepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintahan dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkis walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat tempore.

Kelembagaan partai politik, sebagai penampung aspirasi masyarakat, dapat berfungsi sebagai alat kontrol bagi aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Isu strategis pembangunan bidang politik adalah:

- a. Belum terlaksana dengan baik pembinaan politik, guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- b. Pemerintah yang bersih dan berwibawah, belum terwujud seperti yang diharapkan, serta aparatur belum mengikuti prinsip-prinsip reformasi.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia elite politik mendapat posisi yang terpendang, karena itu format dan arah kemana pembangunan kota ini akan dibawa, amat tergantung elite politik yang berkuasa saat ini.
- d. Masih lemahnya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan dalam pembangunan, untuk itu isu yang menonjol adalah peningkatan pemberdayaan system pengawasan yang mandiri dan netral, serta mempunyai integritas yang kuat dan handal dalam pembekalan pengawasan itu sendiri.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan, sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
- b. Menciptakan suasana kehidupan yang demokratis guna menunjang peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas pelayanan politik.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organisasi politik agar lebih mandiri serta berbudaya politik yang sesuai dengan jiwa dan semangat ideologi pancasila.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan pemberdayaan politik masyarakat terutama dalam menghadapi pelaksanaan pemilu.
- b. Program peningkatan pemberdayaan organisasi masyarakat
- c. Program peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawah
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sebagai pelaku politik.
- e. Program pemberdayaan masyarakat dan pengawasan politik
- f. Program peningkatan suasana kehidupan demokrasi.

D. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1. Kondisi Umum

Hasil pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan dalam rangka perlindungan masyarakat selama ini telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung beberapa kelemahan. Implikasi kelemahan itu adalah jumlah dan tingkat profesionalisme personil kurang memadai, sebagai akibat keterbatasan kualitas dan kuantitas. Dengan ketidakcukupan kualitas

dan kuantitas dibandingkan dengan frekwensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka berakibat berkurangnya jaminan rasa aman dan ketrentaman dikalangan masyarakat. Rasa tidak aman itu dapat dilihat dari banyak terjadinya perampokan, jamret, dan pembunuhan.

Kelembagaan keamanan diakui eksistensinya sebagai pelindung masyarakat dari ancaman ketertiban. Lembaga yang berfungsi memberikan perlindungan masyarakat adalah LINMAS yang berasal dari masyarakat dan berfungsi mewujudkan ketertiban masyarakat. Perlindungan masyarakat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada POLRI, karena itu harus didukung oleh partisipasi masyarakat yang potensial dalam mensikapi gangguan, sehingga tercipta masyarakat yang tertib dan amanserta menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujud masyarakat yang harmonis. Reformasi LINMAS menempatkan diri sebagai institusi yang independent, kembali kepada basisnya negara dan daerah dalam mendukung tertib hukum yang mantap sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berkesinambungan.

Isu strategis pembangunan keamanan dan ketertiban adalah:

- a. Belum terlaksana dengan baik pembinaan keamanan, guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparat keamanan, belum sesuai dengan jumlah masyarakat yang dilayani.
- c. Masih lemahnya kelembagaan LINMAS berfungsi sebagai pengaman masyarakat.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, dengan upaya peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten, transparan dan objektif, serta peningkatan kualitas pelayanan, yang melibatkan seluruh potensi masyarakat khususnya dalam mendorong berkembangnya system pengamanan swakarsa dan keamanan lingkungan.
- b. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dengan penanganan setiap masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatkan upaya pengamanan terhadap proyek-proyek strategis dan kekayaan daerah dari ancaman pencurian, eksploitasi dan eksploitasi secara semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan pengambilan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang berlaku.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Program peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Program pemberdayaan system keamanan masyarakat.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya dalam rangka perwujudan rasa aman, tenang, dan tertib dalam masyarakat.

4.2.6.3. Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1. Umum

Kebebasan mengemukakan pendapat, sudah kebablasan, bahkan cenderung arogansi yang berlebihan, kurang memperhatikan koridor yang harus dipatuhi. Masyarakat belum selektif dengan segala informasi yang dipublikasi, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam mensikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat terombang-ambing karena provokator, hal ini disebabkan oleh lemahnya data dan informasi yang diperoleh masyarakat. Apalagi kondisi kehidupan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga mudah dipengaruhi karena alasan ekonomi. Aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal, karena aspirasi

rakyat belum terartikulasi dengan sempurna dan transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan masih sangat terasa yang datangnya dari elit penerangan, komunikasi dan media masa, penyelenggara negara, pemerintahan maupun kelompok-kelompok tertentu.

Kelembagaan penerangan, komunikasi dan media massa yang diakui eksistensinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, harus berfungsi sebagai alat kontrol bagi aparaturnya dan tingkah laku masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Isu strategis pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa adalah;

- a. Belum terlaksana dengan baik pembinaan kelembagaan penerangan, komunikasi dan media massa, guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Insan penerangan, komunikasi dan media massa, belum terwujud seperti yang diharapkan
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai elit penerangan, komunikasi dan media massa, mendapat posisi yang terpendang oleh pemerintah, karena itu format dan arah kemana pembangunan Propinsi Riau ini akan dibawa, amat tergantung elite penerangan, komunikasi dan media massa yang berfungsi pembentuk opini masyarakat.
- d. Masih lemahnya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan dalam pembangunan. Untuk itu isu yang menonjol adalah peningkatan pemberdayaan sistem pengawasan yang mandiri dan netral, serta mempunyai integritas yang kuat dan handal dalam pembekalan pengawasan itu sendiri.

2. Kebijakan Pembangunan

- a. Meningkatkan sistem informasi daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi secara tepat, cepat, meluas dan terpadu.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kegiatan komunikasi dan informasi dan media massa dalam mengarahkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- c. Mengoptimalkan pembangunan media komunikasi dan informasi untuk kepentingan pembangunan dan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan jangkauan pelayanan komunikasi, informasi dan media massa.
- e. Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi kehidupan pers dan media massa yang demokratis, bebas, objektif, berimbang, bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan sistem informasi untuk menuju "Riau on-line"
- b. Program pembinaan dan pengembangan radio, televisi, dan film.
- c. Program peningkatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan informasi, komunikasi, media massa, dan lembaga kewartawan.
- d. Program pengembangan sarana dan prasarana.
- e. Program peningkatan profesionalisme pers yang bebas dan bertanggung jawab.

BAB 5

KAIDAH PELAKSANAAN

Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2001-2005 adalah merupakan penjabaran pola dasar pembangunan daerah Propinsi Riau tahun 2001-2005, dan akan berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan diseluruh wilayah Propinsi Riau, dalam kurun waktu 2001-2005.

Dalam rangkakah itu maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Hukum Riau, berkewajiban mengkoordinasi dan mengarahkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat daerah riau, dalam pelaksanaannya dan pengendalian pembangunan yang mengacu kepada propeda propinsi riau tahun 2001-2005.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau berkewajiban mengawasi pelaksanaan Propeda Propinsi Riau tahun 2001-2005.
3. Setiap dinas/badan/instansi pemerintah daerah dalam lingkungan pemerintah Propinsi Riau diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Propeda ini, sesuai dengan lingkup dan tugas masing-masing dinas/badan/instansi.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RAPBD), harus dirumuskan dengan mengacu pada PROPEDA dan memperhatikan Renstra pada butir (3) diatas oleh masing-masing dinas/badan/instansi dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Riau.
5. Repetada ditetapkan dengan keputusan hukum Riau sedang RAPBD ditetapkan dengan Keputusan Daerah (Perda) disusun dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.
6. Sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan Propeda ini diperoleh dari anggaran pemerintah pusat, bantuan pinjaman luar negara dan pemerintah daerah sendiri, masyarakat dan swasta.
7. Sesuai dengan strategi kebijakan pembangunan yang tercantum didalam Propeda Propnsi Riau, maka upaya pembangunan diarahkan pada pemacu pembangunan Propinsi Riau.
8. Pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa
9. Pembinaan dan pengembangan SDM
10. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
11. Pembangunan kesehatan dan olahraga
12. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan
13. Penetapan urutan priorotas bagi setiap program indikator yang tercantum dalam Propeda, dilakukan pada setiap penyusunan Repetada dan RAPBD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berhubungan serta dinamika lingkungan strategis.
14. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, lembaga internasional dan bantuan luar negeri serta swasta tetap harus mengacu kepada Propeda ini, sehingga akan terbangun sinergi positif dari semua kegiatan pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi Propinsi Riau, yaitu: terwujudnya Propinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020

BAB 6

PENUTUP

Pembangunan daerah Propinsi Riau adalah bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional yang pada hakikatnya adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang andal dan propesional untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan mengelolah sumber daya daerah secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat daerah Riau.

Pembangunan daerah Propinsi Riau dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan desentralisasi pengaturan sumber daya dengan mempertimbangkan penerapan pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Disamping itu pembangunan daerah Riau juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk memperluas pilihannya dalam mengembangkan kehidupan sosial ekonominya dengan baik dan maju.

Pembangunan daerah Propinsi Riau dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen di daerah Riau dengan berlandaskan asas keseimbangan pemerintahan pembangunan antar kabupaten/kota, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, komunikasi dan interaksi lintas pelaku secara terbuka dan demokratis, manajemen publik yang efisien dan efektif serta dapat dipertanggung jawabkan dan didukung oleh instrument pengelolaan tata ruang, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan.

Perogram Pembangunan Daerah Propinsi Riau (PROPEDA) merupakan dokumen perencanaan manajerial, komperehensif, yang memuat indikasi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana diatas.

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau merupakan pengenjawantahan secara oprasional dari pola dasar pembangunan daerah Riau, dan disusun berdasarkan analisa situasi daerah dengan memperhatikan aspek-aspek konsistensi, rasional, obyektif serta sinergis secara vertical dan horizontal.

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) propinsi, yang untuk selanjutnya dijabarkan dalam Repetada dan RAPBD propinsi Riau kurun waktu 2001-2005.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Propinsi Riau, yang disusun melalui Propeda ini, sangat tergantung pada peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dengan pemerintah propinsi dan DPRD Propinsi Riau kerangkah itu, perlu terus dikembangkan kerja sama dan kemitraan yang sinergis antara pemerintah propinsi, DPRD dan masyarakat, secara jujur, transparan, adil, demokratis dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil-hasil pembangunan daerah benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat daerah Riau sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.